



2 PUTARAN **GANJAR** MERAPAT KE PRABOWO

**KAESANG
NGAREP JADI
GUBERNUR
JATENG**

**CALON
KEPEMIMPINAN MUDA
SIAP KEMBALIKAN
KEJAYAAN PAPUA**

**DEBAT
PANAS DI
TAHUN
BARU**

**MASIFKAN
GERAKAN TANAM
HINGGA PERBANYAK
PASAR MURAH**

**BERSOLEK
MENUJU HARI
KEMERDEKAAN
PERTAMA DI IKN**

info indonesia

INOVASI UNTUK NEGERI



IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN DISPLAY/HAL

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL/HAL

RP 65.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000



*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON UNTUK PARA PELANGGAN**



Alamat REDAKSI/IKLAN/pemasaran: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

• TELP 021-791 96781 • FAX 021-791 96786

EDISI
BULAN
JANUARI
2024

DAFTAR ISI



7

INFO UTAMA

Musim penghujan di awal 2024 memang dapat mendinginkan suhu udara. Pada saat bersamaan, suhu politik terasa memanas seiring rangkaian debat ketiga menjelang Pilpres 2024.



24

INFO SUMSEL

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni menegaskan pihaknya akan terus berupaya dalam pengendalian inflasi daerah agar perekonomian berjalan stabil serta tidak menimbulkan gejolak. Untuk mencapai hal tersebut upaya terus dilakukan oleh seluruh stakeholder di Pemrov Sumsel.



34

INFO KALTIM

Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menyatakan bahwa Hari Ulang Tahun ke-67 Kalimantan Timur adalah sebuah pengingat untuk tidak melupakan sejarah maupun para pemimpin.



38

INFO PILKADA

Hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) telah menunjukkan perubahan signifikan dalam elektabilitas calon petahana Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Barnabas Orno, menjelang Pilkada Maluku 2024.



48

INFO NASIONAL

Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang penyalarsanencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.



62

INFO MUBA

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Provinsi Sumatera Selatan memastikan pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif pada Februari 2024 mendatang akan berjalan aman dan lancar.



87

INFO KHUSUS

Meski berlangsung serentak, kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) tampak lebih meriah dibandingkan dengan kampanye Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg). Di balik itu, potensi skandal keuangan yang melibatkan partai-partai politik dan fungsionarisnya mungkin mengarah ke disrupsi (gangguan) kemeriahan kampanye anggota legislatif menjelang Pemilu 2024.



3 DARI REDAKSI

20 OPINI

36 INFO PARTAI

64 INFO PALEMBANG

66 INFO BANYUASIN

68 INFO OGAN ILIR

70 INFO PALI

74 INFO JATENG

76 INFO ISTANA

80 INFO CALEG

86 KAJI

72

INFO JATIM

Hingga saat ini, Jawa Timur menjadi provinsi dengan desa devisa terbanyak se-Indonesia. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim, per 31 Desember 2023, tercatat sebanyak 149 desa devisa.

2024

Tahun baru tiba beriringan dengan masa kampanye Pemilu 2024. Pemilu serentak saat pemungutan suara untuk memilih presiden dan wakilnya, juga anggota legislatif di tingkat kabupaten-kota, provinsi, dan pusat --Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, kemudian pada akhirnya Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Kita dapat melihat dengan jelas, kampanye Pilpres terasa lebih dominan dibandingkan dengan kampanye pemilihan anggota legislatif. Pada Pilpres kali ini kita memiliki tiga pasangan yang akan dipilih. Sedangkan untuk pemilihan legislatif, kita perlu memilih begitu banyak calon untuk berbagai lembaga DPRD kabupaten-kota, provinsi, DPR, dan DPD.

Terlebih lagi, Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan mengemban kekuasaan dan kewenangan yang tentu lebih besar dibandingkan dengan para anggota legislatif secara perorangan. Namun, itulah konsekuensi demokrasi langsung yang telah kita sepakati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Setiap sistem pemerintahan lazim memiliki kekuatan dan kelemahan. Tak terkecuali sistem pemerintahan kita. Namun, yang terpenting adalah upaya pemerintahan yang tetap berpegang pada konstitusi dan tujuan pembentukan Indonesia sebagai negara-bangsa sebagaimana bunyi alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada titik inilah kita kerap menemukan dinamika dalam negeri yang bertimbal-balik dengan hal serupa di lingkup regional dan global. Apa yang terjadi di lingkup regional dan global, sedikit maupun banyak akan berdampak di dalam negeri. Begitu sebaliknya, kondisi dalam negeri akan berdampak di lingkungan regional dan global.

Di awal 2024 dan di masa kampanye Pemilu di dalam negeri, kita melihat pula timbal-balik situasi regional dan global itu. Apakah urusan pengungsi Rohingya, situasi pelayaran Laut Merah yang berdampak konflik di Jalur Gaza, hingga perang Rusia-Ukraina yang belum berhenti. Ringkas kata, 2024 adalah tahun tantangan lebih berat bagi Indonesia. Setidaknya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ PEMASARAN:

Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12750

- TELP 021-79196781
- FAX 021-79196786

Twitter : @InfoIndonesia

Facebook : infoindonesia.id

Instagram : @infoindonesia.idn

Email : redaksi@infoindonesia.id

MANAGEMENT CETAK DI BAWAH
PT Wahana Multimedia
MANAGEMENT REDAKSI DI BAWAH
PT Dua Satu Pro

PENDIRI: Usman Rizal

DIREKTUR/PEMIMPIN UMUM: Usman Rizal

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Adam Aulia Manzal Khan

PEMIMPIN REDAKSI: Gunawan Effendi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rahmad Romli

REDAKTUR PELAKSANA: Rusdiyono

REDAKTUR: Melati Tagore, Irma Yani, Nina Erlina, Ega Tri Gustina

REPORTER: Budi Prasetya, Nefri, Indra Hadi, Sadam M, Hardi Aar, Beni Martha Daya, Reno, Aldi Rinaldi, M Iqbal, Ida Iryani, Yadhni, Muhammad Fiqri

EDITOR & GRAFIS: Al Amin, Achilles

TATA LETAK: Sujatmiko

MEDIA SOSIAL: Haidir Ali

KEUANGAN: Dra Hj Nurkhamida

SEKRETARIS REDAKSI: Nur Aisah

PENGEMBANGAN BISNIS: RM Solehin, Zul Jamba

DISTRIBUSI: Abdul Muchtar

BANK ACCOUNT: A/N : PT. Wahana Multimedia, BCA No Rek: 553-041-4321, KCP Otista Jakarta Timur



DEBAT PANAS DI TAHUN BARU

Musim penghujan di awal 2024 memang dapat mendinginkan suhu udara. Pada saat bersamaan, suhu politik terasa memanas seiring rangkaian debat ketiga menjelang Pilpres 2024.

• INFO UTAMA

Dua debat Capres dan satu debat Cawapres menjelang Pilpres 2024 sudah berlalu. Satu hal, debat menjelang Pilpres selalu berupaya mempengaruhi opini calon pemilih yang menyaksikannya. Mempengaruhi agar masing-masing yang tampil berdebat mendapat suara dukungan pada pemungutan suara.

masing

Nah, dari debat ketiga pada Minggu malam, 7 Januari 2024, dengan penyelenggara resmi Komisi Pemilihan Umum, simpulan yang paling tampak adalah suhu persaingan yang meningkat. Adu argumentasi berlangsung terbuka dan menyentuh soal sensitif di bidang pertahanan dan keamanan. Bahkan yang terkait pribadi masing-

tama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang yang sebetulnya gak apa-apa asal kebijakan, asal policy, asal visi gak apa-apa," kata Jokowi di Serang, Banten, Senin, 8 Januari 2024.

Yang terjadi, sambung Jokowi serangan lebih mengarah kepada personal bukan substansi. "Tapi kalau su-



Tapi, bukan hanya debat yang menjadi faktor penentu suara dukungan. Banyak faktor lain yang ikut bermain. Meski begitu, debat para kandidat setidaknya dapat menumbuhkan kesadaran dan kepedulian bahwa rakyat pemilih mendapat informasi cukup sebelum menentukan pilihan masing-

masing Capres pun tak luput menjadi pembahasan.

Tak mengherankan Presiden Joko Widodo pun bersedia mengomentari debat yang menampilkan Capres nomor urut 01 Anies Baswedan, nomor urut 02 Prabowo Subianto, dan nomor urut 03 Ganjar Pranowo. "Yang per-

dah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lain saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. saya kira akan ban-

yak yang kecewa,” kata Jokowi.

Memang, dalam debat kali ini, sejak sesi pertama berformat penyampaian visi-misi, Anies Baswedan menyoroti kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto dengan mengaitkannya pada sisi personal. “Di saat separuh tentara kita tidak memiliki rumah dinas, sementara menteri, menurut Pak Jokowi, punya 340 ribu

Dalam pemaparan visi dan misinya Prabowo mengaitkan pula hubungan pertahanan dan keamanan dengan kesejahteraan bangsa. “Selama ratusan tahun, negara-negara dari jauh datang ke Nusantara untuk intervensi, mengganggu, adu domba dan mencuri. Kita berhadapan pada fakta bahwa kekayaan alam kita diambil dengan murah. Untuk jadi negara makmur, sejahtera, rakyat bisa hidup layak, kita harus menjaga kekayaan kita,” ujar Prabowo yang dalam Pilpres 2024 berpasangan dengan Cawapres Gibran

tuk menjadi negara makmur, sejahtera, rakyat hidup layak, punya pekerjaan layak, Indonesia harus menjaga kekayaannya. “Kita harus menjaga, dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita,” sambung Prabowo.

Sedangkan Anies mengawali debat dengan membacakan visi-misinya bersama Cawapres Muhaimin Iskandar. “Pertahanan saat ini bukan hanya kekuatan militeristik. Ini berkaca dari kasus Covid-19 yang melanda dunia sejak 2020-2022 di mana, 160 ribu orang meninggal dunia,” ujarnya.



hektar tanah di negeri ini,” kata Anies.

Maka, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berupaya menangkis serangan Anies. “Kami bertekad punya pertahanan kuat. Mungkin ada yang asal bicara tanpa data, didorong ambisi menggebu-gebu sehingga tidak obyektif,” kata Prabowo.

Rakabuming Raka.

Prabowo menyatakan, Indonesia merupakan negara yang besar dan kaya, hingga bahkan didatangi banyak negara jauh ke Nusantara. “Ratusan tahun negara-negara dari jauh datang ke Nusantara ini untuk intervensi, untuk mengganggu, untuk adu domba, dan untuk mencuri kekayaan kita, sampai kita merdeka, kita pun harus berhadapan dengan kekayaan alam kita diambil dengan murah,” ucap dia.

Karena itu, sambung Prabowo, un-

Dia juga mengatakan, ingin membawa posisi Indonesia di kancah global bukan hanya menjadi penonton, tapi pelaku utama. “Maka kami akan Insya Allah mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di dalam konstelasi global. Indonesia tidak hadir sebagai penonton, tapi Indonesia hadir sebagai penentu arah perdamaian, kemakmuran bagi seluruh bangsa di level global maupun di level regional,” kata Anies.

Selain itu, Anies menuturkan bah-



wa dalam isu pertahanan, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak kecil. "Dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari 160 ribu orang meninggal bukan karena serangan militer, tapi karena serangan virus," papar Anies.

Masih dalam acara debat, Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengemukakan sistem pertahanan rakyat semesta harus didorong dan dilapisi dengan pertahanan berlapis. "Jadikan benteng pertahanan Nusantara sebagai sebuah satu kesatuan. Kita perlu melakukan penataan gelar pasukan karena IKN menjadi pusat gravitasi baru dan ini bagian antisipasi terhadap tarung global antara Amerika Serikat dan Tiongkok," ungkapnya dalam penyampaian visi misi debat capres

di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2024.

Menurut dia, sistem pertahanan rakyat semesta harus didorong dan dilapisi dengan pertahanan berlapis. Pertahanan Indonesia, masih kata Ganjar, mesti masuk 5.0 dengan teknologi sakti, dengan rudal hipersonik, senjata cyber, sensor kuatum dan senjata otonom. "Hal itu bisa dilakukan kalau anggaran dari Kemenhan satu sampai dua persen dari PDB," kata Ganjar.

Kemudian, dia mengatakan, politik luar negeri merupakan alat negosiasi dunia luar. Menurut Ganjar, Indonesia perlu meredefinisikan politik luar negeri yang bebas aktif disesuaikan dengan kondisi kekinian.

"Kami membaca mencatat per-

soalan luar negeri, pertahanan, keamanan. Dari tiga ini kami menyatakan politik luar negeri kita, politik luar negeri adalah alat negosiasi dunia luar tapi kepentingan nasional harus nomor satu," kata Ganjar.

Nah, bagaimana dampak spontan debat kali ini? Salah satunya adalah melihat reaksi para netizen di media sosial yang mengemukakan tanggapannya terhadap acara ini. Salah satunya adalah analisis yang menggunakan tangkapan data perangkat lunak Drone Emprit terhadap kicauan warganet di media sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) ketika acara berlangsung dan beberapa jam pasca debat.

Yang menjadi alat ukur Drone Emprit adalah sentimen positif dan negatif para Netizen yang mengemukakan tanggapannya terhadap debat. Pengertian sentimen negatif dalam analisis Drone Emprit berbentuk kritikan, serangan, dan sindiran terhadap sosok capres di Twitter. Sebaliknya, sentimen positif bisa berupa persetujuan terhadap capres.

Alhasil, saat debat berlangsung, sentimen negatif tertinggi dicatatkan oleh Prabowo, menyusul kemudian Anies, lalu Ganjar. Sentimen positif Prabowo menjadi yang paling rendah, di bawah Anies dan Ganjar yang angkanya bersaing. Usai debat, sentimen



negatif terhadap ketiga capres naik. Namun, Prabowo tetap menduduki urutan tertinggi, disusul Anies, lalu Ganjar.

Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi mengemukakan, saat debat berlangsung, sentimen positif terhadap Anies Baswedan mencapai 76 persen, Prabowo Subianto 40 persen, dan Ganjar Pranowo: 72 persen. Sedangkan sentimen negatif Anies Baswedan tercatat 14 persen, Prabowo Subianto 54 persen, dan Ganjar Pranowo: 11 persen

Drone Emprit juga mengemukakan sentimen netral Netizen saat debat. Hasilnya, Anies 10 persen, Prabowo enam persen, dan Ganjar 17 persen.

Usai debat, sentimen positif tercatat Anies Baswedan 71 persen, Prabowo 31 persen, Ganjar 69 persen. Sentimen negatif usai debat menunjukkan Anies 23 persen, Prabowo 64 persen, dan Ganjar 17 persen. Sedangkan sentimen netral usai debat tercatat Anies enam persen, Prabowo lima persen, dan Ganjar 13 persen.

Ismail Fahmi menyatakan, Anies banyak mendapat sentimen positif karena dianggap berani menyerang dan memaparkan banyak data. Sementara, sentimen negatif diperoleh karena Anies dianggap terlalu sering menyerang personal dan kurang menyampaikan gagasan serta program.

Prabowo mendulang sentimen positif karena membalas serangan Anies soal standar etika pemimpin. Sedangkan sentimen negatif didapat Prabowo karena pernyataannya soal Gaza, dianggap mudah terpancing emosi, dan enggan membuka data dalam debat.

Apakah reaksi spontan para Netizen akan berpengaruh terhadap elektabilitas, tingkat kemungkinan terpilih para Capres? Bisa ya tapi bisa juga tidak. Namun, alat ukur yang dianggap lebih sah (valid) dan handal (reliable) adalah survei dengan jajak pendapat langsung kepada para pemilih. Hasilnya akan tampil di halaman-halaman berikutnya.

Toh ada pula yang mencoba jajak pendapat dengan menanyakan apakah hasil debat

ketiga menjelang Pilpres 2024 ini mengubah pilihan. Jajak pendapat Litbang Kompas menyimpulkan, usai debat itu ternyata sebagian besar responden tetap pada pilihan sebelum debat berlangsung.

Survei Litbang Kompas kali ini melibatkan hanya 210 responden. Namun, prosedur baku atau metodologi surveinya tetap ketat. Sebanyak 210 responden yang diwawancarai berasal dari seluruh Indonesia, terpilih secara acak proporsional (proportional random sampling) sesuai dengan jumlah penduduk di masing-masing provinsi. Dengan metode ini, survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error kurang lebih 6,76 persen dalam kondisi penarikan sampel secara sederhana.

Berdasarkan survei yang berlangsung Minggu, 7 Januari 2024, sebanyak 77,5 persen responden menyatakan tidak mengubah arah dukungannya setelah menyaksikan debat ketiga Pemilu Presiden 2024 di Istora Senayan, Jakarta itu. Sedangkan yang menyatakan mengubah pilihan politiknya 10 persen. Kemudian, sebanyak 12 persen responden menyatakan tidak tahu apakah bakal tetap pada pilihannya atau berubah haluan.

"Nah mungkin jika kita lihat angkanya saja, itu terlihat tidak terlalu besar sekitar 10 persen (perubahan arah dukungan). Karena memang tiga per empat dari publik itu bisa dibilang sudah cukup mapan pilihannya," ungkap Peneliti Litbang Kompas Rangga EkaSakti, Senin, 8 Januari 2024.

I a
m e n -
e g a s -

kan, responden yang bisa berubah pikiran setelah menonton debat memang terhitung kecil jika dipandang dalam konteks keseluruhan jumlah pemilih. Namun, untuk perbandingan, hasil survei elektabilitas capres-cawapres Litbang Kompas pada November-Desember 2023, masih 28,7 persen responden belum menentukan pilihan atau tergolong undecided voters.

"Ketika kita melihat dalam konteks tersebut, angka 10 persen ini menjadi signifikan nih. Kira-kira bagaimana debat-debat yang kemarin sudah dilaksanakan dan nanti akan dilaksanakan itu bisa memiliki pengaruh di bilik suara nanti," kata Rangga.

Alhasil, muncul pertanyaan baru, apakah yang 10 persen berubah arah dukungan itu berasal dari 28,7 persen undecided voters? Tentu perlu hasil survei-survei berikutnya. Setelah hari

H pemungutan suara, undecided voter ini dapat dibandingkan dengan persentase partisipasi pemilih dalam Pilpres berbanding dengan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT)..•



2 PUTARAN, GANJAR MERAPAT KE PRABOWO

Menyimak berbagai jajak pendapat beberapa lembaga survei (pollster), belum ada tanda-tanda pasangan nomor urut 2 Prabowo-Gibran tersisih di putaran pertama Pilpres 2024. Jadi, putaran pertama sebenarnya merupakan penyisihan antara pasangan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud dan pasangan nomor urut 1 Anies-Muhaimin.

Sejak awal masa kampanye pada akhir November 2023, kecenderungannya konsisten seperti itu. Bahkan usai debat ketiga Capres pada Minggu, 7 Januari 2023. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, misalnya, mengungkapkan hasil ekspresi data terhadap elektabilitas ketiga calon presiden pasca hasil debat ketiga Pilpres digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istora Senayan, Jakarta itu.

Ekspresi Data usai debat mengemukakan, elektabilitas calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto masih unggul dari pesaingnya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Denny JA menyatakan, elektabilitas

Prabowo tersebut sama dengan sebelum debat capres ketiga dari hasil survei dilakukan LSI Denny JA maupun Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada akhir Desember 2023.

Berdasarkan hasil survei LSI Denny pada Desember 2023 atau sebelum debat capres ketiga bertema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik itu, Denny mengatakan bahwa dukungan kepada prabowo sebesar 43,3 persen. Diikuti Anies Baswedan dengan Muhaimin di nomor kedua dengan elektabilitas 25,3 persen. Sementara elektabilitas Ganjar Pranowo 22,9 persen.

Pada sisi lain, masih kata Denny, berdasarkan survei CSIS elektabilitas Prabowo-Gibran mencapai 43,7 persen



diikuti Anies-Muhaimin 26,1 persen dan Ganjar-Mahfud 19,4 persen. "Kita lihat di sini Prabowo-Gibran unggul telak sekali jaraknya lebih dari 17 persen dibandingkan dua kompetitornya," kata Denny dalam keterangannya dikutip Senin, 8 Januari 2023.

Denny menuturkan, hasil survei hampir mirip karena dua lembaga ini melakukan survei di momen yang sama, dengan metodologi yang sah yang sama. "Itulah science ketika sama metodologinya dan sama momennya maka hasilnya akan mirip-mirip," ujar pendiri LSI ini.

Ia menambahkan, saat LSI Denny JA melakukan survei pada Desember 2023, terekam pula cakupan perdebatan capres sebelumnya. Menurut Denny, ternyata yang menonton debat sebanyak 47,5 persen dari populasi pemilih Indonesia, tapi tidak semua menonton penuh.

"Ada yang menonton satu menit saja, lima menit saja, di bawah 10 menit saja yang menonton penuh dari semua yang menonton hanya 31 persen jika ditotal yang menonton debat capres secara

penuh hanya 14 sampai 15 persen dari populasi," ujarnya.

Denny menjelaskan populasi 14-15 persen setelah menonton debat penuh terpengaruh sehingga mengubah



Kami merasa dari sisi elektoral kami merasa tren kami up, naik, ya. Itu yang kami lihat bukan dari sisi analisa yang ada, tapi lebih juga ke akar rumput

pilihan mereka hanya mencapai 22,2 persen. Maka yang mengubah pilihannya setelah menonton debat hanya dua sampai tiga persen saja sehingga setelah debat sehingga elektabilitas para calon relatif tetap.

"Kita bisa katakan ini situasi per hari ini di awal Januari bahwa Prabowo di ang-

presiden-wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul atas dua pasangan calon lainnya.

Toh, menurut survei CSIS, perubahan masih mungkin terjadi karena ada 10,9 persen responden yang belum menentukan pilihan dan tidak menjawab. Selain itu, ada 24,8 persen responden yang masih mungkin mengubah pilihannya, terutama karena menanti empat putaran debat capres/cawapres tuntas.

Survei CSIS berlangsung secara tatap muka terhadap 1.300 responden yang tersebar di 34 provinsi Indonesia. Pemilihan responden dilakukan secara acak, tetapi besaran setiap provinsi berbeda karena menyesuaikan dengan besaran jumlah pemilih tetap di provinsi tersebut.

Sedangkan penyelenggaraan surveinya berlangsung pada 13-18 Desember 2023 atau sehari setelah debat capres tahap pertama. Margin of error survei mencapai 2,7 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Arya menambahkan, jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024 yang semakin mendekat, masih membuka kemungkinan terjadi perubahan peta elektabilitas. Selain karena masih



ka 43 persen lebih dan ia hanya membutuhkan tujuh persen saja untuk menang satu putaran," ujar Denny.

Sebelumnya, survei Centre for Strategic and International Studies atau CSIS pada 13-18 Desember 2023 atau sehari setelah debat capres tahap pertama menyimpulkan, pasangan calon

ada 10,9 persen responden yang belum menentukan pilihan dan tidak menjawab saat ditanya kandidat pilihannya, juga karena 24,8 persen responden yang telah memilih pasangan capres-cawapres, menyatakan masih mungkin mengubah pilihannya.

Ketua Departemen Politik dan Peru-

• INFO UTAMA

bahan Sosial CSIS Arya Fernandes saat merilis hasil survei "Peta Pilpres Terkini Pasca-Debat Capres", di Jakarta, Rabu, 27 Desember 2023 mengemukakan, pasangan Prabowo-Gibran memperoleh elektabilitas tertinggi, mencapai 43,7 persen; pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, di

Arya.

Toh hingga sebulan menjelang pemungutan suara yang terjadwal pada Rabu, 14 Februari 2024, belum ada partai politik (parpol) yang berani mengklaim Capres akan berlangsung satu putaran. Selain itu, belum ada survei internal parpol yang membuka nama partainya.

persen atau 40 juta suara. Sedangkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di urutan buncit dengan 19,38 persen atau 31 juta suara.

Hasil survei ini tidak berbeda jauh dengan simpulan beberapa jajak pendapat lembaga sejenis lainnya: Prabowo-Gibran unggul dengan elektabilitas di



urutan kedua dengan elektabilitas 26,1 persen; dan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sebesar 19,4 persen.

Sementara 6,4 persen responden menyatakan rahasia atau belum menentukan pilihan. Selanjutnya, sekitar 4,5 persen menjawab tidak tahu atau memilih tidak menjawab. Jadi total ada 10,9 persen responden yang tak menjawab satu pun dari ketiga pasangan calon. "Jika kita lihat dari persentase tersebut, pemilu satu putaran atau dua putaran masih sama-sama ada peluang," kata

Salah satu survei internal partai pengusung Prabowo-Gibran yang tayang di situs berita CNNIndonesia sejak Rabu, 10 Januari 2024, misalnya, menyimpulkan pasangan nomor urut 2 ini diprediksi meraih 42,45 persen atau 66,3 juta suara di tingkat nasional. Prediksi ini berarti pula, Pilpres akan berlangsung dua putaran

Survei internal Parpol yang sama tanpa menyebut nama partai itu memprediksi, yang lolos ke putaran kedua adalah pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan perolehan 24,75

angka 40-an persen.

Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, pasangan Capres-Cawapres yang berhak melaju ke putaran kedua adalah dua pasangan dengan perolehan suara terbanyak. Dengan demikian, putaran kedua diprediksi menjadi pertarungan Prabowo-Gibran bersaing dengan Ganjar-Mahfud.

Lebih rinci lagi, survei internal itu memprediksi pasangan Prabowo-Gibran unggul di 61 dapil. Kemudian pasangan Ganjar-Mahfud hanya unggul di 14 dapil, sementara Anies Baswedan-

Muhaimin Iskandar di tujuh dapil.

Cakupan survei yang berlangsung pada Desember 2023 itu meliputi 83 dari total 84 daerah pemilihan (dapil) Pemilu 2024. Responden yang terlibat mencapai 800 orang di tiap dapil. "Prabowo menang di semua dapil di Jawa Timur. Papua Pegunungan tidak disurvei ka-



rena alasan keamanan," demikian salah satu simpulan hasil survei itu.

Terkait dengan prediski kemenangan pasangan Prabowo-Gibran di ujung timur Jawa, politisi yang juga Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengaku telah melabuhkan dukungannya kepada pasangan Prabowo-Gibran. Khofifah juga menegaskan kesiapan dirinya masuk

dalam struktur TKN (Tim Kampanye Nasional) Prabowo-Gibran. Ia juga siap menjadi jurkamnas untuk keliling memenangkan Prabowo-Gibran.

"Inshaallah saya sudah siap, sesuai janji saya Januari awal sepulang saya umrah. Saya menyampaikan posisi dukungan saya dan saya mendukung paslon 02," kata Khofifah di VVIP Juanda Surabaya di Sidoarjo, Rabu, 10 Januari 2024.

"Saya siap jadi jurkamnas dan siap masuk TKN. Apa yang jadi regulasi, akan saya ikuti sesuai aturan yang ada, seperti hari ini Mas Emil mendampingi Gibran, beliau cuti. Jadi saya siap ikuti regulasi yang ada karena saya masih menjabat sebagai kepala daerah," jelasnya.

Toh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi santai arah dukungan Khofifah kepada pasangan Prabowo-Gibran. Ganjar mengaku tak khawatir dukungan Khofifah kepada Prabowo bakal menggerus potensi suara yang bisa ia peroleh di Jawa Timur.

"Kami bukan capres yang gampang khawatir. Kita confident," kata Ganjar kepada wartawan di Tegal, Jawa Tengah, Kamis, 11 Januari.

Ia menambahkan dukungan Khofifah memang harus direspons sebagai bahan introspeksi dan membangun kekuatan. Namun, Ganjar tetap yakin bakal memenangi pertarungan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Jawa Timur.

Politikus PDI Perjuangan ini

pun mengklaim bahwa kader-kader partai politik pengusungnya di Jawa Timur solid dan terus bergerak untuk memenangkan dirinya.

"Apalagi kemarin dalam ultah partai Bu Mega sudah menyampaikan sikapnya terhadap situasi politik nasional dan apa yang mesti dikerjakan oleh kader sehingga hari ini semuanya lagi turun," ujar Ganjar.

Pada sisi lain, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengklaim elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden mereka mengalami tren kenaikan usai debat Pilpres 2024. Kenaikan elektabilitas ini disebut tampak di akar rumput.

"Kami merasa dari sisi elektoral kami merasa tren kami up, naik, ya. Itu yang kami lihat bukan dari sisi analisa yang ada, tapi lebih juga ke akar rumput," Kata Ketua TPN Arsjad Rasjid di gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Januari 2023.

Arsjad mengemukakan tren kenaikan elektabilitas Ganjar-Mahfud terlihat berdasarkan analisis yang dikomandoi oleh Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto. "Kelihatan sekali bagaimana dari sisi analisis kita, kita punya debate analisis yang dipegang oleh (Deputi) Politik 5.0 oleh Mas Andy," ujarnya.

"Juga melihat analisa apa namanya share of voice, kita melihat analisa dari sisi like and dislike. Jadi hasil data ini secara konsolidasi data kita melihat tren kami Alhamdulillah naik," sambungnya.

Nah, berdasarkan jajak pendapat beberapa Pollster dan survei internal Parpol pengusung pasangan Prabowo-Gibran menjelang Pilpres 2024, juga arah dukungan Khofifah di Jawa Timur, salah satu kemungkinannya adalah elektabilitas pasangan Ganjar-Mahfud semakin merapat dan mendekati ke Prabowo-Gibran. Kemudian bersaing lagi di putaran kedua. ●



Anies-Muhaimin

KALAH JIKA TANPA MUJIZAT TUHAN

Dari sisi rekam jejak perolehan suara partai pendukung dan dinamika elektabilitas menjelang Pilpres 2024, target pasangan Anies-Muhaimin adalah memastikan lolos ke putaran kedua. Hingga dua bulan masa kampanye, Anies-Muhaimin berupaya keras mendongkrak angka elektabilitasnya.

Jadi, target paling masuk akal pasangan Anies-Muhaimin di masa kampanye menjelang hari H pemungutan suara Pilpres 2024 adalah menghindari kekalahan di putaran pertama. Hingga satu bulan menjelang hari H pemungutan suara Pilpres 2024, Rabu, 14 Februari 2024, sejumlah perkembangan memang selaras dengan upaya itu.

Malah Ahmad Sahroni, Bendahara Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) --Parpol pertama yang mendeklarasikan Anies sebagai Capres-- mengemukakan partai koalisinya tidak memiliki target tertentu untuk menang dalam Pilpres 2024.

"Yang enggak punya target cuma Amin saja, pada posisi setengah saja lah, duduk, tinggal menunggu mujizat menang di satu putaran, atau menang di dua putaran," ungkap Sahroni yang juga Wakil Ketua Kimisi III DPR dalam acara Satu

Meja Kompas TV, Kamis, 11 Januari 2024.

Sedangkan Abdul Muhaimin Iskandar, Cawapres pasangan Anies Baswedan, yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, konsisten meyakinkan lumbung suara konstituennya di Provinsi Jawa Timur tetap akan memilih pasangan nomor urut 01 dalam Pilpres 2024. Begitu pula ketika Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan dukungannya kepada pasangan nomor urut 1 Prabowo-Gibran.

Menanggapi pernyataan dukungan Khofifah, Muhaimin (Cak Imin) menegaskan, setiap orang Nahdlatul Ulama (NU) akan konsisten dukung Anies Baswedan - Muhaimin-



in Iskandar (AMIN). "Setiap Pilpres masing-masing punya hak demokrasinya, saya yakin rakyat yang berideologi NU insyaAllah pasti AMIN," kata Cak Imin, Kamis, 11 Januari 2023.

Ia mengemukakan, warga NU tak akan berpindah pilihan meski ada Khofifah di kubu Prabowo-Gibran. "Orang yang punya ideologi NU pasti istiqomah pada AMIN. Saya meragukan ke-NU-annya kalau tidak milih AMIN," ujar Cak Imin.

Cak Imin juga mengemukakan, sudah tahu lama Khofifah mendukung Prabowo-Gibran. "Kita sudah tahu sudah lama, bahkan Pemilu 2019 di Jatim beda Khofifah sama PKB. Jadi bukan hal baru, PKB kan dukung yang lain dalam pilgub, tapi Khofifah juga tidak mendukung PKB di 2019. Artinya nggak mengaruhi apa-apa," sambungnya.

Selanjutnya ia menegaskan tak khawatir dukungan Khofifah kepada Prabowo-Gibran akan berpengaruh terhadap Anies-Cak Imin di Jatim. Dalam Pilpres 2024, Cak Imin yakin pasangan AMIN tak tergoyahkan di Jatim.

Sedangkan Capres pasangan Cak Imin, Anies Rasyid Baswedan mengemukakan tetap optimistik suara dukungan untuk AMIN (Anies-Muhaimin) di Jatim semakin meluas. Alasannya, masyarakat di Jawa Timur yang terus menggaungkan keinginan adanya perubahan.

"Kalau di Jatim kami makin optimis. Insya Allah dukungannya makin luas untuk perubahan," ungkap Anies di Bandara APT Pranoto Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu, 10 Januari 2024

Menurut dia, yang diharapkan oleh masyarakat Jatim adalah keinginan perubahan. "Jadi seperti saya sampaikan berkali-kali, ini bukan sekadar orangnya tapi tentang apa yang akan dilakukan lima tahun ke depan.

Dan keinginan perubahan itu makin hari makin kuat. Tentu kita menghormati pilihan, tapi di sisi lain kita melihat kenyataan bahwa Aspirasi perubahan itu makin kuat," lanjutnya.

Tim Pemenangan Nasional (Timnas) AMIN pun menegaskan tak gentar dengan dukungan Khofifah kepada Prabowo tersebut. Juru Bicara Timnas AMIN Muhammad Iqbal mengatakan, pihaknya percaya diri bakal menguasai



• INFO UTAMA

perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Timur atau yang sering dikenal dengan basis NU. "Semoga pasangan amin diberikan kemenangan di Jawa Timur," ujar Iqbal.

Sebelumnya, politisi yang juga Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengaku telah melabuhkan dukungannya kepada pasangan Prabowo-Gibran. Khofifah juga menegaskan kesiapan dirinya masuk dalam struktur TKN (Tim Kampanye Nasional) Prabowo-Gibran. Ia juga siap menjadi jurkamnas untuk keliling memenangkan Prabowo-Gibran.

"Insyallah saya sudah siap, sesuai

saya ikuti sesuai aturan yang ada, seperti hari ini Mas Emil mendampingi Gibran, beliau cuti. Jadi saya siap ikuti regulasi yang ada karena saya masih menjabat sebagai kepala daerah," ungkap Khofifah yang memiliki latar belakang kental dengan NU dengan menjadi salah satu Ketua Pengurus Besar NU dan juga Muslimat NU.

NU dan Jawa Timur memang signifikan dalam perhitungan elektabilitas suara pasangan AMIN. Salah satu indikasinya adalah 19 kursi parlemen PKB berasal dari Jatim pada Pemilu 2019, terbesar kedua setelah PDIP yang mer-



janji saya Januari awal sepulang saya umrah. Saya menyampaikan posisi dukungan saya dan saya mendukung paslon 02," kata Khofifah di VVIP Juanda Surabaya di Sidoarjo, Rabu, 10 Januari 2024.

"Saya siap jadi jurkamnas dan siap masuk TKN. Apa yang jadi regulasi, akan

aih 20 kursi.

Yang tak kalah penting, daftar pemilih tetap (DPT) di Jawa Timur yang ditetapkan KPU untuk Pilpres 2024 mencapai 31,4 juta orang. Berada di urutan kedua terbanyak setelah Jawa Barat.

Terkait dengan itu, Lembaga Survei Indonesia LSI Denny JA menggelar sur-

vei khusus di Jatim. Alhasil, sebanyak 78,1 persen pemilih di provinsi ini mengaku dirinya adalah Nahdlatul Ulama.

"Di kalangan pemilih Muslim yang merasa bagian dari NU itu jumlahnya 78,1 persen. Polanya sama, memilih Prabowo 47 persen, lalu Ganjar, baru Anies-Muhaimin 17,5 persen," ujar unggap Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan di saluran Youtube lembaganya yang mulai tayang pada Jumat, 5 Januari 2024 .

Survei LSI di Jatim berlangsung pada 16-28 Desember 2023 terhadap 8.800 responden di provinsi ini. Responden itu terdiri dari 800 orang di setiap dapil DPR RI.

Sampel berasal dari seluruh Kabupaten/ Kota di Dapil Jawa Timur yang terdistribusi secara proporsional. Menggunakan metode multistage random sampling, survei ini memiliki margin of error lebih kurang 1,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Berdasarkan rilis hasil survei elektabilitas itu, para pemilih Nahdlatul Ulama banyak menjatuhkan pilihan ke paslon Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Dari total 78,1 persen pemilih NU, 47,1 persen di antaranya menjatuhkan pilihan ke paslon 02. Selanjutnya 26,2 persen memilih Ganjar Pranowo - Mahfud MD serta 17,5 persen memilih Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengemukakan, paslon 02 Prabowo-Gibran menguasai tiga wilayah demografi di Jatim. Sementara paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) unggul di wilayah Madura.

"Prabowo-Gibran unggul di Tapal Kuda, Mataraman, Arek. Sementara AMIN unggul di wilayah Madura," kata Djayadi, Jumat, 5 Januari 2024.

Menurut survei LSI, di wilayah Tapal Kuda, elektabilitas Prabowo-Gibran di angka 53,8 persen. Kemudian Ganjar Mahfud Md di angka 18,4 persen. AMIN di peringkat ke-3 di angka 16,1 persen. Responden yang belum menjawab di angka 11,6 persen. Wilayah Tapal Kuda meliputi Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Jember.

Di wilayah Mataraman, elektabilitas Prabowo-Gibran di angka 49,6 persen. Kemudian Ganjar-Mahfud Md di an-

angka 31,8 persen, dan AMIN di angka 10,4 persen. Sementara ada 8,2 persen responden yang belum menjawab. Wilayah Mataraman meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Nganjuk, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Pacitan, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Bojonegoro, Lamongan, Tuban.

Di wilayah Arek, Prabowo-Gibran unggul di angka 43,6 persen. Sementara Ganjar-Mahfud Md di angka 29,5 persen, dan AMIN di angka 14,7 persen. Ada 12,2 persen responden yang belum menjawab. Wilayah Arek meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Jombang, Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan.

Sementara di wilayah Madura, pasangan AMIN unggul di angka 42,3 persen. Sementara Prabowo-Gibran di angka 33,3 persen, dan Ganjar-Mahfud Md 14,9 persen. Sebanyak 9,6 persen responden belum menjawab. Wilayah Madura meliputi Bangkalan, Sampang, Sumenep, dan Pamekasan.

Toh secara keseluruhan, menurut sejumlah survei dinamika elektabilitas menjelang Pilpres 2024, pasangan nomor urut 1 Anies-Cak Imin tetap konsisten harus berjuang lolos ke putaran kedua. Target yang paling penting adalah menghindari kekalahan di putaran pertama. Ini pun selaras dengan sejumlah hasil survei.

Sebagian hasil survei memang menunjukkan elektabilitas Anies-Cak Imin mulai melampaui angka keterpilihan pasangan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud. Misalnya, hasil survei elektabilitas capres-cawapres oleh lembaga Indonesia Political Opinion (IPO).

Survei IPO berlangsung antara 1-7 Januari 2024. Jumlah responden mencapai 1.200 orang dengan kriteria telah memiliki hak pilih atau berusia di atas 17 tahun.

Metode survei menggunakan multi-stage random sampling dan pembagian kuesioner secara langsung. Margin of error sekitar 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan elektabilitas Prabowo dan Gibran

mencapai 42,3 persen. Dedi menyebut capaian elektabilitas tertinggi itu dipengaruhi oleh meningkatnya elektabilitas Gibran secara pribadi yang menyumbang 0,8 persen.

Rincian dari capaian itu, sambung Dedi, hanya 22,3 persen yang mengaku sangat yakin terhadap paslon nomor urut 2. Sementara yang mengaku yakin 54,8 persen, tidak yakin 15,2 persen, sangat tidak yakin 3,8 persen dan 3,9 persen mengaku tidak tahu.

Dedi menyebut posisi kedua ditempati paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Jarak elektabilitas

dipengaruhi juga oleh elektabilitas Mahfud. "Mahfud MD justru sebaliknya, ia menurunkan elektabilitas Ganjar cukup tajam yakni sebesar 3,4 persen," kata Dedi.

Dari perolehan 21,5 persen itu, responden yang mengaku sangat yakin 26,1 persen. Kemudian 48,3 persen responden mengaku yakin, 16 persen tidak yakin, 3,5 persen sangat tidak yakin dan 5,8 persen mengaku tidak tahu.

Sedangkan survei Ipsos Public Affairs menyimpulkan tren elektabilitas Prabowo-Gibran mengalami kenaikan, Anies-Cak Imin cenderung stagnan, dan Ganjar-Mahfud menurun.



AMIN dan Prabowo-Gibran terpaut 7,9 persen. "Capaian elektabilitas AMIN selisih 7,9 persen dari paslon 2 yakni 34,5 persen," kata Dedi, Rabu, 10 Januari 2024.

Sebanyak 34,2 persen responden di antaranya mengaku sangat yakin kepada AMIN. Kemudian 47,3 persen mengaku yakin, 15 persen tidak yakin, 2,1 persen sangat tidak yakin dan 1,4 persen mengaku tidak tahu.

"Kehadiran nama Cawapres turut mempengaruhi elektabilitas kandidat capres. Muhaimin Iskandar meningkatkan elektabilitas Anies Baswedan sebanyak 2,4 persen," ujarnya.

Sedangkan posisi terakhir ditempati paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan perolehan 21,5 persen. Dedi menyebut posisi bontot ini

"Dibandingkan data survei akhir bulan November, Prabowo-Gibran kembali mengalami kenaikan dari 42,66 persen ke 48,05 persen, sementara Anies-Muhaimin cenderung stagnan dari 22,13 ke 21,80 persen, dan Ganjar-Mahfud dari 22,95 turun 18,35 persen, sementara yang belum menentukan pilihan menurun tipis dari 12,26 turun ke 11,80 persen," kata Peneliti senior Ipsos Public Affairs Arif Nurul Imam, Rabu, 10 Januari 2024.

Nah, berdasarkan hasil berbagai lembaga survei, dinamika elektabilitas di masa kampanye, target terpenting pasangan Anies-Muhaimin adalah menghindari kekalahan di putaran pertama. Hasilnya memang baru diketahui setelah hari H pemungutan suara Pilpres 2024. ●

DEBAT CAPRES-CAWAPRES DAN PERILAKU PEMILIH

Oleh: Prof Bambang Juanda

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB

Sejak sebelum kampanye, elektabilitas pasangan capres dan cawapres Prabowo-Gibran sudah unggul dengan tren positif dibandingkan pasangan Ganjar-Mahfud dan Anies Muhaimin berdasarkan beberapa hasil lembaga survei yang relatif kredibel menurut penulis.

Tadinya, banyak orang memprediksi elektabilitas Prabowo-Gibran akan menurun setelah debat cawapres pada 22 Desember 2023, namun ternyata justru meningkat.

Menurut hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) pada 23-24 Desember 2023, elektabilitas Prabowo-Gibran meningkat menjadi 46,7 persen. Sedangkan elektabilitas kedua paslon lainnya tidak berbeda signifikan antara 21-24,5 persen.

Dari debat ini, umur bukanlah faktor penting dalam menentukan kelayakan seseorang menjadi capres-cawapres. Kelihatannya usia muda tidak masalah asalkan berpengalaman. Menariknya di Indonesia, debat antar cawapres selama dua jam ini dilanjutkan dengan debat (atas debat cawapres) antar pakar, antar jurkam tiga paslon yang jauh lebih lama, bisa lebih dari seminggu.

Perlu dicatat bahwa panggung debat hanya salah satu indikator kelayakan capres-cawapres untuk dipilih masyarakat. Manusia itu sangat kompleks, tidak bisa kita nilai dari debat saja.

Jadi, debat ini belum mencerminkan keseluruhan kapasitas seseorang. Manusia itu kompleks, tidak bisa dinilai dari satu debat saja. Ini penting untuk edukasi masyarakat supaya tidak keliru dalam menyikapi, yaitu bahwa menilai paslon itu harus holistik, misalnya dari rekam jeaknya, gagasannya dan seterusnya.

Tujuan debat adalah ingin menguji gagasan. Seberapa jauh paslon itu menguasai gagasan-gagasan yang ditulis dalam visi-misi-programnya. Dalam debat, kita bisa menilai kapasitas dari paslon. Karena debat juga memerlukan kemampuan tertentu, maka paslon harus mempersiapkannya secara matang. Kalau paslon itu tidak punya kapasitas, mau dilatih sekuat apapun, tidak mungkin dia tampil prima.

Jadi, terlalu awal untuk menyimpulkan dari hasil debat. Paslon yang bisa kerja belum tentu ahli debat, dan yang ahli debat penuh retorika serta janji belum tentu bisa kerja juga. Semuanya ini bisa kita lihat dari jejak digital ketika ketiga paslon tersebut diberi amanah memimpin suatu institusi misalnya sebagai menteri atau kepala daerah.

Perkembangan hasil debat cawapres ini memperkuat prediksi penulis dalam tulisan sebelumnya bahwa kemungkinan yang paling besar masuk putaran kedua adalah Prabowo-Gibran. Jika tren ini terus berlanjut, pilpres pada 14 Februari nanti kemungkinan dapat satu putaran kalau dimanfaatkan Prabowo-Gibran dengan baik dan jika kedua paslon lainnya

tidak mengubah strategi.

Dalam tulisan ini, penulis mencoba membahas perilaku paslon dalam debat pilpres dan pengaruhnya terhadap elektabilitasnya. Dalam debat capres 12 Desember 2023, para pakar menilai Anies yang "menang" debat dengan gayanya sehingga tren elektabilitasnya naik. Namun dalam debat cawapres 22 Desember, Gibran yang tadinya diremehkan, justru dianggap pemenang debat dengan gayanya. Gibran juga "dianggap" lebih luas dan terukur wawasannya, terutama terkait beberapa kebijakan fiskal untuk pembangunan ekonomi menuju Indonesia emas.

Kemungkinan sebelum debat, training untuk Gibran cukup intensif. Perilaku manusia, termasuk cawapres, biasanya jika merasa hebat atau senior, cenderung kurang mempersiapkan dengan baik sehingga sering "diserang" dengan pertanyaan yang tidak terduga sebelumnya. Contohnya Muhaimin Iskandar sebagai Ketua PKB yang ditanya bagaimana menaikkan peringkat Indonesia di SGIE (State of the Global Islamic Economy) yang tidak semua tahu tentang akronim tersebut. Ke depan, KPU melalui moderatornya perlu memastikan apakah paslon paham dengan akronim yang ditanyakan dalam debat karena ada beberapa akronim yang sama tapi kepanjangannya beda.

Dalam debat, Mahfud menyampaikan visi-misi-programnya terutama tentang pentingnya pemberantasan korupsi supaya potensi pertumbuhan ekonomi 7 persen terwujud. Sedangkan Muhaimin mengenalkan "slepetnomics" untuk mewujudkan perubahan dalam menegakkan keadilan dan pemerataan ekonomi.

Pertanyaan Mahfud kepada Gibran tentang salah satu program paslon 02, yaitu bagaimana menaikkan tax ratio sampai 23 persen karena target rasio pajak 2024 saja hanya ditetapkan sebesar 10,1 persen dari PDB. Gibran dengan gaya khasnya, menjelaskan bedanya menaikkan rasio pajak dengan menaikkan pajak yang dapat menimbulkan high cost economy (perekonomian biaya tinggi).

Tax ratio berfungsi untuk mengukur seberapa besar dampak output perekonomian terhadap kinerja penerimaan pajak suatu negara guna membiayai pembangunan dengan sumber daya sendiri. Semakin tinggi tax ratio, maka ketergantungan terhadap pembiayaan melalui utang akan semakin berkurang.

Sebenarnya program paslon Prabowo-Gibran yang dibahas ini adalah meningkatkan rasio total penerimaan (pajak dan bukan pajak) terhadap PDB ke 23 persen pada tahun 2029 yang saat ini di kisaran 15 persen-16 persen. Meskipun agak tinggi targetnya, tapi ini masih lebih logis daripada istilah tax ratio (persentase penerimaan pajak terhadap PDB) yang diper-

debatkan antara Gibran dan Mahfud.

Perilaku masyarakat setelah debat

Menurut survei IPI, pemilih yang menonton debat capres 12 Desember 2023 hanya 42,3 persen. Sama dengan penilaian para pakar, urutan capres yang tampil paling baik dalam debat adalah Anies (35,5 persen), kemudian disusul oleh Prabowo (28,9 persen) dan Ganjar (26,9 persen) yang secara statistik tidak signifikan dengan margin of error 2,9 persen.

Akan tetapi kalau pemilih Prabowo ditanya siapa yg menang dalam debat capres tersebut, 62,8 persen pemilihnya mengatakan Prabowo yang menang dalam debat capres tersebut. Begitu juga, 76,6 persen pemilih Ganjar berpendapat bahwa yang menang debat capres adalah Ganjar. Bagi pemilih Anies sudah tentu pasti paling banyak (95 persen) berpendapat yang menang debat capres adalah Anies.

Fenomena ini dalam kajian ekonomi keperilaku (behavioral economics) disebut confirmation bias. Umumnya perilaku manusia sering terjebak pada pilihan favorit yang sudah dimiliki, sehingga mengabaikan alternatif pilihan lainnya. Manusia umumnya hanya mau membaca informasi yang mengonfirmasikan kebenaran pilihannya.

Artinya, bagi partisan suatu paslon tertentu cenderung akan mengatakan paslonnya yang paling baik. Jika pemilih sudah mempunyai pilihan

favorit, maka dia hanya akan mau membaca informasi yang membenarkan pilihannya. Pemilih itu juga enggan membaca atau mendadak emosi saat membaca informasi yang tidak sesuai ekspektasinya terhadap pilihan capresnya.

Jika semua kubu terjebak confirmation bias, maka pilihan yang lebih rasional dan objektif menjadi sulit dilakukan saat semua orang terjebak kesalahan berpikir seperti ini. Dan ini banyak terjadi dalam diskusi di media sosial, meskipun sudah dijelaskan dengan gamblang (dengan bukti jejak digital) bahwa unggahannya yang menggambarkan keunggulan pilhannya dibandingkan paslon lain, hanya sebuah framing.

Perilaku confirmation bias ini juga terjadi dalam menilai siapa pemenang debat cawapres pada 22 Desember 2023 yang ditonton oleh 35,9 persen pemilih, menurut survei IPI. Sama dengan penilaian para pakar, urutan cawapres yang tampil paling baik dalam debat adalah Gibran (56,2 persen),

kemudian disusul oleh Mahfud (24,2 persen) dan Muhaimin (12,3 persen) yang cukup signifikan perbedaannya.

Akan tetapi, kalau pemilih pasangan Anies-Muhaimin ditanya siapa yang menang dalam debat cawapres tersebut, 74,1 persen pemilihnya mengatakan Muhaimin yang menang dalam debat cawapres tersebut. Begitu juga, 53,6 persen pemilih pasangan Ganjar-Mahfud berpendapat bahwa yang menang debat cawapres adalah Mahfud. Bagi pemilih pasangan Prabowo-Gibran, sudah tentu pasti paling banyak (76,6 persen) berpendapat yang menang debat cawapres adalah Gibran.

Fenomena confirmation bias inilah yang menegaskan kembali atau memperkuat apa yang pernah penulis sampaikan dalam tulisan sebelumnya bahwa acara debat capres-



cawapres tidak terlalu banyak mengubah peta elektoral paslon. Artinya, jika dibandingkan antara sebelum dan sesudah debat digelar, distribusi dukungan terhadap paslon tidak banyak mengalami perubahan signifikan.

Dalam memilih pasangan capres-cawapres, banyak faktor yang mempengaruhinya, di antaranya adalah strategi kampanye, kedekatan dan kepuasan dengan Presiden sekarang, serta beberapa kejadian di Indonesia yang menjadi berita utama di media massa.

Akan tetapi, debat ini penting supaya pemilih tahu lebih dalam (detail) tentang program, gagasan dan gaya komunikasi dari para paslon. Selain itu, debat ini dapat mempengaruhi 5-10 persen pemilih yang belum menjawab dalam survei atau masih ragu akan pilihannya. Dan ini akan menentukan siapa yang akan menemani pasangan Prabowo-Gibran pada putaran kedua, apakah Ganjar atau Anies. Semuanya ini masih rahasia Tuhan di kitab lauhil mahfudz. ●



KINERJA PJ GUBERNUR SUMSEL RAIH APRESIASI KEMENDAGRI

Kinerja Penjabat Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Agus Fatoni dalam mengawal pembangunan di Sumsel dinilai cukup berhasil serta pantas mendapatkan apresiasi yang tinggi. Apresiasi ini diberikan setelah paparan Agus Fatoni atas capaian kinerja 106 indikator dan 10 program prioritas dari Provinsi Sumatera Selatan pada periode Triwulan I sejak 2 Oktober 2023 hingga 2 Januari 2024.

Apresiasi disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) melalui Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsu Tohir yang diwakilkan kepada Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga.

"Kami mengapresiasi kepada kinerja Pak Gub di beberapa indikator secara nasional yang dibutuhkan sangat baik, yaitu stunting, kemiskinan ekstrem, penanganan inflasi dan lainnya," ucap Kastorius.

Sebagai informasi, terdapat 10 indikator prioritas Pemprov Sumsel, di antaranya kesehatan, stunting, layanan publik, kemiskinan ekstrem, inflasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penyerapan anggaran, perizinan, kegiatan unggulan dan pengangguran.

Senada dengan Kastorius, Inspektur III Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Elfin Ilyas mengapresiasi kinerja dari Penjabat (Pj) Gubernur Su-

matera Selatan, Agus Fatoni. Terutama terkait penanganan inflasi di Provinsi Sumsel yang cukup rendah.

"Pak Pj Gubernur Sumsel kami apresiasi inflasinya cukup rendah, cukup baik 3,17 persen. Ini pasti disupport juga oleh kota yang terpilih untuk mengukurnya ini kan ada dua Palembang dan Lubuk Linggau itu lah yang masuk dalam pencacahan untuk mengetahui perilaku perubahan harga," kata Elfin.

Selain itu, apresiasi juga datang dari Inspektur IV Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Arsan Latif. Dia mengaku sangat bangga atas capaian serta prestasi dari (Pj) Gubernur Sumatera Selatan.

"Kami bangga pak, kami apresiasi terhadap banyaknya prestasi dan kinerja Pak Gubernur yang kami baca dari laporan ini data dan informasinya lengkap, langkah-langkahnya juga konkret," ujar Arsan.

Apresiasi lainnya juga diucapkan

oleh Inspektur II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Ucok Abdul Rauf Damenta. Dia mengapresiasi kinerja tim Penjabat Gubernur Sumatera Selatan yang telah menyelesaikan hasil evaluasi RJPBD Tahun 2005-2025 dengan tepat waktu.

Dalam kesempatan yang sama, Tim Evaluator Inspektorat Jenderal Kemendagri Dimiyati sangat mengapresiasi kinerja dari Penjabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni. Menurutnya, laporan kinerja yang disampaikan pada triwulan I sangatlah membanggakan.

“Pak Pj Gub Sumsel kami apresiasi terhadap laporan yang disampaikan triwulan I saja sudah segini pak apalagi triwulan II,” ucap Dimiyati.

Selain itu dari aspek lain seperti bidang persampahan menurut Tim Evaluator Inspektur Jenderal Kemendagri Aswan menilai apa yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah baik. Aswan secara pribadi juga mengapresiasi kinerja dari Penjabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni.

“Jadi Pak Gubernur ini merupakan Bapak Inovasi, Pak kami banyak belajar dari dia. Saya fokus di persampahan, jadi untuk skala provinsi itu sudah cukup. Saya terima kasih, saya apresiasi pak gubernur sudah banyak regulasi mengenai pengurangan persampahan, kebijakan persampahan, regulasi dan lain sebagainya. Sekali lagi saya apresiasi pak gubernur ini luar biasa untuk triwulan I ini,” kata Aswan.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Tim Evaluator Inspektur Jenderal Kemendagri Heri yang menyoroti pelayanan publik yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Menurutnya, pelayanan publik di wilayah ini hampir sudah dilengkapi semuanya.

Kemudian apresiasi juga datang dari Tim Evaluator Inspektur Jenderal Kemendagri Wira. Menurutnya, dari segi kepatuhan melaksanakan kebijakan dinilai hampir 100 apabila kebijakan mandatory spending mendapat angka sempurna. Dari beberapa prestasi ini bisa dikatakan sudah sangat memuaskan.

“Saya dari aspek kepatuhan melaksanakan kebijakan pemerintah, ini se-

betulnya nilainya hampir 100,” ujar Wira.

Dalam kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur Agus Fatoni menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan masukan yang diberikan oleh Tim Evaluator Inspektur Jenderal Kemendagri.

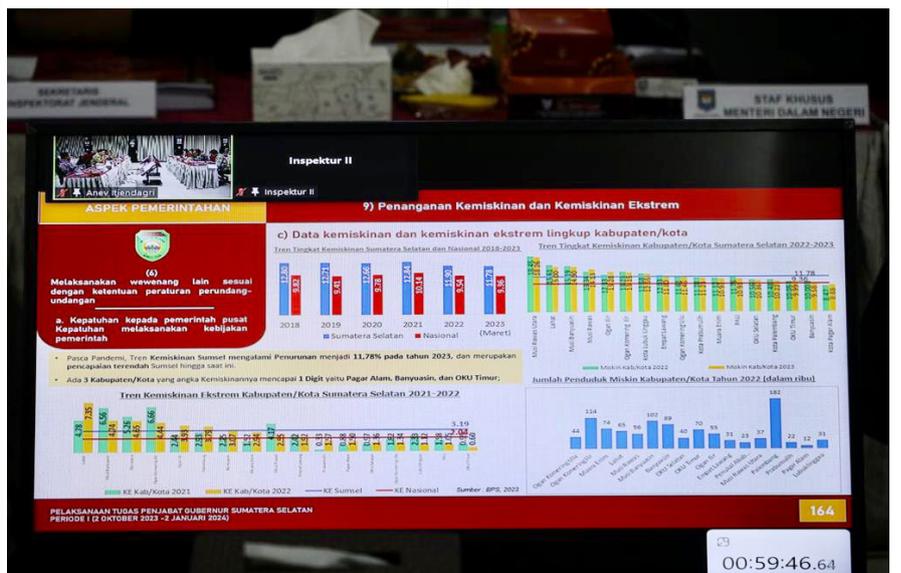
Fatoni berkomitmen akan tindaklanjuti segala masukan yang diberikan oleh Tim Evaluator Inspektur Jenderal Kemendagri.

“Kami sudah mencatat semua masukan dan perlu ditindaklanjuti. Ini sengage kami membawa hadir kepala OPD,

nannya. Saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki program orang tua asuh bagi anak yang menderita stunting atau termasuk dalam kategori kurang mampu.

Sementara itu, terkait penanganan inflasi saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki program pasar murah yang dilakukan di seluruh kabupaten/kota se-Sumsel. Kegiatan ini akan berlangsung pada hari Selasa, Kamis dan Jumat setiap minggunya.

“Jadi ini respon dari kami pak tidak



Bupati dan Walikota agar langsung mendengar ini gunanya biar tidak ada miss dalam informasi biar segera ditindaklanjuti baik itu laporan maupun untuk kinerja. Ini akan kami tindak lanjuti segera,” ucap Fatoni.

Kemudian, terkait penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan lebih intens lagi dalam penanga-

ada yang terlewat, kami berterima kasih banyak. Pertemuan semacam ini penting sebenarnya, walaupun untuk setiap bulan kami siap. Bukan apa untuk mengingatkan pak, itu penting, kami secara rutin juga melakukan anev pak. Meskipun tidak secara formal kami mohon bapak bisa beri arahan bimbingan kepada kami,” tutup Fatoni. ●

MASIFKAN GERAKAN TANAM HINGGA PERBANYAK PASAR MURAH

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menegaskan pihaknya akan terus berupaya dalam pengendalian inflasi daerah agar perekonomian berjalan stabil serta tidak menimbulkan gejolak. Untuk mencapai hal tersebut berbagai upaya terus dilakukan oleh seluruh stakeholder di Pemprov Sumsel.



“Ini betul-betul serius dan ditangani, ini tanggung jawab bersama. Kita semua dievaluasi dan inflasi ini bukan terkait dengan kita saja, tapi sangat terkait dengan masyarakat. Maka kita perlu penanganan yang sangat serius,” kata Fatoni saat memimpin Rapat Penanganan Pengendalian Inflasi Provinsi Sumsel Tahun 2024.

Upaya-upaya tersebut di antara lain memasifkan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), yaitu mengajak masyarakat untuk aktif dalam menanam sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai dan bawang merah di pekarangan rumah masing-masing. Selain itu, kegiatan Operasi Pasar Murah, Pangan

Murah dan Toko Kebutuhan Pokok (KePo) juga terus dimasifkan.

“Saya kira, kita sepakat gerakan ini dilakukan secara masif, terencana dan terukur sehingga inflasi di Sumsel tetap terkendali. Kita bersama-sama mencari solusi dan langkah konkret, semoga upaya yang kita niatkan ini diridhoi Allah SWT,” ucap Fatoni.

Fatoni mengatakan dengan adanya Operasi Pasar Murah dapat membantu menstabilkan harga bahan pokok, seperti beras, cabai merah, bawang merah, daging dan lain-lain. Sebagai informasi, kegiatan Operasi Pasar Murah ini serentak diadakan pada hari Senin, Selasa dan Kamis setiap minggu di seluruh kabupaten/kota se-Sumsel.

Pj Agus Fatoni mengatakan selanjutnya survey akan dilakukan di dua kota se-Sumsel, yaitu Kota Palembang dan Lubuk Linggau serta dua kabupaten se-Sumsel, yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Muara Enim.

“Jadi empat yang disurvei dan andilnya dari daerah lain. Oleh karena itu perlu melakukan upaya yang terkoordinasi dan terus menerus kemudian saling melengkapi. Kita semua sudah melakukan, koordinasinya sudah sangat baik, mumpung ini masih tahun baru, kesempatan kita untuk memperbaiki apa yang sudah kita lakukan,” ujar Fatoni.

Menurutnya, upaya lain yang dilakukan dalam pengendalian inflasi masih

sangat banyak. Untuk itu ia meminta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat rencana kegiatan kerja. Selanjutnya program tersebut disinkronkan dengan program Stakeholder lainnya mulai dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan vertikal lainnya agar dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel S.A Supriono menyebut, pengendalian inflasi memerlukan dukungan semua pihak. Ini dikarenakan inflasi dari 17 Kabupaten/ Kota secara kumulatif akan mencerminkan inflasi provinsi secara keseluruhan.

“Penanganan inflasi tidak hanya bersama-sama tapi secara parsial dan terkoordinasi,” pungkasnya.

Berhasil Kendalikan Inflasi

Pemprov Sumatera Selatan sendiri berhasil mengendalikan inflasi hingga akhir tahun 2023 namun di 2024 ini perlu usaha keras untuk mempertahankannya.

“Inflasi Sampai November 2023 sebesar 3,52 persen, hingga akhir 2023 akan tetap terjaga pada kisaran 2 hingga 4 persen,” ucap Fatoni.

Fatoni mengatakan berbagai upaya telah dilakukan pihaknya dalam mengendalikan inflasi daerah. Di antaranya mengajak masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sendiri melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) dan pasar murah.

Tak hanya menggelar pasar murah, pemerintah juga telah mendirikan Toko Kepo yang bekerja sama dengan sejumlah koperasi agar menyediakan harga bahan pokok jauh lebih murah dari pasaran.

“Untuk itu inflasi kita bisa ditangani dengan serius bersama-sama. Kepedulian kita akan membantu mengendalikan inflasi di daerah kita,” ujarnya.

Pemerintah juga telah berupaya untuk mengendalikan angka inflasi dengan memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Selain itu, Pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bagi keluarga

penerima manfaat.

“Masyarakat juga kita sosialisasikan agar melakukan gerakan hemat pangan, atau stop boros pangan. Termasuk bisa juga menerapkan sosialisasi kepada masyarakat dan keluarga bahwa inflasi ini harus ditangani bersama-sama,” kata Fatoni.

Pasar murah yang digelar Pemprov Sumsel sendiri telah dilakukan banyak tempat. Pemerintah berkomitmen secara rutin menggelar Pasar Murah setiap minggunya pada hari Senin, Selasa dan Kamis. Kegiatan tersebut bertujuan membantu masyarakat menengahkan ke bawah mendapatkan bahan

pokok murah.

Melalui kesempatan ini Fatoni berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan Gebyar Pasar Murah. Di antaranya Perum Bulog, PTPN 7 dan pihak swasta yang telah terlibat memberikan Corporate Social Responsibility (CSR)-nya.

“Pemerintah Provinsi Sumsel bekerja sama dengan BUMN, BUMD dan juga dunia usaha yang lain terus menggelar pasar murah ini di seluruh Sumatera Selatan. Tujuannya agar harganya bisa terkendali, kebutuhan juga cukup terpenuhi, masyarakat juga tidak panik,” ucap Fatoni. ●



SIAP SIAGA TANGGULANGI BENCANA ALAM

Perubahan iklim yang cukup ekstrim di Sumatera Selatan membuat Pemprov Sumsel terus berjibaku melakukan penanggulangan bencana alam. Setelah sebelumnya sempat disibukkan dengan penanganan kebakaran hutan lahan kini Pemprov Sumsel dibawah komando Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Agus Fatoni siaga menanggulangi bencana banjir dan tanah longsor.

Untuk memastikan kesiapsiagaan itu, Pj Gubernur Sumatera Selatan (Agus Fatoni bersama Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati dan Pj Walikota Palembang Ratu Dewa membahas penanggulangan bencana tahun 2024 di Kota Palembang dan seluruh wilayah lainnya.

Melalui kesempatan ini, Fatoni mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanganan banjir terutama pada musim penghujan. Kini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel bersama seluruh instansi dan stakeholder terkait telah berkoordinasi

juga bergerak bersama mengantisipasi banjir.

"Kita harus lakukan antisipasi sebelum terjadi banjir, kebetulan kita juga sudah Apel Kesiapsiagaan Personil dan peralatan. Bagi para korban bencana, perlu dilakukan pendampingan secara fisik termasuk trauma center," kata Fatoni.

Fatoni secara khusus meminta Kepala Pelaksana Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel Muhammad Iqbal Alisyahbana segera mengundang ka-

bupaten/ kota dalam penanggulangan bencana.

"Banjir perlu penanganan terpadu, pak Wali sudah sangat serius sekali dan tentu provinsi akan mendukung. Kalau di kabupaten-kabupaten lain kita melakukan kegiatan itu dari jauh-jauh hari sebelum terjadinya bencana," kata Fatoni.

Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati menyebut bencana tahunan di Sumsel terdiri dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir dan tanah longsor. Kota Palembang sendiri biasanya hanya mengalami banjir dan terdampak asap jika terjadi bencana Karhutla.

"Jadi menurut saya perlu sharing dengan kabupaten yang rawan dengan bencana seperti OKI, kalau Kota Pagar Alam biasanya terjadi longsor dan baru-baru ini Gunung Dempo aktif," ucapnya.

Sementara Pj Walikota Palembang Ratu Dewa mengatakan kunci sukses penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu.

"Betul seperti kata Pak Pj Gubernur Agus Fatoni bahwa menanggulangi semua itu adalah kata kuncinya terpadu sebab dengan terpadu akan menjadi ringan semuanya," ucap Ratu Dewa.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Kepala BPBD Sumsel Muhammad Iqbal Alisyahbana menegaskan dalam mengantisipasi banjir BPBD Sumsel sudah melaksanakan gladi kesiapsiagaan personil dan peralatan di Jakabaring Palembang yang dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Sumsel.



“Kita juga sudah melaksanakan gladi kesiapsiagaan di Ogan Ilir, selain itu kita juga mengaktivasi komando di Kantor BPBD ketika posko ini aktif semuanya bergerak,” pungkasnya.

Gerak Cepat Tangani Bencana

Pemprov Sumsel sendiri telah melakukan gerak cepat dalam penanggulangan bencana. Melalui Organisasi Perangkat Kerja Daerah (OPD) terkait langsung melakukan gerak cepat menangani banjir yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) pada beberapa waktu lalu.

Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel M Iqbal Alisyahbana pihaknya langsung merespon atensi Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni dalam melakukan upaya evakuasi terhadap para warga yang terdampak bencana.

Mengingat akibat meluapnya sungai rupit ini menyebabkan 15000 warga terdampak akibat putusnya jembatan gantung yang menghubungkan dua desa yakni Desa Batu Gajah dan Desa Batu Gajah Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara.

“BPBD Provinsi telah menerjunkan 2 Tim Reaksi Cepat (TRC) ke lokasi bencana untuk melakukan kajian sekaligus melakukan navigasi bencana antisipasi banjir susulan,” ujar Kepala BPBD Sumsel M Iqbal Alisyahbana.

Dikatakan Iqbal, selain itu Pemprov Sumsel juga telah menyalurkan bantuan logistik dan membuka dapur umum untuk warga.

“Pemprov Sumsel bersama TP PKK juga mendirikan dapur umum untuk membantu masyarakat yang terdampak,” imbuhnya.

Adapun bantuan logistik tahap pertama yang telah disalurkan lanjut Iqbal, berupa 800 Paket Sembako (Mie Instan 8000 bungkus, Minyak Goreng 800 Bungkus, Gandum 800 Bungkus, Gula Pasir 800 Bungkus, Saos Sambal 1600 Botol, Kecap Manis 1600 Botol, Sarden 3200 kaleng Goodie 800 Pcs.

“Selain itu ada juga bantuan 100 lebar terpal dan 100 lembar selimut,” terangnya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Sumsel, Mirwansyah menegaskan selain bantuan logistik dari Pemprov,

bantuan sandang juga disumbangkan oleh PTBA, PT Djarum, dan SKK Migas.

“Jika sewaktu-waktu dibutuhkan lagi,

kita akan salurkan bantuan tambahan kepada warga yang terdampak bencana di sana,” tegasnya. •





BERIKAN APRESIASI PADA WARGA TAAT PAJAK

Peningkatan pendapatan daerah berkaitan erat dengan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Sektor pajak kendaraan menjadi salah satu pemasukan utama Provinsi Sumatera Selatan selama ini.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Sumatera Selatan dalam membayar pajak, Pemprov Sumsel memberikan pelayanan maksimal kepada para wajib pajak agar mereka nyaman dalam memenuhi kewajibannya. Semakin baik pelayanan hal itu juga berimbas pada makin meningkatnya pemasukan daerah dari sektor pajak.

Sebagai bentuk penghargaan, Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengapresiasi masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan. Bentuk apresiasi tersebut berupa pembagian sembako kepada masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pengelolaan Pendapatan Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Wilayah Palembang III.

Fatoni mengatakan pemberian sembako ini sebagai bentuk perhatian dan kepedulian sekaligus wujud apresiasi nyata dari Pemprov Sumsel terhadap

masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan.

"Tetap taat membayar pajak yang menjadi kewajiban. Terlebih proses pelayanan yang diberikan sangat dipermudah, perpanjangan STNK yang untuk satu tahunan tidak sampai lima menit selesai, dengan syarat-syaratnya yang sudah lengkap," ucap Fatoni.

"Apalagi biaya balik nama, tidak lama dan murah, ini untuk menghindari pemblokiran. Karena kalau sudah diblokir kendaraan kita akan menjadi ilegal dan tidak bisa beroperasi," lanjutnya.

Selain itu, Fatoni juga mengapresiasi kinerja jajaran Samsat Palembang III yang telah mereka telah memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Sumatera Selatan sehingga para wajib pajak terasa nyaman saat membayar kewajibannya sebagai warga Sumsel.

"Hari ini kita melakukan sidak terhadap pelayanan publik di lingkup Pemerintah Provinsi, salah satunya pelayanan di Samsat. Tadi saya mengecek apakah pelayanan sudah berjalan dengan baik atau masih pada libur. Setelah saya cek,

ini kantor berjalan dengan normal, pelayanan juga sangat baik,” kata Fatoni.

Layanan Berjalan Maksimal

Memasuki minggu pertama Januari tahun 2024 lalu, Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Agus Fatoni mulai mengawali agenda kerja di hari pertama kerja pasca libur menyambut Tahun Baru 2024. Dia melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Palembang III.

Adapun tujuan sidaknya kali ini guna memastikan proses pelayanan publik di tempat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berjalan dengan baik.

Bahkan Fatoni juga meninjau dengan saksama pelayanan di Kantor Samsat, mulai dari proses pendaftaran, validasi, pembayaran hingga pencetakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) termasuk ruang kerja staf serta ruang tunggu.

“Hari ini kita melakukan sidak terhadap pelayanan publik di lingkup Pemerintah Provinsi, salah satunya pelayanan di Samsat. Tadi saya mengecek apakah pelayanan sudah berjalan dengan baik atau masih pada libur. Setelah saya cek, ini kantor berjalan dengan normal, pelayanan juga sangat baik,” kata Fatoni.

Selain itu, Fatoni juga mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak yang sudah menjadi kewajibannya. Terlebih dalam proses pelayanan yang diberikan sudah sangat dipermudah.

“Perpanjangan STNK yang untuk satu tahunan tidak sampai lima menit selesai, dengan syarat-syaratnya yang sudah lengkap. Kami menghimbau untuk seluruh masyarakat wajib pajak, segera melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Apalagi biaya balik nama, tidak lama dan murah, ini untuk menghindari pemblokiran karena kalau sudah diblokir kendaraan kita akan menjadi ilegal dan tidak bisa beroperasi,” ucap Fatoni.

Melalui kesempatan ini, Fatoni juga berterima kasih kepada seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumsel karena telah berhasil melampaui target pendapatan dari yang telah ditetapkan.

“Jadi pendapatan asli daerah itu salah satunya berasal dari pajak kendaraan



bermotor dan biaya balik nama. Pendapatan untuk tahun 2023 telah terealisasi melampaui target lebih dari 100%. Kami juga memberikan apresiasi kepada

Bapenda dan OPD lain yang sudah bekerja keras, sehingga PAD bisa meningkat dan melebihi target 100 persen,” ujarnya. •

ASN SUMSEL SIAP BERSIKAP NETRAL

Menjelang penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu), pemilihan presiden (Pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak tahun 2024 mendatang, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni memimpin langsung deklarasi secara serentak Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Sumsel.

ASN di lingkungan Pemprov Sumsel menjamin akan bersikap netral terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 sebagai bentuk profesional mereka sebagai abdi negara.

Pembacaan ikrar netralitas ASN dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan SA Supriono diikuti oleh Bupati/Walikota se-Sumsel dan secara daring diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Sumsel. Usai pembacaan deklarasi, dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pakta integritas netralitas ASN secara serentak se-Sumsel.

Dalam kesempatan ini, Fatoni mengapresiasi diselenggarakannya deklarasi netralitas yang diikuti 180.751 ASN serentak se-Sumsel. Tak hanya itu, dia juga mengaku

gan NPHD serentak dan itu dihadiri langsung ketua KPU pusat, ini merupakan keinginan dan komitmen kita bersama yang ingin diwujudkan Sumsel menjadi percontohan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada seluruh Indonesia,” ucap Fatoni.

Kemudian, Fatoni juga menegaskan bahwa netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada merupakan kewajiban yang harus dipegang teguh. Sementara itu, KPU dan Bawaslu dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilu juga harus didukung penuh.

“Bupati, Walikota dan seluruh ASN telah berkomitmen menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Terutama kepada ASN ini adalah atensi yang harus kita taati dan menjadi komitmen kita bersama,” ujarnya.

Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni mengimbau agar Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk terus mendukung agar pesta demokrasi di Sumsel ini berjalan dengan aman, damai dan lancar. Menurutnya, dengan kerjasama yang baik akan mewujudkan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 mendatang berjalan sukses.

“Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota serta Forkopimda pasti mendukung KPU dan Bawaslu menjalankan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Sumsel agar berjalan dengan lancar. Dengan kerja bersama kita yakin apa yang kita harapkan membuat Sumsel semakin maju terwujud,” kata Fatoni.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumsel Andika Pranata Jaya menyambut baik kegiatan ini. Dia yakin bahwa seluruh ASN di Sumsel mampu bersikap netralitas.

“Ini memberikan keyakinan bagi kami penyelenggara Pemilu bahwa Sumsel siap melaksanakan Pemilu dengan baik. Kami juga yakin ASN di Sumsel menjalankan netralitas,”



bangga atas prestasi Provinsi Sumatera Selatan menjadi yang pertama se-Indonesia melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.

“Beberapa waktu lalu Sumsel memelopori pelaksanaan penandat-

pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh para Pj Bupati/Wali Kota se-Sumsel, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumsel dan para Sekda juga ASN di 17 Kabupaten/Kota se-Sumsel secara virtual.

Ingatkan Jajaran ASN

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, Ir. SA Supriono mengingatkan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumsel untuk tetap menjaga netralitas menjelang tahun politik 2024.

"Di tahun 2024 akan ada dengan tiga pemilu yaitu legislatif, presiden dan kepala daerah. Kita harus bersikap netral meskipun kita juga tetap menjalankan tugas sebagai warga negara Indonesia untuk memilih," tutur Sekda Supriono dalam amanatnya saat memimpin apel pagi gabungan yang diikuti oleh Kepala Organisasi Kepala Daerah (OPD) dan ASN bertempat di Kantor Gubernur Sumsel.

Dikatakan Sekda, ASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sumsel harus mampu menempatkan diri pada posisi yang sesuai dengan postur yang telah dituangkan di dalam regulasi.

"Jika kita diatur untuk netral, maka wajib bersikap netral," tambahnya.

Selain itu Supriono juga menyinggung realisasi anggaran dan program prioritas menjelang akhir tahun 2023.

"Beberapa hal yang terkait program prioritas seperti stunting, kemiskinan ekstrim dan inflasi," tambah Sekda Supriono.

Seluruh OPD dimintanya.segela dapat melaksanakan tugas akhirnya, terkait dengan capaian target sasaran dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan dilengkapi dengan laporan keuangannya yang harus diselesaikan tepat waktu.

"Saya harap ini dapat diselesaikan

segera, karena laporan seluruh OPD akan dikompilasi menjadi satu dalam laporan keuangan Provinsi Sumsel, maka diharapkan bapak/ibu sekalian harus menyadari hal tersebut agar dapat menyelesaikan pekerjaan secepatnya," ucap Sekda.

Terkait dengan kedisiplinan ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam bekerja, Sekda Supriono menyampaikan bahwa di tahun anggaran 2024 akan

ibu tidak perlu membuat laporan kinerja tahunan seperti terdahulu. Semuanya akan terinstal dengan otomatis. Kami berharap tahun depan tidak ada lagi yang tidak melaksanakan tugas," tambahnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sekda Supriono meminta agar seluruh ASN dan PPPK dapat beradaptasi dengan perubahan regulasi dan perkembangan zaman.

"Berubahlah dengan suasana yang



diterapkan absensi secara elektronik dengan menggunakan handphone dan dilakukan absensi dengan lokasi masing-masing.

"Tidak ada yang tidak absen termasuk yang sedang berdinis. Kinerja akan dinilai secara otomatis, bapak/

baru karena kita didorong untuk bisa mengikuti perubahan zaman yang begitu cepat. Maka kita harus mengupdate diri kita untuk bisa bersaing dengan negara lain. Untuk itu kami minta semua ini dijalankan dengan baik," tegasnya. ●



HUT ke-67 Kalimantan Timur

MOMENTUM REFLEKSI KEBERHASILAN

DPRD Kalimantan Timur menggelar Sidang Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Provinsi Kalimantan Timur di Gedung B Utama Karang Paci, Kota Samarinda, Senin, 8 Januari 2024.

Sidang Paripurna secara tatap muka dipimpin langsung Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud. Hadir pula Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, dengan seluruh kepala organisasi perangkat daerah, anggota dewan dan para tokoh serta unsur forkopimda.

Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, mengungkapkan keberhasilan Benua Etam yang saat ini genap berusia 67 tahun.

Akmal menyatakan keberhasilan Kaltim dalam memahami berbagai permasalahan dan menjalankan program-program dengan semangat dan produktivitas tinggi.

"Sungguh akan terasa manis jika momentum ulang tahun Kaltim tahun ini kita bersama melakukan refleksi yang di-

lakukan di Bumi Etam," terangnya.

Menurutnya, tema yang diangkat tahun ini yakni "Membangun Kaltim Untuk Nusantara," sebagai bentuk penegasan dari suara hati, dari karya, dan produktivitas masyarakat Kalimantan Timur.

Akmal menyatakan, Kaltim akan terus berkontribusi untuk Indonesia dan dunia, tidak hanya melalui sumbangan material, tetapi juga motivasi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Berbagai capaian pembangunan Kaltim yang sudah diraih menjadi pemicu untuk terus maju dan berkembang. Untuk itu perlu dukungan bersama dengan kolaborasi dan sinergi



seluruh elemen Masyarakat. Sehingga terwujud nafas panjang pembangunan untuk masa depan Kaltim yang cemerlang.

"Awal 2024 ini, Kalimantan Timur menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sangat menggembirakan," sebutnya

Pertumbuhan ekonomi Kaltim meningkat pesat dari 4,70 persen pada 2019 menjadi 6,34 persen pada triwulan III-2023. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mencapai 78,20 pada 2023, menempatkannya pada posisi ketiga nasional setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

Oleh karenanya, Pemprov Kaltim menyambut tahun ini dengan tekad terus menyusun dan melaksanakan berbagai program pembangunan yang berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang sudah dilaksanakan bersama-sama.

Dengan tekad tersebut Kaltim akan mampu meningkatkan daya saing sumber daya manusia percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, berharap Kaltim menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan dinamika pembangunan yang semakin kompleks. Sebab, keberhasilan Kaltim memerlukan komitmen dan kerja keras bersama dari pemerintah, swasta, dan seluruh masyarakat.

"Kami mengajak semua masyarakat untuk terus memberikan pengabdian terbaik bagi Benua Etam yang kita cintai," kata politikus Golkar Kaltim ini.



Menurut Hamas, prinsip Ruhui Rahayu yang jadi acuan menjadi dorongan agar Kaltim menjadi provinsi yang maju dengan kehidupan harmonis, damai, serta sejahtera, adil, dan makmur. Sehingga, momentum HUT ke-67 Kaltim diharapkan dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan.

"Menjadi modal dasar mewujudkan Kalimantan Timur yang berdaulat seiring dengan tema Membangun Kaltim untuk Nusantara," ujarnya.

Hamas juga berharap keberhasilan pembangunan yang terjadi di Kaltim tidak lepas dari peran serta seluruh elemen masyarakat. Untuk itu, DPRD Kaltim mengajak seluruh masyarakat Bumi Mulawarman untuk berpartisipasi.

"Membangun Benua Etam melalui bidang keahlian serta profesi masing-masing," tegasnya.

Hamas juga mengatakan, banyak tantangan yang perlu dijawab pada 2024, salah satunya masalah pendidikan. Menurutnya, persoalan pendidikan masih memerlukan perhatian ekstra dari Pemprov Kaltim, terlebih mengenai perguruan tinggi negeri yang ada di Kaltim.

"Seperti Unmul (Universitas Mulawarman) yang saat ini akreditasinya menjadi B, harusnya kita sudah beranjak menjadi Unggul, ini yang kita sebut memerlukan perhatian lebih," ucapnya.

Menurut Hamas, berbicara pendidikan juga beririsan langsung dengan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM). Apalagi dengan adanya Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim, peningkatan SDM menjadi tugas utama agar ke depannya setelah IKN beroperasi, masyarakat Kaltim juga dapat berkontribusi langsung.

"Belakangan ini kita sedang gencar meningkatkan SDM Kaltim. Ini harus didukung juga dengan sarana yang berkaitan," jelasnya.

Bergeser dari topik pendidikan, Hamas juga menyinggung tentang masalah kesehatan di Kaltim. Dia mengungkapkan tingkat stunting di Kaltim masih terbilang cukup tinggi.

"Maka dari itu, ini juga menjadi tantangan kita bersama untuk menuntaskan stunting, jika dikorelasikan, ini memiliki keterkaitan yang erat," sebutnya.

Selain itu, juga mendorong ketahanan

pangan di Kaltim menjadi tantangan serius. Sebab kemandirian pangan menjadi cita-cita besar Pemprov Kaltim agar mampu menopang seluruh kebutuhan masyarakat.

Dia menambahkan, Kaltim akan menghadapi perpindahan IKN Nusantara yang merupakan tantangan besar bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri. Dengan adanya perpindahan ini, Kaltim diharapkan akan menjadi tempat tinggal dan peluang bagi banyak pendatang yang mencari nasib baru.

Hasanuddin menyatakan bahwa



DPRD Kaltim akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk mencapai tujuan ini.

Dia juga berharap agar pemerintah dapat memberikan dukungan yang optimal dalam menghadapi perpindahan IKN. Dengan sinergi antara pemerintah pusat yang baru nantinya, serta Pemprov Kaltim dan masyarakat, diharapkan Kaltim dapat menjadi tempat yang maju dan berkembang di masa depan.

Saat ini, pembangunan Istana Presiden dan infrastruktur pendukung lainnya sedang dikebut pengerjaannya. Targetnya, Presiden bersama seluruh jajaran Menteri, Polri, TNI dan unsur pemerintahan lainnya dijadwalkan sebelum 16 Agustus 2024 ini sudah ber Kantor di Ibu Kota terbaru Indonesia itu.

Hamas mengaku, pihaknya senantiasa mengawal pembangunan infrastruktur daerah penyangga IKN yang bersumber dari APBD Kaltim.

"Beberapa infrastruktur dasar yang kami awasi adalah pemenuhan jaringan

listrik, pendidikan, pembangunan fisik yang strategis, serta infrastruktur kesehatan," kata dia.

Hamas juga mengatakan, sejak dipilih sebagai IKN yang baru, kini Kaltim untuk nusantara dan kondusifitas daerah perlu dipertahankan agar pembangunan di segala bidang bisa berjalan aman dan lancar.

"Kami mengapresiasi kerja-kerja Polda Kaltim dan Pangdam VI/Mulawarman menjaga Kaltim hingga saat ini situasi dan kondisinya kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pem-

bangunan. Ke depan, masyarakat juga diharapkan terus menjaga situasi yang sudah kondusif," kata dia.

Menurutnya, ditetapkannya Kaltim sebagai lokasi IKN yang baru, membawa angin segar bagi pemerataan pembangunan dan kemajuan di Kaltim, termasuk di Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia timur.

"Investasi ke Kaltim juga meningkat, khususnya di Balikpapan di sekitar wilayah yang berbatasan dengan IKN," ucapnya.

Dia mengatakan, DPRD Kaltim bersama gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, sama-sama berharap dengan adanya IKN, Kaltim menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa.

"Keberadaan IKN di Kaltim diharapkan mewujudkan masyarakatkan yang adil, sejahtera dan makmur, serta semakin memperkuat persatuan dan persaudaraan. Sekarang kita membangun Kaltim untuk nusantara," kata dia. ●

PENGGINGAT SEJARAH KALTIM

Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menyatakan bahwa Hari Ulang Tahun ke-67 Kalimantan Timur adalah sebuah pengingat untuk tidak melupakan sejarah maupun para pemimpin.

Hal itu diungkapkan Akmal Malik saat memimpin upacara peringatan HUT ke-67 Kaltim di Gelora Kadrie Oening Sempaja, Selasa, 9 Januari 2024. Upacara diikuti ratusan peserta terdiri ASN, TNI/Polri, pelajar, mahasiswa maupun Satpol PP.

"Momentum ini sekaligus muhasabah bagi semua, sudah sejauh mana, sebanyak apa karya darma bakti yang

diberikan untuk bangsa dan negara, khususnya Kaltim," sebutnya.

Menurut Akmal, perjalanan pembangunan di Kaltim telah banyak kemajuan dan progres yang sangat membanggakan, baik di sektor pembangunan, sumber daya manusia, infrastruktur penyediaan fasilitas dasar Masyarakat, dan sektor lainnya yang harus disyukuri bersama.

"Mari kita hadapi berbagai tantangan

pembangunan dengan semangat penuh," pintanya.

Upacara dirangkai penyerahan 61 panji-panji keberhasilan pembangunan bagi kabupaten dan kota di Benua Etam. Panji Keberhasilan Daerah diserahkan oleh Penjabat Gubernur Kaltim kepada pemerintah kabupaten/kota yang dianggap berprestasi dan berhasil dalam mengembangkan serta memajukan daerahnya.

Penghargaan Panji diberikan sebagai bentuk apresiasi Pemprov Kaltim kepada pemerintah Kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja, prestasi, serta pelaksanaan program-program pembangunan dan pemerintahan.

Tahun ini, penerima panji keberhasilan pembangunan terbanyak diraih Kota Balikpapan yakni 17 panji, Kutai Kartanegara 13 panji, Berau 7 panji, Samarinda 7 panji, Paser 6 panji, Bontang 5 panji, Kutai Timur 3 panji, Penajam Paser Utara 1 panji, Kutai Barat 1 panji, dan Mahakam Ulu 1 panji.

"Tekad kita bersama adalah mewujudkan daya saing SDM, percepatan transformasi dan pertumbuhan ekonomi, aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan profesional dan akuntabel di seluruh kabupaten/kota," pesan Akmal.

Promosi Kinerja

Dalam peringatan HUT ke-67, Pemprov Kaltim juga menggelar pesta rakyat dan menjadi ajang mempromosikan kerja pemerintah daerah kepada masyarakat.

"Pemerintah harus lebih sering mempromosikan hasil kerjanya agar diketahui masyarakat luas," ujar Akmal.

Menurut ia, masyarakat tidak akan mengetahui hal yang dilakukan pemerintah jika tidak dipromosikan. Pesta Rakyat ini adalah ajang bagi semua organisasi perangkat daerah untuk



menyampaikan kepada masyarakat mengenai hasil kerjanya karena tugas pemerintah daerah adalah pelayan untuk masyarakat.

Akmal menambahkan, peringatan HUT Kaltim juga menjadi momentum untuk introspeksi dan evaluasi terkait berbagai hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah selama 67 tahun.

"Sampaikan kepada masyarakat apa yang sudah kita lakukan, apa saja yang sudah diberikan kepada masyarakat dan biarlah masyarakat menilai apa yang telah pemerintah kerjakan," ujar Akmal.

Dia mengatakan peringatan hari ulang tahun sejatinya sebagai muhasabah bagi perangkat pemerintahan. Dengan begitu, ada ruang untuk membenahi berbagai hal yang masih kurang dalam pengelolaan pemerintahan. "Jika ada penghargaan, itu adalah hadiah yang patut disyukuri," tambah Akmal.

Dalam Pesta Rakyat HUT Kaltim tersebut, Akmal juga mengapresiasi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal yang menampilkan produk-produk unggulannya. Ia mengatakan pemerintah daerah memiliki tugas untuk membantu UMKM lokal agar bisa bersaing di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.

"Kami memfasilitasi masyarakat yang memiliki UMKM karena tugas kita untuk membuat UMKM go provinsi, go nasional dan go internasional," tuturnya.

Akmal memahami UMKM lokal memiliki keterbatasan, di antaranya keterbatasan akses informasi dan sumber daya. "Maka dari itu, saya meminta kepada OPD terkait untuk lebih sering menampilkan UMKM lokal pada kegiatan-kegiatan seperti ini," tambahnya.

Dia juga mengimbau masyarakat untuk lebih mengonsumsi (membeli) produk-produk lokal yang berasal dari Kaltim, sehingga UMKM lokal bisa lebih berkembang dan berkontribusi bagi perekonomian daerah.

"Ajang promosi ini agar orang tahu kita punya produk lokal, jangan malah kita promosikan produk luar daerah," tegasnya.

Akmal menilai UMKM Kaltim hebat karena sudah bisa memproduksi sendiri makanan-makanan ringan. Ia optimistis hasil olahan produk lokal bisa bersaing dengan produk makanan ringan dari luar daerah.

"UMKM itu menjadi sektor yang selalu mendukung ekonomi nasional. Maka dari itu, Kaltim ayo kita gerakkan UMKM lokal kita," ajaknya.

Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menerangkan, tahun ini HUT Kaltim akan sangat meriah, namun tetap memberikan banyak kegiatan

ini, Pemprov mencoba menumbuhkan partisipasi dari banyak pihak, salah satunya lewat hadirnya tari massal yaitu tari Jepen Begenjoh yang melibatkan 6.007 penari. Terdiri dari siswa sekolah, komunitas, organisasi wanita. Tari massal Jepen Begenjoh ini sebagai nilai tambah HUT Kaltim ke-67 ini dalam pewarisan seni budaya khas Kaltim.

"Kita hadirkan 6.007 penari ya karena ini ulang tahun ke-67. Kita ingin semua merasa senang dan bahagia. Meskipun persiapan singkat, tapi kemeriahan tari daerah ini harus kita lakukan setelah penyerahan panji-panji keberhasilan pada upacara nanti," sebutnya.

Selain itu, saat ini perangkat daerah semakin berinovasi dan berkreasi



edukasi serta pelayanan publik yang mudah dijangkau masyarakat.

"Pesta Rakyat

Kaltim menjadi ruang publik bagi sejumlah kegiatan yang mencakup aspek budaya, pendidikan, kesenian, olahraga, hingga berbagai kompetisi menarik yang dimeriahkan oleh kehadiran artis-artis spesial. Kita berikan pengalaman tak terlupakan bagi masyarakat Kaltim dalam merayakan ulang tahun provinsi ini," terang Sri Wahyuni.

Mantan Kadis Pariwisata Kaltim ini juga mengatakan di HUT ke-67 tahun

memberikan layanan. Karenanya di momen PRK ini masyarakat jangan sampai melewatkan kemudahan pelayanan yang diberikan masing-masing instansi sesuai dengan keperlunya baik dari sisi pelayanan publik, kesehatan, ekonomi, pariwisata, teknologi informasi dan masih banyak lainnya.

"Banyak talkshow, informasi layanan sertifikasi, pembagian ribuan bibit pohon buah-buahan dari Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan pelayanan Dinas lain selama 9-13 Januari 2024. jadi ini sebuah perayaan yang di mana pemerintah provinsi hadir lewat perangkat daerahnya bersama sama dengan masyarakat," tutur Sri Wahyuni. ●



HANYA 7 PARTAI LOLOS SENAYAN

Sebulan jelang Pemilu 2024, elektabilitas partai politik terus mengalami perubahan yang cukup signifikan. Partai Gerindra dan PDIP menjadi yang terus berebut posisi teratas dalam beberapa survei. Beberapa lainnya bahkan terancam tak lolos ke Senayan karena kecilnya angka elektabilitas.

Lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs merilis elektabilitas partai politik berdasarkan survei yang dilakukan periode 27 Desember 2023 hingga 5 Januari 2024. Hasilnya, cukup mengejutkan di mana Partai Gerindra berhasil menjadi yang teratas mengungguli PDIP yang melorot ke posisi dua.

Deputy Director Ipsos Public Affairs, Sukma Widyanti, menjelaskan, partai politik yang berpotensi lolos ke Senayan yakni Partai Gerindra yang mencapai elektabilitas hingga 27 persen. Lalu, disusul PDIP dengan elektabilitas sebesar 21 persen, Partai Golkar 8 persen, PKB 7 persen, PKS 7 persen, Partai NasDem 6 persen, PAN 4 persen, dan Partai Demokrat 3 persen.

Sementara, posisi PPP dan PSI masih belum aman karena kini turun dibanding survei sebelumnya dengan hanya meraih elektabilitas 1

persen.

"Survei ini juga menunjukkan bahwa pada basis-basis PDI Perjuangan, khususnya Jawa Tengah, yang disebut sebagai kandang banteng, menunjukkan suara Ganjar semakin tergerus," ujar Sukma, Rabu, 10 Januari 2024.

Peneliti senior Ipsos Public Affairs, Arif Nurul Imam, mengatakan, berdasarkan temuan terbaru, diketahui elektabilitas pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, juga mengalami peningkatan.

Sementara, pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) dan pasangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menunjukkan stagnan.

"Dibandingkan data survei akhir bulan November, Prabowo-Gibran kembali mengalami kenaikan dari 42,66 persen ke 48,05 persen. Sementara, Anies-Muhaimin cenderung stagnan dari 22,13 ke 21,80 persen, dan Ganjar-Mahfud dari 22,95 turun 18,35 persen," kata Arif.

Dia menuturkan, untuk sementara yang belum menentukan pilihan menurun tipis dari 12,26 turun ke 11,80 persen. Bahkan, dinamika pemilih mengalami pergeseran dan berdampak pada peta kompetisi elektoral yang signifikan.

Menurut Arif, efek Jokowi terlihat nyata lantaran terbukti bantu elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran meningkat. Ia menuturkan, pemilih Jokowi-Ma'ruf di 2019 makin besar mendukung Prabowo-Gibran.

Adapun, soliditas dukungan pasangan paling tinggi ada di paslon Prabowo-Gibran karena hanya sebesar 13 persen yang masih bisa berubah. Sementara, Anies-Muhaimin terdapat 15 persen pendukungnya yang masih bisa bergeser. Kemudian, pemilih paslon Ganjar-Mahfud ada 20 persen yang masih bisa bergeser.

"Jika kita mengaitkan kenaikan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf saat ini, dari 65 persen di November jadi 74 persen di Desember. Maka hal ini bisa dibahas a-



papun paslon capres cawapres yang dianggap melanjutkan program-program kerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, besar kemungkinan akan dapatkan Jokowi effect dalam hal elektabilitas," sebutnya.

Di sisi lain, sejumlah partai politik yang disebutkan berpotensi tak lolos ke Senayan menanggapi santai survei yang dilakukan Ipsos Public Affairs. Deputi Bappilu DPP

Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengaku tak mempersoalkan partainya yang diprediksi hanya mendapat 3 persen dukungan versi survei Ipsos. Sebab, pihaknya memegang survei tersendiri di internal partai yang dianggap kredibel.

"Partai Demokrat senantiasa memperhatikan hasil survei dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis serta dalam mengevaluasi dinamika politik yang berkembang.

Terkait hasil survei Ipsos, kami tak terpengaruh karena kami juga memegang hasil survei internal berbasis dapil yang menggunakan lembaga survei kredibel," kata Kamhar, Kamis, 11 Januari 2024.

Kamhar mengatakan survei internal partainya melibatkan hingga 60 ribu responden. Survei

itu dipercaya PD memiliki akurasi tinggi.

"Responden per dapil sebanyak 800 orang, jadi secara nasional lebih dari 60 ribu orang responden.

Kami yakini ini lebih kredibel dan akurat dalam memotret preferensi dan dukungan politik masyarakat," kata dia.

"Ini telah dilakukan pada November 2023 yang lalu, dan saat ini Januari 2024 juga sedang dilakukan. Survei berbasis dapil tentu

saja jauh lebih

akurat, karena tak hanya memotret elektabilitas partai, namun juga mereka dan memotret hasil kerja-kerja politik puluhan ribu

caleg

Partai

Demokrat di semua tingkatan yang tengah berikhtiar menjemput mandat rakyat," ujarnya.

Dengan begitu, Kamhar optimistis pihaknya mampu memperoleh suara sesuai target. Dia menyebut Ketua Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menargetkan sebanyak 70 kursi di DPR di Pemilu 2024.

"Berdasarkan hasil survei berbasis dapil ini, kami optimis dan yakini apa yang telah ditargetkan Partai Demokrat sebagaimana

disampaikan Mas Ketum AHY untuk mengikhtikarkan 70 kursi di Parlemen untuk DPR RI bisa terwujud," lanjut Kamhar.

Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi, juga mengaku tak memusingkan hasil survei Ipsos tersebut. "Ya survei Ipsos begitu, survei Arus Indonesia lolos. Dan dinamika survei itu tergantung sampling yang diambil dan kapan waktu pengambilan sampling," kata Awiek.

Awiek mengatakan lembaga survei lain menunjukkan elektabilitas PPP masih memenuhi syarat parliamentary threshold (PT) 4 persen atau lolos ke DPR. Dia menekankan partainya akan terus bekerja turun ke bawah menjemput suara ke masyarakat.

"Kan ada juga survei PPP yang lolos. Bagi kami survei itu menjadi alat ukur pergerakan mesin politik partai. Tentu yang menentukan nanti bagaimana kita mendekati masyarakat melalui caleg-caleg yang kita miliki, melalui struktur partai,

karena kami sudah pengalaman dalam setiap pemilu," ujarnya.

Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini pun menyebut partainya merupakan peserta pemilu, bukan peserta survei. "Sehingga ketika 14 Februari mendatang PPP bisa lolos pemilu. Sekali lagi karena PPP adalah peserta pemilu dan PPP bukan peserta survei," kata dia.

Sementara itu, PSI menyebut, meski diprediksi tak lolos parlemen karena hanya mendapatkan 1 persen versi survei Ipsos, namun dalam survei lain tren PSI telah lebih dari 4 persen.

"Survei-survei lain tren PSI positif, naik terus bahkan sudah ada yang lebih dari 4 persen," kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie.

Grace mengaku tak mempersoalkan hasil survei Ipsos. Ia menyebut hal ini akan menjadi bahan untuk PSI semakin aktif. "Nggak apa-apa semuanya kita jadikan bahan untuk semakin gaspol di lapangan," kata Grace. ●





PESONA PETAHANA DI MALUKU MEREDUP

Hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) telah menunjukkan perubahan signifikan dalam elektabilitas calon petahana Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Barnabas Orno, menjelang Pilkada 2024.

Mereka sekarang diungguli oleh Jefry Apoly Rahawarin (JAR), seorang calon penantang.

Direktur Konsultan Citra Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia (KCL LSI), Denny JA, Adjie Alfaraby menjelaskan, bahwa pesona Murad Ismail sebagai petahana telah meredup karena tingkat kepuasan publik yang rendah terhadap kinerjanya sebagai gubernur dan persepsi bahwa beliau gagal dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu poin kritik utama adalah status Maluku sebagai provinsi termiskin nomor empat di Indonesia, yang mayoritas responden tidak ingin melihatnya memegang jabatan Gubernur Maluku lagi.

Adjie Alfaraby menekankan bahwa hasil survei ini adalah data yang mencerminkan situasi di lapangan dan dapat menjadi referensi bagi masyarakat Maluku.

"Data ini cukup mengesankan dan berpotensi menjadi isu yang menarik perhatian publik di Maluku terkait Pilkada 2024," ungkapnya.

Menurutnya, elektabilitas
M u -

rad Ismail saat ini berada di level 18,4 persen, sementara JAR memimpin dengan 18,7 persen.

Ini menciptakan pertarungan "Head to Head" yang menarik antara kedua tokoh ini dalam Pilkada Maluku 2024. Adjie juga mencatat bahwa petahana yang memiliki elektabilitas di bawah 30 persen memiliki potensi besar untuk kalah dalam pemilihan gubernur yang besar.

"LSI melakukan survei ini dengan wawancara tatap muka dengan margin of error sekitar 3,5 persen kepada 800 responden dalam rentang waktu dari 13 Juni hingga 1 Juli 2023," ulasnya.

Dalam survei ini, responden lebih banyak memilih JAR daripada Murad Ismail, menciptakan persaingan ketat di antara keduanya.

Hasil survei ini menyoroti peran penting isu ekonomi dalam Pilkada Maluku 2024 dan potensi perubahan signifikan dalam elektabilitas calon petahana berdasarkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja mereka.

Adjie Alfaraby, telah mengungkapkan bahwa isu ekonomi menjadi prioritas utama bagi masyarakat Maluku dalam Pilkada Gubernur 2024, berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 800 responden.

Masyarakat di Maluku sangat menginginkan program-program dari calon Gubernur atau Wakil Gubernur yang berfokus pada masalah ekonomi, seperti menciptakan lapangan pekerjaan, mengendalikan inflasi, dan memenuhi kebutuhan pokok.

"Masyarakat Maluku menginginkan program Cagub dan Cawagub yang fokus pada masalah ekonomi, misalnya menciptakan lapang-



an pekerjaan, mengendalikan inflasi dan pemenuhan kebutuhan pokok," jelasnya.

Hanya saja Murad Ismail tetap dianggap kuat sebagai incumben untuk Pilgub 2024. Pasangannya, Barnabas Orno, juga dianggap mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Wakil Gubernur.

Oleh karena itu, banyak yang menyarankan agar keduanya berpasangan kembali di Pilgub 2024.

"Ini adalah konsekuensi politik dan keputusan yang wajar sesuai dengan mekanisme internal PDIP," ulasnya.

Meskipun keluarnya Murad dari PDIP berdampak pada kelembagaan partai tersebut yang dipimpin oleh Benhur Watubun, yang relatif lebih muda dalam hal popularitas dibandingkan dengan Murad Ismail, Murad tetap memiliki pengaruh signifikan di Maluku sejak Pemilihan Gubernur Maluku tahun 2019.

diharapkan mendukung Murad Ismail.

"Jadi, meskipun PDIP tidak lagi memberikan rekomendasi, Murad masih dianggap kuat dalam persaingan politik di Maluku," tambahnya.

Sementara itu, pengamat lainnya, Said Lestaluhu, menyoroti dampak keluarnya Murad Ismail dari PDIP pada upaya partai tersebut dalam Pemilu 2024. Menurutnya, PDIP memerlukan pemimpin yang bisa mengakomodasi berbagai fraksi internalnya. Dengan



Namun, meskipun Murad Ismail telah dikeluarkan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partainya sebelumnya, ia masih memiliki peluang besar untuk terpilih kembali pada Pilgub 2024.

Menurut Johan Tehuayo, seorang akademisi dari FISIP Universitas Pattimura Ambon, status sebagai incumben membuat Murad tetap kuat dalam persaingan.

Dikeluarkannya Murad Ismail dari PDIP terjadi karena istrinya, Widya Murad Ismail, memilih Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai kendaraan politik untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Dia telah memainkan peran penting dalam mempertahankan kekuatan PDIP di beberapa daerah, seperti Buru Selatan dan Kabupaten Kepulauan Aru.

Johan Tehuayo juga menekankan bahwa elektabilitas Murad Ismail masih tinggi dibandingkan dengan figur-figur lain di Maluku.

Selain PAN, partai lain seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) juga memiliki peluang memberikan rekomendasi kepada Murad sebagai calon gubernur.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagai partai Islam dan nasionalis, juga

Murad yang tidak lagi memimpin PDIP, Said khawatir ego-ego faksi akan kembali muncul dan dapat merugikan partai.

Selain itu, kepergian Murad dan Widya dari PDIP berarti bahwa suara dari basis pemilih Muslim juga akan hilang. Ini memungkinkan partai-partai politik lain, terutama Golkar, untuk mendapatkan dukungan lebih besar dalam Pemilu 2024.

"Golkar, yang merupakan pesaing terdekat PDIP di Maluku, memiliki peluang untuk memanfaatkan situasi ini untuk memaksimalkan dukungan dan meraih kembali kursi di DPR RI, kursi Gubernur Maluku, serta kursi Bupati dan Walikota," pungkasnya. • IRY

SEKOLAH DAN BEROBAT GRATIS JADI PRIORITAS UTAMA

**Nama Bupati Penukal
Abab Lematang Ilir (PALI)
Heri Amalindo semakin
kuat mendedikasikan diri
sebagai Calon Gubernur
dalam Pemilihan Guber-
nur (Pilgub) Sumsel 2024.**

Heri Amalindo yang merupakan kader PDIP ini bahkan secara nyata menyampaikan program-program yang akan dijalani jika mampu menggeser gubernur Sumsel Herman Deru yang juga kembali maju dalam Pilgub Sumsel 2024.

“Menjadikan Sumsel mercusuar yang terpenting adalah sinergi dari 17 Kabupaten/Kota. Namun, jika tidak ada sinergi maka tidak akan mendapatkan hasil sempurna,” tegasnya.

Tanpa mengecilkan pembangunan lima tahun terakhir, dirinya ikut prihatin dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu, Heri Amalindo berpendapat bahwa Sumsel membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki visi untuk masa depan.

“Tidak bermaksud mengecilkan hasil pembangunan lima tahun terakhir, tapi saya khawatir dengan kondisi Sumsel saat ini. Jadi, Sumsel memang membutuhkan seorang

pemimpin yang membawa visi masa depan,” jelasnya.

Heri Amalindo yakin memiliki kapasitas untuk meneruskan kejayaan Sumsel seperti yang dicapai oleh Gubernur Alex Noerdin. Pada masa itu, Sumsel menjadi pusat olahraga, budaya, pariwisata, perdagangan, dan industri dan dikenal baik di Indonesia maupun internasional.

Dia memiliki tekad untuk mengoptimalkan kembali Kawasan Gelora Sriwijaya Jakabaring (GSJ) melalui tata kelola dan manajemen yang profesional. Tujuannya adalah agar GSJ dapat menjadi tuan rumah berbagai acara, termasuk pariwisata olahraga di wilayah tersebut.

“GSJ ke depannya tidak hanya sekadar bangunan yang terbengkalai, namun, dari sana haruslah muncul atlet-atlet berprestasi yang dapat mengangkat nama baik Sumatera Selatan di tingkat nasional, bahkan membawa citra Indonesia di mata du-



nia," ungkapnya.

Heri Amalindo, selaku Ketua ICMI Orwil Sumsel, pernah menjabat sebagai Kepala Dinas PU Bina Marga baik di Kabupaten Muba maupun di Pemprov Sumsel. Hal ini membuatnya sangat akrab dengan cara kerja Alex Noerdin pada masa pemerintahannya.

Salah satu fokus utamanya adalah mengembalikan program berobat dan sekolah gratis. Hasil survei menunjukkan bahwa sekitar 69 persen masyarakat masih menginginkan program ini.

"Dari banyaknya survei yang kita lakukan, nyatanya untuk sekolah dan berobat gratis masih menjadi harapan masyarakat," jelasnya.

Selain itu, ia berencana untuk mengatur ulang regulasi terkait program berobat dan sekolah gratis, sehingga masyarakat miskin dapat tercakup oleh program BPJS tanpa perlu membayar setiap bulan.

"Saya juga menyoroti perlunya mengatur regulasi untuk berobat dan sekolah gratis, seperti membayar BPJS kelas III untuk masyarakat miskin agar mereka tercakup oleh layanan kesehatan," jelasnya.

Program ini diharapkan dapat direalisasikan melalui penganggaran yang terukur dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota serta pakar-pakar pendidikan dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Selatan.

"Program sekolah gratis adalah hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, sesuai dengan Amandemen Undang-Undang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh," tambahnya.

Sedangkan dalam program infrastruktur berkelanjutan, terutama dalam bidang jalan dan jembatan, Heri Amalindo memiliki pengetahuan mendalam tentang infrastruktur ini.

Oleh karena itu, program-program yang berfokus pada sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat mengatasi masalah dengan pemberian pupuk gratis.

Sementara yang ikut menjadi sorotan adalah mangkraknya pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat yang diwacanakan oleh Gubernur Sumsel

Herman Deru. Dijelaskan Heri Amalindo, pembangunan Tanjung Carat itu tidak masuk dalam daftar program strategis nasional.

Sehingga, jika dirinya menjadi Gubernur Sumsel maka akan mengembalikan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat tersebut dalam program strategis nasional.

"Ya makanya jadi Gubernur dulu, baru bisa tahu apa yang sedang terjadi dan akan mengembalikan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat jadi program strategis nasional." Beberanya.

Heri Amalindo telah menerima masukan dan saran dari berbagai tokoh Sumsel. Dia menyoroti fakta bahwa Sumsel, meskipun termasuk provinsi terkaya nomor 5, dikategorikan seba-

lain yang membutuhkan perhatian serius dari Pemprov Sumsel, termasuk mengembalikan kejayaan Sriwijaya FC dengan memanfaatkan fasilitas olahraga yang sudah ada secara maksimal.

Ketua Tim Pemenangan Heri Amalindo (TPHA), Firdaus Hasbullah SH menyampaikan setidaknya ada tiga program kerja yang diungkapkan dalam pertemuannya dengan kepala desa beberapa waktu lalu.

Salah satu program yang diungkapkan adalah sekolah dan berobat gratis. Menurut Firdaus Hasbullah, Sekolah dan Berobat Gratis menjadi prioritas utama dalam pembangunan.

Dia menyatakan bahwa program ini dapat direalisasikan di masa depan dengan skema pengangga-



gai provinsi termiskin nomor 10. Hal ini perlu ditangani melalui program-program yang langsung menyentuh masyarakat, terutama di sektor pertanian.

Sebagai Bupati PALI dua periode, Heri Amalindo dianggap memiliki pemahaman yang baik mengenai kekurangan dan kelebihan arah kebijakan pembangunan.

Kemajuan Sumsel bukan sekadar slogan, melainkan harus diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Program pariwisata Sumsel dan isu

ran yang terukur dan melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta pakar-pakar pendidikan dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Selatan.

"Sekolah gratis merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, sebagaimana yang tercantum dalam Amandemen Undang-Undang Pasal 31 BAB XIII, yang bertujuan untuk memanusiakan manusia secara keseluruhan," pungkasnya.

Dia menekankan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang layak. •IRY

CALON PEMIMPIN MUDA SIAP KEMBALIKAN KEJAYAAN PAPUA

Selain mengusung Kamasan Jakobus Komboy alias Jack Komboy sebagai Calon Wali Kota Jayapura, Partai Hanura juga akan mendukung salah satu kader terbaiknya, Kenius Kogoya sebagai Calon Gubernur (Cagub) Papua periode 2024-2029 pada Pilkada 2024.

Keputusan ini diumumkan oleh Koordinator Wilayah VIII DPP Partai Hanura, Yulianus Dwaa, yang mewakili DPP Partai Hanura sebagai Korwil VIII Papua dan Papua Barat.

Yulianus Dwaa menyatakan bahwa Partai Hanura saat ini memiliki tiga kursi di DPR Papua, dengan 2 kursi dari daerah pemilihan Tabi Saereri dan 1 kursi dari daerah pemilihan yang kini telah menjadi provinsi baru, yaitu Provinsi Papua Pegunungan Papua.

"Kami memiliki dua kursi di Provinsi Papua ini. Artinya kami ingin mengembalikan kejayaan kami di DPR Papua, dan itulah alasan kami mendukung saudara Kenius Kogoya sebagai Calon Gubernur Papua periode 2024-

2029," ujarnya.

Keputusan ini disambut dengan antusiasme oleh para calon legislatif dan kader Partai Hanura.

Yulianus Dwaa menjelaskan bahwa Partai Hanura selalu memberikan prioritas pada kader-kadernya dalam setiap momentum politik, seperti yang selalu diungkapkan oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura.

Dia menekankan bahwa situasi saat ini, dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pileg dijadwalkan pada Februari 2024 dan Pilkada pada September 2024, memberikan kesempatan yang tepat untuk mempersiapkan diri secara simultan.

"Dengan mengumumkan figur

Cagub dan Calon Wali Kota Jayapura, Partai Hanura ingin memberikan gambaran kepada publik tentang arah dan pemimpin yang akan mereka dukung pada Pemilu 2024," jelasnya.

Dia juga mencatat bahwa Partai Hanura sebelumnya telah mendukung kepala daerah di luar kader partai, yang pada akhirnya bergabung dengan partai lain setelah menang dalam Pilkada.

Oleh karena itu, Partai Hanura ingin mengusung kader-kadernya sendiri sebagai Calon Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk memperkuat posisinya di wilayah-wilayah tersebut.

Sebagai Ketua DPD Partai Hanura Papua, Ketum KONI Papua, dan Ketua DPD Relawan Jokowi Provinsi Papua, Kenius Kogoya dianggap sebagai sosok yang memiliki visi yang kuat.

Kenius Kogoya telah berhasil mengubah Partai Hanura Papua menjadi partai yang modern dan mewakili kaum muda Papua dengan baik, persiapan yang sangat tepat untuk menyambut era baru Papua pada tahun 2024.

Prestasi penting lainnya yang dicapai oleh Kenius Kogoya adalah ketika ia masih menjabat sebagai Sekretaris Umum KONI Papua. Di bawah kepemimpinannya, penyelenggaraan PON XX Papua menjadi sukses dengan pencapaian prestasi yang mengagumkan dan penyelenggaraan yang lancar.

"Kenius Kogoya bukan hanya berhasil membawa Papua ke peringkat empat besar nasional dalam perolehan medali, tetapi juga berhasil mewujudkan berb-



agai pembangunan sarana olahraga di Papua yang memenuhi standar internasional,"tambahnya.

Ini adalah langkah penting dalam memajukan olahraga di wilayah ini dan memberikan kesempatan kepada atlet Papua untuk bersaing secara kompetitif di tingkat nasional dan internasional.

Sejarah akan selalu mengingat prestasi luar biasa Kenius Kogoya, seorang putra asli Papua, yang berhasil menjadi pemimpin lokal yang mampu mengor-

tepat menggantikan Lukas Enembe, karena seorang pemimpin muda yang telah teruji dan terlatih di bawah alam Papua dan telah sukses dalam memimpin berbagai event penting.

Kenius Kogoya adalah seorang pemimpin muda sejati yang tumbuh dari masyarakat Papua dan berjuang dari awal. Ia adalah sosok religius, rendah hati, cerdas, visioner, peduli, dan pekerja keras.

Selama memimpin DPD Hanura Provinsi Papua, ia telah banyak me-

memimpin KONI Papua untuk memajukan olahraga dan pembinaan atlet di Papua.

Banyak tokoh masyarakat dan pengamat politik memprediksi bahwa Kenius Kogoya akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua pada tahun 2024.

Ini adalah langkah yang tepat mengingat peran penting Papua sebagai Provinsi Olahraga, yang memerlukan pemimpin yang memahami olahraga



ganisir dan menyelenggarakan sebuah acara olahraga nasional dengan begitu baik.

"Ia adalah contoh yang membanggakan bagi generasi Papua yang akan datang dan merupakan sosok yang inspiratif bagi semua orang yang peduli terhadap kemajuan Papua,"ulasnya.

Pada tahun 2024, Papua akan memasuki era modern dan maju dalam berbagai bidang. Untuk meneruskan pembangunan Papua ke arah yang lebih baik, diperlukan seorang pemimpin muda yang memiliki semangat kerja keras, visi, dan kinerja terbukti.

Kenius Kogoya dinilai orang yang

nyelenggarakan kegiatan sosial, seni budaya, dan berbagai perlombaan untuk kaum muda Papua.

Papua telah ditetapkan sebagai Provinsi Olahraga oleh Gubernur Provinsi Papua dengan persetujuan Kemempora dan Presiden RI. Ini adalah program kerja yang sangat penting yang akan menghasilkan atlet berkelas nasional dan internasional dari Papua.

Kenius Kogoya bertanggung jawab atas pelaksanaan program ini sebagai Ketua Umum KONI Papua, yang baru-baru ini terpilih secara aklamasi untuk menggantikan Lukas Enembe.

Kemampuan Kenius Kogoya dalam

dan memiliki kinerja terbukti dalam memajukan olahraga di tanah Papua.

Sementara, Kenius Kogoya yang diusulkan sebagai Cagub Papua, menyambut pengusulan ini sebagai perintah dari partai dan bersedia menjalankannya.

Dia mengatakan bahwa saat ini fokusnya adalah maju sebagai Calon Anggota DPR RI, tetapi jika partai menunjuknya sebagai Cagub, ia akan menjalankan tugas tersebut sebagai kader partai.

"Saya akan menjalankan tugas sebagai kader sesuai arahan partai," ungkapnya. •IRY

KAESANG NGAREP JADI GUBERNUR JATENG

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep disebut-sebut bakal maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah (Jateng) pada Pilkada 2024 mendatang.

Hanya saja, Kaesang menolak memberikan jawaban terkait pernyataannya yang menyebut kesiapannya maju sebagai Calon Gubernur (Cagub) Jateng pada Pilgub Jateng 2024.

Saat diwawancarai dalam acara "Ngopi Santuy Bersama Influencer dan Komunitas Milenial" di Burjocok Semarang pada Senin 18 Desember 2023, Kaesang memilih bungkam dan fokus melayani permintaan swafoto dari warga yang hadir.

Meskipun sehari sebelumnya, dalam acara "Car Free Day Bersama Relawan Plat K untuk Generasi Optimis" di Jepara pada Minggu 17 Desember 2023, Kaesang terlihat percaya diri ketika ditanya oleh panitia acara apakah ia bersedia maju sebagai calon gubernur Jateng.

"Yo, mboten nopo-nopo (Ya, tidak apa-apa),"katanya.

Sebelumnya, Kaesang telah melakukan safari politik ke berbagai daerah, termasuk Medan, Kupang, Manado, beberapa daerah di Jawa, dan Jakarta.

Pada September 2023, Kaesang resmi bergabung dengan PSI, dan hanya dua hari setelahnya, tepatnya pada 25 September 2023, ia diangkat men-

jadi Ketua Umum PSI.

Ketika ditanya apakah dirinya memiliki potensi untuk maju sebagai kandidat Cagub, Kaesang enggan memberikan jawaban pasti. Ia menyatakan bahwa masih menunggu perkembangan politik yang akan terjadi ke depan.

"Pilkada masih cukup jauh, masih bulan September nanti. Kita akan melihat situasi dengan santai," tambahnya.

Selain itu, Kaesang juga menyebutkan bahwa akan sulit baginya untuk maju dalam Pilkada karena saat ini usianya masih 28 tahun. Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tahun 2020, syarat usia calon gubernur adalah 30 tahun.

Sebelumnya pula, Kaesang turun ke jalan Jakarta tak lama setelah resmi dilantik sebagai Ketua Umum PSI. Ia khusus berjalan-jalan di kawasan Waduk Pluit, Penjarin-gan, Jakarta Utara.

Menurut Kaesang, kunjungan dadakan ini merupakan upayanya memahami kondisi

masyarakat saat ini.

"Salah satu cara saya memahami keadaan di masyarakat," kata Kaesang.

Istri Kaesang, Erina Gudono, juga menyatakan dukungannya terhadap Kaesang jika dia terpilih menjadi gubernur. Erina menyatakan dukungannya dari berbagai aspek.

"Didukung dari segala aspek, doa, dukungan moral, dan saran-saran positif untuk Mas Kaesang," jawab Erina.

Namun, bagaimana sikap PSI terkait peluang tersebut? Wakil Ketua Dewan PSI, Grace Natalie, menjawab pertanyaan tentang rencana mengusung Kaesang sebagai calon gubernur.

"Hingga saat ini, fokus kami (PSI) adalah Pilpres dan Pileg terlebih dahulu," kata Grace.

Grace memuji kepemimpinan Kaesang, mengakui ide-ide kreatif dan inovatif yang dimilikinya. Menurut Grace, keikutsertaan Kaesang dalam pelayanan publik dapat dianggap sebagai suatu hal positif.

"Mas Kaesang memiliki kepemimpinan yang kuat, ide-ide kreatif yang segar, dan inovatif. Bagus jika Mas Kaesang jadi gubernur."



sang ke depan lebih terlibat dalam pelayanan di sektor publik,” ucap Grace.

“Di lanskap politik kita saat ini, kehadiran anak-anak muda masih menjadi hal yang langka,” tambahnya.

Calon presiden (capres) Republik Indonesia nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memberikan tanggapan terhadap pernyataan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, yang menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pilgub Jateng 2024.

Menurut Ganjar, yang juga merupakan mantan Gubernur Jateng dalam dua periode sebelumnya, pernyataan Kaesang tersebut dinilai sebagai hal yang menarik.

“Bagus, ikuti aja, menarik itu,” kata Ganjar sambil tertawa, saat kunjungannya ke Wonosobo, Jawa Tengah, pada Senin (18/12/2023).

Sebelumnya, PSI juga mengincar peluang untuk mencalonkan Kaesang sebagai calon gubernur dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Dalam Pemilu 2024, PSI memiliki target yang ambisius, terutama setelah menunjuk Kaesang, putra Jokowi, sebagai Ketua Umum, meski ia baru bergabung dua hari sebelumnya.

Target ambisius ini ditetapkan PSI dengan tujuan dapat mencalonkan calon dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Ketua DPW PSI, Elva Qolbina menyatakan bahwa target 2 juta suara dalam Pemilu 2024 diharapkan dapat memungkinkan PSI untuk mengusung pasangan Cagub dan wakil gubernur dalam Pemilihan Gubernur DKI 2024.

“Target kolektif PSI Jakarta saat ini tidak lagi bergantung pada hasil suara Pemilu 2019, tetapi berdasarkan persyaratan KPU untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur.”

Sementara, pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Wahid Abdulrahman menilai pernyataan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep itu soal pencalonan gubernur Jateng merupakan upaya mengukur elektabilitasnya dan memperkuat basis massa partai dengan lambang mawar di Jateng.

“Seperti mengecek suara dan konsolidasi internal PSI. Bagaimanapun,

dia ingin memperluas (basis massa) di Jateng karena pentingnya perolehan suara nasional. Apalagi Solo (salah satu daerah di Jateng) adalah (Kaesang) miliknya, tempat lahirnya,” kata Wahid, Senin (18/12/2023).

Wahid juga menilai pernyataan Kaesang bertujuan untuk mendongkrak elektabilitas calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang diusung PSI.



Kaesang dinilai ingin melihat langsung bagaimana pandangan masyarakat di Jateng terhadap kapasitas PSI serta calon presiden dan wakil presidennya.

“Di pertarungan Jateng kita tahu ada Ganjar dan Prabowo. Pernyataan Kaesang itu sound check, terkait penerimaan masyarakat terhadap dia (Kaesang) untuk beberapa momen ke depan, termasuk Pilgub,” lanjutnya.

Oleh karena itu, jika PSI berhasil pada Pilpres dan Legislatif 2024 mendatang, bukan tidak mungkin Kaesang akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Jateng. Dengan kemenangan tersebut, akan sedikit mengubah pengalaman politik Kaesang yang dinilai banyak pihak relatif belum berpengalaman.

“Ini (Pilpres dan Pileg 2024) ujian buat Mas Kaesang. Kalau bisa membawa PSI lebih baik lagi, niscaya dia akan semakin percaya diri. Maka per-

soalan dinasti politik, masuknya tokoh-tokoh baru ke dunia politik akan terjawab. Seiring berjalannya waktu, kalau Pileg dan Pilpres berhasil, bukan tidak mungkin pilgub bisa terulang kembali,” jelasnya.

Wahid menambahkan, sejak Kaesang menjadi Ketua, PSI semakin populer di masyarakat. Meski belum diketahui sejauh mana popularitas tersebut, apakah memang masyarakat memilih PSI.

Sementara itu, pengamat politik Undip lainnya, Nur Hidayat Sardini, berpendapat berbeda. Ia menilai masih terlalu dini untuk memprediksi niat Kaesang mencalonkan diri sebagai gubernur pada Pilkada 2024.

“Belum bisa terbaca. Tapi normalnya setiap orang berhak mencalonkan atau mencalonkan diri. Dalam hal ini dia hanya menguji kemungkinan-kemungkinan saja,” penilaian Hidayat.

Hidayat juga menilai, tidak menutup kemungkinan Kaesang mencalonkan diri sebagai gubernur pada 2024, meski di tengah kontroversi seputar kenaikan pesat jabatannya sebagai ketua umum partai.

“Kalau syarat finansial untuk pencalonan terpenuhi, secara normatif bisa. Karena dijamin undang-undang. Apapun latar belakang dan status sosialnya, seharusnya tidak menjadi masalah,” tutupnya. •IRY

ERICK THOHIR PALING PANTAS JADI GUBERNUR DKI JAKARTA

Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, persaingan di bursa calon gubernur (Cagub) DKI Jakarta semakin memanas.

Pilkada DKI diprediksi akan menjadi panggung pertempuran bagi elit politik nasional yang tidak berhasil mendapatkan tiket dalam Pemilihan Presiden 2024.

Nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menempati posisi yang sangat kuat dalam hasil survei sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Dalam survei yang dilakukan oleh CSIS baru-baru ini, nama Erick menduduki peringkat kedua dalam daftar kandidat yang mungkin akan menjadi pemimpin Jakarta, dengan elektabilitas mencapai 6,99 persen.

Survei CSIS menunjukkan bahwa responden menganggap Erick Thohir memiliki kapabilitas yang diperlukan untuk memimpin Jakarta di masa mendatang.

Sebagai informasi tambahan, survei ini juga menunjukkan bahwa Jakarta akan kehilangan statusnya sebagai Ibu Kota Negara.

Prestasi Erick Thohir hanya

sedikit kalah dari mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang menduduki peringkat pertama dengan elektabilitas sebesar 7,11 persen.

"Peringkat pertama dengan elektabilitas sebesar 7,11 persen di duduki oleh mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil lalu disusul oleh Erick Thohir pada posisi kedua dengan elektabilitas mencapai 6,99 persen," tulis hasil survei tersebut.

Sementara itu, beberapa nama lainnya yang muncul

dalam survei ini termasuk Menteri Sosial Tri Rismaharini di peringkat ketiga dengan elektabilitas 6,78 persen, Menparekraf Sandiaga Uno dengan elektabilitas 6,76 persen, dan Emil Dardak dengan elektabilitas 6,20 persen.

Survei yang melibatkan 170 responden dari berbagai bidang keahlian, seperti sosial, politik, dan ekonomi, menguji 10 tokoh yang dianggap memiliki kualitas untuk memimpin DKI Jakarta.

Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, termasuk kemampuan memimpin dalam situasi krisis, kemampuan untuk melakukan perubahan, keterampilan dalam menggerakkan birokrasi, dan kemampuan mengelola anggaran dengan tepat.

Selain itu, survei CSIS juga menyoroti kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Ahmad Riza Patria.

Tingkat kepuasan terhadap kinerja Anies-Riza Patria dalam survei ini mencapai 47,6 persen, sementara sebanyak 51,8



persen responden yang merupakan para ahli menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja keduanya.

Bukan hanya nama Erick Thohir yang makin mencuat, tokoh lain yang juga layak dipertimbangkan adalah politikus Golkar dan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil serta Kaesang Pangarep, putra bungsu dari Presiden Joko Widodo.

Pengamat politik, Jamiluddin Ritonga menyatakan, bahwa di antara ketiga nama tersebut, Erick Thohir dan Ridwan Kamil dinilai memiliki kapasitas yang memadai untuk bersaing sebagai Cagub DKI. Menurutnya, keduanya telah menjadi tokoh nasional yang sangat dihormati, memiliki kapasitas yang sebanding, dan telah memiliki pengalaman dalam dunia pemerintahan.

"Kapasitas Erick Thohir dan Ridwan Kamil sangat memadai untuk bersaing sebagai Cagub DKI Jakarta, keduanya telah menjadi tokoh nasional yang sangat dihormati, memiliki kapasitas yang sebanding dan telah memiliki pengalaman dalam dunia pemerintahan," jelasnya.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul itu menyoroti bahwa baik Erick maupun Ridwan Kamil memiliki rekam jejak yang lebih solid dibandingkan Kaesang, yang baru saja terjun ke dunia politik dan dianggap belum memiliki pengalaman yang cukup untuk menjadi Cagub DKI Jakarta.

"Baik Erick Thohir maupun Ridwan Kamil telah memiliki rekam jejak yang lebih solid ketimbang Kaesang yang baru saja terjun ke dunia politik dan dianggap belum memiliki pengalaman yang cukup untuk menjadi Cagub DKI Jakarta," ungkapnya.

Meskipun begitu, Jamiluddin menekankan bahwa kekuatan militan pendukung Presiden Jokowi dapat menjadi modal bagi Kaesang dalam bersaing dengan Erick dan Ridwan Kamil. Ia meramalkan bahwa persaingan di Pilkada DKI tetap akan sengit.

"Persaingan di Pilkada DKI Jakarta akan tetap sengit, Kaesang memiliki modal untuk bersaing dengan Erick Thohir dan Ridwan Kamil dari kekuatan militan pendukung Presiden Jokowi," katanya.

Jamiluddin juga memproyeksikan bahwa sosok calon wakil gubernur (cawagub) dari masing-masing tokoh akan menjadi faktor penentu yang membedakan. Ia menyatakan bahwa siapapun yang memenangkan Pilkada, perolehan suara tidak akan jauh berbeda, dan pemilihan wakil gubernur dapat menjadi penentu kemenangan.

"Dalam hal ini, pemilihan calon wakil gubernur juga menjadi faktor penentu yang membedakan. Perolehan suara

ya dan Erick Thohir lebih cocok untuk tetap menjabat sebagai Menteri BUMN, mengurus bisang ekonomi di tingkat nasional. Sedangkan Kaesang sebaiknya bersaing di tingkat kota maupun kabupaten, seperti dalam Pilkada Kota Depok," pungkasnya.

Erick Thohir baru-baru ini menggelar pertemuan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, seperti diungkapkan melalui akun Instagram pribadinya.



tidak akan jauh berbeda dan pemilihan wakil dapat jadi penentu kemenangan," bebernya.

Meskipun memberi sedikit keunggulan kepada Ridwan Kamil karena pengalaman luasnya sebagai kepala daerah di Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat, Jamiluddin berpendapat bahwa Erick Thohir lebih cocok untuk tetap menjabat sebagai Menteri BUMN, mengurus bidang ekonomi di tingkat nasional.

Terakhir, mengenai Kaesang, Jamiluddin menyarankan agar Ketua Umum PSI tersebut lebih dulu bersaing di tingkat kota atau kabupaten, seperti dalam Pilkada Kota Depok.

"Ada sedikit keunggulan bagi Ridwan Kamil karena pengalaman luas-

Dalam postingan yang diunggah, Erick Thohir mengungkapkan maksud pertemuannya dengan Ridwan Kamil adalah merencanakan sesuatu yang bermanfaat bagi Indonesia.

Di samping captionnya, Erick Thohir juga membagikan foto pertemuan mereka yang menampilkan mereka sedang berjabat tangan.

"Saat ini sedang merencanakan sesuatu yang baik untuk Indonesia bersama Pak Ridwan Kamil," tulis Erick.

Pertemuan Erick Thohir dan Ridwan Kamil pun seperti memberi isyarat bahwa dirinya benar-benar akan maju dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2024 bersama Ridwan Kamil sebagai rival. • IRY



SINERGI KEMENDAGRI-BAPPENAS MENUJU INDONESIA EMAS

Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang penyetaraan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Penandatanganan SEB dilakukan secara langsung oleh Mendagri Muhammad, Tito Karnavian, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024.

Mendagri mengatakan, penandatanganan SEB kali ini memiliki nilai strategis yang sangat panjang sampai 2045. Dokumen RPJPN dan RPJPD nantinya akan menjadi 'kitab suci' atau pegangan pemerintahan selama 20 tahun. Seluruh perangkat pemerintahan dan stakeholder yang terlibat meletakkan fondasi dasar terkait akan dibawa ke mana Bangsa Indonesia 20 tahun ke depan.

"Kita sudah harus mencanangkan rencana jangka panjang 2025-2045. Jadi, 20 tahun ke depan ini yang menjadi pegangan. Kalau dulu ada GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara), tapi dengan diusulkan sudah diubah, sehingga tidak ada GBHN dan yang berlaku adalah rencana pembangunan jangka panjang yang dibentuk nanti dari produk undang-undang," katanya.

Mendagri mengatakan, kepala daerah baik yang definitif maupun penjabat

bertanggung jawab menuntaskan RPJPD di daerah masing-masing. Dalam pembuatan RPJPD, daerah harus mengacu pada RPJPN dengan kolaborasi bersama stakeholder terkait di tingkat pusat. Dirinya meminta pemerintah daerah segera membentuk tim untuk menyusun dan menyelesaikannya.

"Rekan-rekan di daerah juga setelah ini harus membentuk tim dan peran gubernur lebih penting lagi karena gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Maka, gubernur, sekda provinsi, kepala bappeda provinsi, inspektur tingkat provinsi, ini akan memberikan guidelines memberikan evalu-



asi RPJPD di tingkat kabupaten/kota," ungkapnya.

Mendagri juga mengatakan, peta RPJPD dan RPJPN 2025-2045 akan menjadi jalan untuk menuju cita-cita Indonesia Emas 2045. Mendagri mengungkapkan, Indonesia Emas tidak hanya terkait usia 100 tahun, tetapi juga Indonesia bisa menjadi negara yang betul-betul berkembang dengan pendapatan per kapita yang tinggi.

"Nah, ini semua (RPJPD dan RPJPN) untuk mewujudkan itu, konsepnya, peta jalannya adalah pada RPJP, makanya RPJP tidak boleh salah. RPJP kita harus trayektorinya mengarah kepada fast way, jalan menuju itu, menuju dengan pendapatan per kapita itu," katanya.

Mendagri menjelaskan, berbagai survei internasional seperti dari World Bank dan McKinsey memprediksi bahwa Indonesia pada 2040-2045 akan menjadi negara lima besar ekonomi terbesar di dunia. Indonesia akan bersanding dengan negara-negara seperti China, India, dan Amerika Serikat. Apalagi, Indonesia mempunyai tiga modal utama untuk mewujudkannya, yaitu angkatan kerja yang besar, sumber daya alam yang melimpah, dan bentangan wilayah yang luas.

"Apa yang disebut dengan Indonesia Emas bukan hanya 100 tahunnya, tapi Indonesia yang betul-betul bisa menjadi negara the largest country, karena kita sudah middle up income country. Mudah-mudahan kita nanti menjadi negara yang betul-betul berkembang dengan pendapatan per kapita yang tinggi," terangnya.

Demi terciptanya Indonesia Emas tersebut, Mendagri kembali menekankan perlunya RPJPN dan RPJPD yang matang dan selaras. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam pembuatannya. Selain itu, daerah juga bisa menyesuaikan penyusunan RPJPD dengan memperhatikan kondisi lokal dan potensi wilayah masing-masing. Kemendagri dan Bappenas nantinya juga akan tetap melakukan pendampingan pada daerah ketika mengalami kendala.

"Kita akan mendampingi supaya RPJP jangan dibuat asal-asalan, tapi

betul menjadi pegangan untuk menyusun RPJMN 5 tahunan yang juga nanti dipecah menjadi pegangan untuk rencana kerja pemerintah daerah setiap tahun untuk menuju jalur yang sama, menuju Indonesia Emas 2045," tegasnya.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menambahkan, RPJP baik di daerah maupun nasional bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga milik seluruh Bangsa Indonesia. RPJP memiliki makna penting bagi pencapaian visi-misi Indonesia yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Diharapkan di dalam pembuatannya dilakukan secara jelas dan terukur dengan tetap memperhatikan keragaman dan karakteristik khas daerah masing-

menciptakan integrasi, keselarasan, konsistensi, dan sinergi antardokumen perencanaan pembangunan jangka panjang di tingkat pusat dan daerah.

Selain itu, penyelarasan dalam rangka memastikan ruang yang memadai bagi pemda provinsi untuk merencanakan dan menjalankan pembangunan sesuai prioritas pembangunan dan otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Adapun sasaran yang diharapkan dari penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045 adalah tersusunnya dokumen RPJPD yang berkualitas dan selaras dengan RPJPN 2025-2045.

Adapun empat sasaran dalam RPJPN 2025-2045 yakni pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan



masing.

"Rancangan ini merupakan manifestasi dari visi Indonesia untuk menjadi negara Nusantara yang berdaulat, adil, dan berkelanjutan dalam kerangka Indonesia Emas 2045. Rencana Pembangunan Jangka Panjang merupakan pedoman untuk semua pemangku kepentingan, dan dapat menjadi arahan bagi seluruh unsur masyarakat," jelas Suharso.

Adapun penyelarasan RPJPD dan RPJPN 2025-2045 di antaranya memiliki maksud untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, melalui pencapaian tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Berikutnya

berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, serta daya saing sumber daya manusia meningkat.

Selanjutnya, terdapat delapan agenda pembangunan dalam RPJPN 2025-2045, yakni mewujudkan transformasi sosial; mewujudkan transformasi ekonomi; mewujudkan transformasi tata kelola; memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi; mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; serta mewujudkan kesinambungan pembangunan. •

TALENTA MUDA INDONESIA BAGIAN SEMANGAT REFORMASI BIROKRASI

Pemerintah mengumumkan pembukaan seleksi calon aparatur sipil negara atau ASN yang jumlahnya mencapai 2,3 juta formasi. Pengumuman disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Pemerintah mengumumkan pembukaan seleksi calon aparatur sipil negara atau ASN yang jumlahnya mencapai 2,3 juta formasi. Pengumuman disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

"ASN kini disiapkan untuk menghadapi disrupsi teknologi yang semakin

Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas, memberi penjelasan tambahan bahwa tahun ini pemerintah juga memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi, baik untuk dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis termasuk di dalamnya talenta digital, dan banyak sektor penting lainnya.

Usai menghadap Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 5 Januari 2024, Anas merinci, instansi pusat mendapat formasi kebutuhan 429.183 yang terdiri atas 207.247 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 221.936 bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Formasi tersebut merupakan gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Sementara, formasi instansi daerah sebesar 1.867.333 yang terdiri

"Talent-talenta inilah yang menjadi fondasi utama dan pilar terpenting dalam mewujudkan SDM unggul untuk menyambut Indonesia Emas 2045," ungkap mantan Bupati Banyuwangi ini.

Tahun ini, formasi CPNS yang dapat dilamar oleh fresh graduate sebesar 690.822 formasi. Alokasi untuk fresh graduate adalah komitmen negara guna memberikan kesempatan kepada talenta-talenta muda terbaik untuk mendarmabaktikan pikiran dan tenaganya kepada bangsa.

Anas menyampaikan, pemerintah juga memiliki komitmen dan kebijakan konkrit dalam menuntaskan tenaga non-ASN, termasuk eks Tenaga Honorar Kategori II, sebagaimana diamanatkan UU 20/2023 tentang ASN.

"Salah satunya dengan kebijakan konkrit penetapan formasi untuk PPPK yang mencapai 1,6 juta pada tahun ini, yang tentunya ini memberi ruang bagi tenaga non-ASN untuk menjadi PPPK," jelas Anas.

Anas menjelaskan, terkait talenta dosen, guru, dan tenaga kesehatan, pemerintah menekankan bahwa penataan yang dilakukan bukan hanya soal jumlah, tapi juga persebaran. Pemerintah akan berusaha mewujudkan pemerataan ke seluruh penjuru Tanah Air.

Visi besar Indonesia-Sentris yang telah pemerintah jalankan bukan soal pembangunan infrastruktur fisik semata, tetapi juga pembangunan SDM agar daerah-daerah, terutama di luar Jawa, juga mendapatkan talenta unggul di bidang pendidikan dan kesehatan.

"ASN saat ini dan masa depan harus bisa mendorong peningkatan kinerja, akuntabilitas pemerintah, dan pemerataan kualitas pelayanan publik di seluruh Tanah Air, termasuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal," jelas Anas.

"Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh ASN dan tenaga non-ASN, termasuk eks tenaga honorar yang semuanya terus berkolaborasi dan bekerja keras



pesat. Pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu. Penguatan SDM yang terampil ini juga untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital, penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), serta mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional," ungkap Presiden Jokowi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur

atas 483.575 CPNS dan 1.383.758 PPPK. Formasi PPPK di instansi daerah dialokasikan untuk guru sebanyak 419.146, tenaga kesehatan sebesar 417.196, serta 547.416 formasi untuk tenaga teknis. Sedangkan alokasi untuk sekolah kedinasan, tahun ini pemerintah membuka 6.027 formasi. Formasi Instansi daerah lebih besar daripada di instansi pusat karena komposisi ASN memang lebih banyak di daerah.

dalam melayani publik, mendidik anak-anak bangsa, dan menyehatkan warga masyarakat dengan penuh pengabdian," tuturnya.

Seleksi CASN, lanjut Anas, juga fokus untuk menciptakan SDM yang adaptif terhadap teknologi demi kemajuan Indonesia. "Sehingga tahun ini juga disiapkan rekrutmen talenta digital untuk memastikan transformasi pelayanan publik berbasis digital yang sedang dikerjakan pemerintah bisa berjalan dengan baik, dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," terangnya.

Anas menambahkan, pemerintah juga menyiapkan rekrutmen ASN untuk Ibu Kota Negara Nusantara. "ASN di IKN Nusantara akan menjadi pendorong lahirnya kota dunia baru dengan paradigma kerja baru sebagai smart city yang agile, melayani sepenuh hati, dan adaptif terhadap tantangan zaman," tuturnya.

Anas juga memastikan sistem rekrutmen ASN terus diperbaiki untuk memastikan birokrasi diisi oleh talenta yang unggul. Rekrutmen ASN dilakukan dengan menggunakan computer assisted test (CAT) secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Seleksi kompetensi yang dilaksanakan berbasis online, termasuk penggunaan teknologi pengenalan wajah (face recognition), sehingga semua potensi kecurangan bisa ditekan. Nilai seleksi juga secara real time bisa langsung diakses publik, termasuk live score-nya yang juga disiarkan melalui YouTube.

"Sehingga tidak ada lagi titip-titipan, tidak ada intervensi siapa pun, serta tidak ada pengaruh orang dalam. Kelulusan ditentukan oleh kemampuan dari pelamar sendiri. Ini memastikan pemberian kesempatan yang sama bagi semua anak bangsa untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara," tegasnya.

Terkait rekrutmen ASN tahun ini, Kementerian PANRB bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga bergerak cepat untuk membahas kelancaran pelaksanaan pengadaannya.

"Kita harus jemput bola agar pelaksanaan seleksi CASN tahun ini berjalan lancar dan terus semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pagi ini langsung rapat teknis untuk mendetailkan teknis rekrutmen," ujar Anas dalam rapat Tindak Lanjut Pengadaan ASN Tahun 2024 di rumah dinas, Sabtu, 6 Januari 2024.

Anas menyampaikan, pekan depan Kementerian PANRB akan mengadakan pertemuan dengan seluruh ke-

tenaga non-ASN, proyeksi kebutuhan ASN tahun 2024, optimalisasi pengisian ASN, serta alur perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024.

"Kalau kita lihat dari komposisi pegawai kita ini terus berkembang seiring dengan penambahan atau formasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, yang menjadi concern ini adalah bagaimana pemenuhan SDM kita ini dilakukan secara tepat dan sesuai kebutuhan riil," ujarnya



menterian, lembaga, pemerintah daerah termasuk para pengelola kepegawaian di seluruh Indonesia.

"Kita dorong agar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah memanfaatkan alokasi formasi secara baik agar reformasi birokrasi berdampak bisa benar-benar terwujud secara optimal," jelas mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Selanjutnya, Kementerian PANRB juga akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan terkait pembiayaan secara efisien dan efektif. "Setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Kementerian PANRB menetapkan semua detail teknis rekrutmen ASN secara nasional untuk tahun 2024," terangnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputy Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja, menyampaikan arah kebijakan dan urgensi pemenuhan ASN 2024, proyeksi penyelesaian

saa Bimbingan Teknis Persiapan Pengadaan ASN 2024 di Jakarta, Selasa, 9 Januari 2024.

Aba menjelaskan untuk pengusulan kebutuhan ASN tahun ini dijadwalkan akan dibuka sampai dengan 31 Januari 2024. Pengusulan tersebut harus disampaikan kepada Kementerian PANRB melalui aplikasi formasi elektronik (e-formasi).

Terkait jadwal pelaksanaan rekrutmen CASN 2024, Aba menjelaskan direncanakan akan digelar dan jika memungkinkan dapat dilakukan paling banyak 3 kali dalam satu tahun. Untuk tahap pertama, pelaksanaan rekrutmen CASN 2024 yang terdiri dari seleksi CPNS dan PPPK dilaksanakan pada Mei 2024. Untuk tahap pertama diharapkan semua K/L/D dapat memasukkan data dalam platform digital.

"Ini ditargetkan nanti bulan Mei sudah dilakukan tes, dan jika belum masih kosong lagi, masih bisa tes di berikutnya," ungkapnya. ●

DANA DESA MAKIN NYATA MANFAATNYA

Pemanfaatan Dana Desa berhasil membangun dan meningkatkan infrastruktur serta perekonomian masyarakat desa di seluruh Tanah Air. Hingga akhir 2023, melalui Dana Desa berhasil dibangun jalan desa sepanjang 350.775 kilometer, jembatan dengan total sepanjang 1.904.381 kilometer, embung 6.706 unit, dan pasar desa 14.612 unit.

Presiden Joko Widodo menyebut, hingga saat ini, sudah ada Rp539 triliun Dana Desa yang disalurkan ke desa-desa. Jumlah Dana Desa yang telah disalurkan sejak 2015 itu bukanlah angka yang

meninjau Desa Wisata Pagak, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Rabu, 3 Januari 2024.

"Airport niku, gawe airport sedengan ngoten nggih itu Rp2 triliun. La niki berarti dadi kiro-kiro 250 airport gedhe (membangun bandara yang berukuran sedang itu habis Rp2 triliun. Sehingga ini kira-kira bisa membangun 250 bandara besar). Bendungan niku Rp1-1,5 triliun berarti dadi kira-kira 400 bendungan (membangun bendungan itu Rp1-1,5 triliun. Berarti bisa membangun sekitar 400 bendungan). Artinya uang itu gede sekali," kata Presiden.

Lebih lanjut, mengenai pembangunan jalan, Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan jalan desa sudah mencapai 350.000 kilometer. Jalan desa yang telah dibangun di seluruh Tanah Air jauh lebih panjang dibanding pembangunan jalan tol.

"Jalan tol enggak ada apa-apanya, hanya 2.040 kilometer. Sedangkan ja-

pannya dapat digunakan dan dikelola untuk semakin memberikan manfaat bagi masyarakat.

Presiden kembali mengingatkan agar dalam membangun infrastruktur desa, maka seharusnya tidak membeli bahan-bahan bangunan dari luar daerahnya guna menjaga perputaran uang di desa.

"Oleh sebab itu, sering saya ucapkan bolak-balik, beli batu batanya lokal di desa atau paling jauh di kecamatan, jangan diberi anggaran dana desa misalnya Rp1,5 miliar belonjone teng (belanjanya ke) Jakarta. Ketok'e luweh (kayaknya kebih) murah, tapi perputaran uang jadi berpindah dari desa ke Jakarta balik lagi uangnya," tegasnya.

Oleh sebab itu, Presiden mengimbau agar kegiatan perekonomian di sebuah desa dapat mendorong peredaran dan perputaran uang di wilayahnya masing-masing. "Biarkan uang itu beredar meskipun harganya sedikit lebih mahal, tapi uangnya beredar di desa kita," sambungnya.

Jokowi juga berjanji bakal menaikkan dana desa yang akan diterima seluruh desa di Indonesia jika total 75.259 kepala desa mampu mengelolanya dengan baik sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah.

"Dana Desa akan terus ditingkatkan jumlah rupiahnya. Dengan catatan dikelola dengan tata kelola yang baik, akuntabilitasnya baik," kata Presiden Jokowi di Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, Senin, 8 Januari 2024.

Pemerintah secara serius mengawasi pemanfaatan dana desa yang diluncurkan sejak 2015 lalu dengan menggandeng Kementerian/Lembaga terkait, salah satunya Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Semua tindak penyelewengan atau penggunaan dana desa yang menyalahi aturan ditindak secara tegas.

Pemanfaatan Dana Desa dapat berupa infrastruktur fisik maupun upaya meningkatkan kesejahteraan warga sesuai dengan prioritas yang ditetapkan setiap tahunnya sesuai kebutuhan.



kecil jika dibandingkan dengan anggaran sejumlah pembangunan proyek lainnya.

Presiden Jokowi memberi contoh dalam pembangunan bandara hingga bendungan yang memiliki anggaran yang jauh lebih sedikit dibanding Dana Desa. Hal itu disampaikan Jokowi saat

lan desa 350.000 kilometer, karena kita memiliki 74.800 desa di seluruh Tanah Air ini. Kalau 1 desa saja 5 kilometer, berarti kali 74.800 berarti (sekitar) sudah 350 ribu jalan desa," imbuhnya.

Oleh karena itu, Presiden berharap agar penggunaan dana desa ke de-

Sementara itu, Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, mengapresiasi langkah Presiden Jokowi untuk menambah jumlah Dana Desa sekaligus memastikan pemanfaatannya tidak keluar dari prioritas yang ditetapkan.

Menurut Gus Halim, hal ini sekaligus bukti bahwa desa dapat dipercaya untuk mengalokasikan secara langsung dana yang diturunkan pemerintah. "Bagus dan memang sudah lama digulirkan Pak Jokowi untuk menambah dana desa kalau pemanfaatannya bagus," jelas Gus Halim.

"Kita juga perlu menyampaikan apresiasi kepada kepala desa yang selama kepemimpinan Pak Presiden ini mendapat kepercayaan dan kepercayaan ini diwujudkan. Dana Desa yang sudah tersalurkan itu terwujud, ada jalan desa 350.000 km, 14.600 pasar desa, 6.700 embung, ada jembatan juga," imbuhnya.



Dana Desa akan terus ditingkatkan jumlah rupiahnya. Dengan catatan dikelola dengan tata kelola yang baik, akuntabilitasnya baik.

Di sisi lain, Gus Halim juga menyatakan tugas pendamping desa yang sudah mandiri fokus kepada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). "Tugas tenaga pendamping juga semakin berat dan semakin fokus jika sudah masuk desa mandiri," kata dia.

Gus Halim mengatakan, tugas pendamping desa itu relatif ringan jika desa itu masih kategori tertinggal. Tapi, jika masuk kategori mandiri, maka tugas pendamping menjadi semakin berat.

"Ketika desa sudah mandiri, maka yang menjadi fokusnya hanya dua, yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia," kata Profesor Kehormatan UNESA ini.

Dia mencontohkan, pengelolaan desa wisata, ketahanan pangan dan berbagai hal yang dilakukan kepala desa dan warga Desa Pagak arahnya yaitu pertumbuhan ekonomi semakin kokoh dan pasti terjadi peningkatan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Jika ekonomi bagus, maka tingkat kepesertaan pendidikan juga semakin tinggi.

Gus Halim menyakini jika ekonomi bagus dan sumber daya manusia (SDM) baik, maka bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

"Jika desa sejahtera, maka Indonesia juga sejahtera. Hal itu karena 71 persen penduduk di Indonesia berada di desa,

"Kalau kesehatan dan pendidikan tidak baik akan repot. Itu perlu diantisipasi dengan Dana Desa," ujar Sofyan di Jakarta, Selasa, 9 Januari 2024.

Menurutnya, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir relatif cukup, pemerintah harus melihat variabel-variabel pembangunan lain seperti pelayanan dasar.

"Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat bisa mengakses lima bidang kesejahteraan rakyat, di antaranya bidang sandang, pangan, dan papan, serta bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Pelayanan dasar harus menjadi sorotan penting kalau kita ingin memperbaiki negara,"



dan 90 persen wilayah itu ada di desa," ungkapnya.

Dia juga mengingatkan, kunci keberlanjutan desa wisata itu adalah kebersihan dan keramahtamahan. "Jangan orang tidak mau lagi ke desa wisata karena toilet kotor dan warga desa tidak ramah. Jadi pendamping desa kalau ke desa wisata, pertama yang dicek adalah toilet dan keramahtamahan warga sehingga pengunjung betah," tegasnya.

Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Sofyan Sjaf, menilai penggunaan Dana Desa ke depan harus berfokus pada kesehatan dan pendidikan agar dapat memaksimalkan bonus demografi.

kata Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB itu.

Maka itu, kata dia, pembangunan data yang akurat sangat penting dalam penggunaan Dana Desa agar maksimal dalam menyambut bonus demografi, sehingga tidak masuk dalam jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Apalagi, pemerintah akan menambah nilai Dana Desa guna mendorong pembangunan desa.

"Penambahan Dana Desa memang dibutuhkan. Maka yang terpenting dilakukan adalah menyediakan data presisi, data akurat bagi siapa yang menjadi sasaran bagi pembangunan desa. Substansi pembangunan itu menyorot pada subjek manusianya," tuturnya. ●

TETAP OPTIMISTIS DAN WASPADA SAMBUT TAHUN BARU 2024

**Menteri Perdagangan
Zulkifli Hasan mengajak
semua pemangku kepen-
tingan dan masyarakat
melihat sektor perda-
gangan secara optimistis
dalam menyambut 2024.**

Menurutnya, di tengah ketidakpastian global pada 2023, Indonesia tetap berhasil mencatatkan sejumlah capaian signifikan di sektor perdagangan. Beberapa capaian yang dimaksud adalah keberhasilan pemerintah menjaga inflasi, kembali tercapainya surplus perdagangan sepanjang tahun, hingga kebijakan-kebijakan

optimisme untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sebesar 5,20 persen di 2024. Kunci peningkatan kinerja perdagangan 2024 adalah kolaborasi dan sinergi para pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan pers," kata Zulhas dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Perdagangan 2023 dan Outlook Perdagangan 2024, Kamis, 4 Januari 2024.

Zulhas menyampaikan, inflasi terprediksi akan cukup terkendali di kisaran 1,5-3,5 persen sesuai target 2024. Pemerintah akan berupaya untuk tetap mendorong pertumbuhan ekspor non-migas sesuai target 2,5-4,5 persen walaupun ada tantangan harga komoditas dunia yang masih cukup landai.

"Ketidakpastian perekonomian dan

Menurut Zulhas, surplus neraca perdagangan untuk periode Januari-November 2023 juga perlu dilihat sebagai sebuah pencapaian di tengah ketidakpastian global. "Selain itu, kita masih bisa mencatat surplus perdagangan positif USD33,63 miliar pada periode Januari-November 2023 sebagaimana disampaikan BPS," ungkapnya.

Dia mengungkapkan, Kemendag turut berperan dalam perumusan dan implementasi kebijakan yang melindungi UMKM dan hak konsumen. Hal tersebut diwujudkan antara lain melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Selain itu, Kemendag juga menjalankan pemusnahan pakaian bekas.

Inflasi Terendah 20 Tahun Terakhir

Zulhas menyampaikan, inflasi 2023 tercatat sebesar 2,61 persen. Hal tersebut menunjukkan, inflasi masih terkendali dan dalam sasaran inflasi 2-4 persen. Inflasi 2023 bahkan merupakan inflasi terendah dalam 20 tahun terakhir (1999-2024) di luar masa pandemi.

Menurut Zulhas, salah satu amanat Presiden Joko Widodo kepadanya adalah menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak goreng. Hal tersebut berhasil dicapai karena sepanjang 2023, program Minyak Goreng Rakyat telah menyalurkan minyak goreng untuk kebutuhan konsumsi masyarakat sebanyak 3,26 juta ton.

Minyak goreng tersebut disalurkan dengan rata-rata komposisi minyak curah 64 persen berbanding MINYAKITA 36 persen. Merek MINYAKITA pun digunakan berbagai produsen dan pengecas dan telah tersalurkan ke 34 provinsi sepanjang 2023.

Upaya stabilisasi harga minyak goreng dan bapak lainnya sepanjang tahun 2023 turut berkontribusi meredam laju



yang semakin berpihak pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan industri dalam negeri.

"Memasuki 2024, kita menatap optimistis, namun tetap waspada terhadap tantangan di masa depan. Prediksi pertumbuhan ekonomi global oleh berbagai organisasi internasional menunjukkan adanya perlambatan. Namun, kinerja perdagangan 2023 memberikan

perdagangan selama 2023 antara lain diwarnai tensi geopolitik, perubahan iklim, serta krisis pangan dan energi. Di tengah kesulitan itu, kami bersyukur data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi Desember 2023 sebesar 0,41 persen. Artinya, pemerintah berhasil mengendalikan persediaan barang kebutuhan pokok menghadapi Natal dan Tahun Baru," kata Zulhas.

inflasi di tengah ketidakpastian geopolitik global dan tingginya tingkat inflasi negara-negara di dunia.

Sepanjang 2023, Kemendag berkomitmen menjaga stabilitas harga dan pasokan bapok dengan turun langsung ke pasar-pasar dan memantau secara intensif. Pemantauan bapok sepanjang 2023 dilakukan menggunakan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag ke 679 pasar di 503 kabupaten dan kota. Khusus beras, Kemendag bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog untuk mengakselerasi pendistribusian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Kemendag juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam memastikan transportasi bapok dapat ditanggulangi melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Kemendag bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Kepolisian memastikan kelancaran distribusi bapok selama arus pergerakan lalu lintas Natal dan Tahun Baru. Kemendag juga mengawasi distribusi bapok dengan melibatkan Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) untuk mencegah upaya spekulasi dalam momentum Natal dan Tahun Baru,” kata Zulhas.

Selain itu, Kemendag juga membantu menggerakkan warung-warung masyarakat melalui program Seribu Warung Bantu Rakyat. Fasilitas tersebut diberikan melalui kemitraan dengan pelaku usaha yang mendukung penerapan ekosistem empat pilar peningkatan kapasitas UMKM yang didukung elemen UMKM itu sendiri, ritel modern, pembiayaan, serta niaga elektronik.

Kontribusi Signifikan Surplus Perdagangan

Zulkifli Hasan mencatat kinerja ekspor Indonesia pada 2023 turut berkontribusi signifikan terhadap momentum pemulihan Indonesia yang masih berjalan. Pada triwulan III 2023, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh mendekati 5 persen (YoY). Pertumbuhan ini didorong konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,06 persen (YoY) seiring dengan kenaikan mobilitas yang terus berlanjut, daya beli masyarakat yang stabil, dan keyakinan konsumen yang masih tinggi.

Neraca perdagangan Indonesia periode Januari-November 2023 yang tercatat surplus USD33,63 miliar masih terhitung tinggi meskipun nilai ini turun USD16,91 miliar dibanding tahun lalu. Neraca perdagangan Indonesia pun tercatat tetap surplus selama 43 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

“Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia selama Januari—November 2023 adalah sebesar USD236,41 miliar. Nilai

selama Januari-November 2023 mencapai USD202,78 miliar atau turun 6,80 persen (YoY). Nilai impor nonmigas Indonesia pada periode tersebut adalah USD 170,32 miliar dengan tiga negara asal impor nonmigas utama Tiongkok, Jepang, dan Thailand.

Mendag menyampaikan, Kemendag terus mendorong kinerja ekspor melalui kemudahan dan kepastian hukum. Pada 2023, Kemendag menerbitkan



ekspor nonmigasnya sendiri tercatat sebesar USD221,96 miliar. Tiga negara tujuan utama ekspor nonmigas kita adalah Tiongkok, Amerika Serikat (AS), dan India,” ungkap Mendag.

Sementara itu, impor secara kumulatif

dua Permendag mengenai ekspor. Keduanya adalah Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. •

PENYALURAN BANSOS JALAN TERUS

Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk melanjutkan pemberian berbagai bantuan sosial atau bansos pada 2024.

Berbagai bantuan sosial tersebut antara lain bansos pangan, Program Keluarga Harapan (PKH) sampai Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, Jokowi meminta agar jajaran memantau penyaluran bansos tersebut agar tepat sasaran.

"Mengenai bansos perlu saya ingatkan harus diteruskan dan juga dipantau agar tepat sasaran, baik yang berupa bantuan bansos pangan, baik yang berupa bantuan PKH, baik berupa BLT. Semuanya harus dipastikan tepat sasaran," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 9 Januari 2024.

Di sisi lain, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengusulkan agar pemerintah untuk menunda penyaluran bansos sampai Pemilu 2024 agar tidak terjadi politisasi. Mereka menilai hal itu harus dilakukan untuk menghindari kecurigaan menguntungkan pasangan capres dan cawapres tertentu.

"Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi-bagi bansos dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah. Tapi persepsi publik seperti itu. Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," kata Deputi Hukum TPN Ganjar -Mahfud, Todung Mulya Lubis.

Todung meminta pemerintah mempertimbangkan usulan tersebut. Todung menyebut pembagian bansos saat kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu untuk meraup suara rakyat.

"Tapi menurut saya dalam konteks pilpres dan pemilu sebaiknya itu tidak dilakukan, sampai pilpres ini selesai. Jangan ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi semacam ini," imbuhnya.

Todung juga menyarankan Bawaslu sebagai pengawas untuk melakukan investigasi jika ada pembagian bansos saat masa pemilu. Jika tetap ada pembagian, kata Todung, harus dipastikan bansos tersebut betul-betul dari pemerintah.

"Jadi saya minta Bawaslu untuk melakukan investigasi misalnya terhadap s e m u a p e m - b a g i a n Bansos, karena pada

hakikatnya, Bansos itu adalah program pemerintah," tuturnya.

Meski begitu, Menteri Sosial, Tri Rismaharini, menegaskan, selama dananya ada, program bansos akan terus berjalan.

"Saya nggak tahu (usulan itu). Pokoknya, saya menjalankan sesuai dengan perintah undang-undang. Selama duitnya ada, saya lanjut jalan, saya jalan," ucap Risma di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Rabu, 10 Januari 2024.

Risma juga menegaskan Kementerian Sosial bergerak atas usulan pemerintah daerah. "Yang jelas saya sudah laksanakan sesuai aturan. Saya bergerak dari usulan kepala daerah, kemudian kita bagi sesuai aturan. Insya Allah yang saya kerjakan itu juga diperiksa BPK rutin. Saya juga data, kita juga diperiksa oleh KPK rutin dan kalau enggak salah terakhir ini kita juga diperiksa oleh BPKP. Bahkan kami diperiksa setahun tiga kali kalau nggak salah oleh BPK," ucapnya.

Dia menegaskan bansos yang disalurkan Kemensos tidak dipolitisasi. Dia menyerahkan masyarakat yang menilai.

"Tetapi kami juga nggak ada yang saya copet, nggak ada yang saya salah gunakan. Ya saya juga nggak masalah (ada yang ngomong dis-



alahgunakan). Cuma kalau ada yang ngomong itu (dipolitisasi), ya sudah biar masyarakat yang menilai,” ucapnya.

Risma mengingatkan pejabat daerah tidak menyalahgunakan bansos. Menurutnya, pertanggungjawaban bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat.

“Lurah juga disumpah, camat juga disumpah, bupati disumpah. Pertanggungjawaban bukan hanya di dunia. Nah kalau ada orang kelaparan, kita memilih, ‘Oh itu bukan orang saya, atau bukan saudara saya itu.’ Ya kita tanggung jawab kepada Tuhan, kan gitu,” ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengingatkan Mensos Risma untuk memastikan penyaluran bansos jelang Pemilu 2024 tak dipolitisasi. Hasto mengaku mendukung program bansos agar terus berjalan sesuai dengan yang sudah diprogramkan dan dianggarkan di 2023.

“Akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik,” kata Hasto.

“PDI Perjuangan menempatkan pentingnya seluruh kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan oleh negara melalui sinergi antara DPR RI dan Kepresidenan untuk secepatnya pada 2024 ini menurunkan kemiskinan ekstrem,” sambungnya.

Hasto menyebut pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD juga memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan kelompok miskin. Misalnya itu dengan membuat program KTP Sakti yang mendorong bansos tepat sasaran dan tepat guna.

“Instrumen keberpihakan yang sebelumnya dilakukan dengan Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, melalui program PKH, Bansos, BLT, akan ditingkatkan, baik dari segi kuantitasnya, dari jumlahnya, maupun ketepatannya kepada rakyat yang betul-betul membutuhkan melalui integrasi satu data, dan melalui inovasi kebijakan publik yang telah dirancang dengan sebaik-baiknya,” ungkap Hasto.

Sementara itu, Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP Aria Bima menambahkan partai sepakat tidak in-

gin menghentikan atau menunda penyaluran bansos. PDIP yang merupakan partai pengusung pemerintahan Jokowi dari 2014-2019, kata Bima, ingin melanjutkan selueuh kebijakan, program, dan kegiatan untuk mensejahterakan rakyat.

“Kesejahteraan itu ada dua, menaikkan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. Penurunan-penurunan ini yang kemudian adalah hak segala warga negara untuk mendapatkan jaminan-

uk di dalamnya dengan bantuan sosial,” kata Bima.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap penyaluran bansos oleh pemerintah untuk mencegah adanya politisasi tersebut.

“Pengawasan yang ketat menjadi solusi mencegah politisasi bansos tanpa perlu menghentikan penyaluran karena bansos merupakan hak rakyat,” ujarnya,



jaminan sosial bahwa terkait dengan bantuan dengan ada Kartu Pintar, Kartu Sejahtera, Kartu Prakerja disiapkan oleh tim 11 oleh Pak Jokowi. Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk

Minggu, 7 Januari 2024.

Dia menyatakan, seluruh elemen bangsa dan kekuatan politik yang ada ikut melakukan pengawasan ketat untuk menutup celah bagi pihak manapun yang berniat melakukan politisasi bansos. ●

IKN MAGNET KUAT BAGI INVESTOR

Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi magnet kuat bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia di berbagai sektor, termasuk pariwisata dan ekonomi kreatif.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, mengatakan, fakta tersebut dia dapatkan berdasarkan hasil kunjungan kerjanya ke sejumlah negara di Timur Tengah pada 5-6 Januari 2024. Kunjungan kerja tersebut salah satu tujuannya adalah memperkenalkan peluang investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia, terutama di Badan Otorita Pariwisata, KEK Pariwisata, termasuk IKN, serta proyek lainnya.

"Minat berinvestasi di sana sangat tinggi. Saya melihat Indonesia masih menjadi magnet para investor karena kita punya ekonometrik yang baik, maupun juga dari sisi kemudahan-kemudahan yang dihadirkan oleh pemerintah," ujar Sandi, Rabu, 10 Januari 2024.

Saat kunjungan kerja ke Timur Tengah, Sandi bertemu CEO Al Zarooni Emirates Investments LLC yang juga Chairman Citizens School Dubai, Adil Alzaaroni, membahas upaya investasi pada sektor pendidikan; Chairman Ayana Holding, Abdulla Lahej, terkait tren industri properti terkini; Director General Dubai Travellers Festival, Awad Bin Mohammad Bin Sheikh Mugin terkait peluang kerja sama di sektor parekraf, teknologi komunikasi dan renewable

energy.

Sandi juga melakukan pertemuan dengan Director Team of Sobha Realty, salah satu industri real estate terbesar di India dan UEA yang dimiliki oleh Billionaire PN Menon.

"Dari hasil kunjungan kerja tersebut di mana kita bertemu dengan para investor dan salah satu investornya tertarik kepada IKN. Mereka menanamkan minat untuk berinvestasi di beberapa proyek real estate di Indonesia terutama di IKN," katanya.

Sandi menjelaskan, rangkaian kunjungan kerja ini diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi di sektor parekraf pada 2024. Hingga semester I 2023, nilai investasi di Indonesia tercatat mencapai Rp23,70 triliun atau USD1.601,28 juta. Dari jumlah tersebut terdapat Penanaman Modal Asing sebesar USD588,15 juta atau

Rp8,7 triliun, dan Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar

USD1.013,13 juta atau Rp14,99 triliun.

"Iklim investasi ini yang harus kita dukung secara berkelanjutan agar investasi ini kondusif berkelanjutan, berkelas dunia dan berdaya saing, serta mendorong pembangunan daerah hingga kesejahteraan. Kami juga menawarkan program Golden Visa dan beberapa Kawasan Ekonomi Khusus yang dibentuk untuk menampung minat investasi di sektor parekraf," ujarnya.

Sandi juga mengungkapkan dukungan terhadap pengembangan potensi parekraf di kawasan IKN telah bergulir dan mendapatkan dukungan dari investor.

Sandi mengatakan dukungan ini terbukti dengan tengah bergulirnya sejumlah proyek pembangunan fasilitas pendukung parekraf di IKN yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2023.

"Presiden sudah melakukan ground breaking beberapa proyek sektor parekraf, terutama untuk sektor akomodasi di IKN," kata Sandi.

Adapun proyek-proyek tersebut, di antaranya pembangunan Hotel Nusantara oleh Konsorsium Nusantara dengan nilai investasi Rp20 triliun. "Ground breaking ini telah dilakukan pada 21 September 2023 dan target operasinya pada Agustus 2024," katanya.

Lalu, ada pula ground breaking pembangunan Hotel Vasanta oleh PT Sirius Surya Sentosa (Vasanta Group) yang telah dilakukan pada 23 September 2023.

Kemudian, PT Pakuwon Jati melalui entitas PT Pakuwon Nusantara Abadi pada 1 November 2023 melaksanakan ground breaking pembangunan proyek superblok berupa pusat perbelanjaan, kondominium dan tiga hotel dengan nama area Pakuwon Nusantara dengan total investasi sekitar Rp5 triliun.

P e m -
ban-



gunan ini, kata Sandi, bekerja sama dengan Marriott Group sebagai operator melalui brand The Westin, Four Points, dan Tribute Portofolio.

"Selanjutnya juga ada BSH Community Hub berupa hotel dan restoran oleh PT Karya BSH Mandiri yang ground breaking-nya 21 Desember 2023," katanya.

Tidak hanya itu, PT ARCS House Wisata Indonesia juga akan membangun hotel dan resort dengan brand Jambuluwuk di kawasan IKN.

"Kita terus mempromosikan investasi di IKN, terutama di sektor parekraf karena kita perlu membangun akomodasi. Dengan berinvestasi kita juga mendorong (pengembangan) dari segi pariwisata dan produk-produk ekonomi kreatif," kata Sandi.

Sandi juga menekankan pengembangan pariwisata di IKN akan mengedepankan konsep ecotourism. "Kawasan hutan (di IKN) dipastikan 75 persen hutan tropis dan 25 persen baru dibangun sebagai bagian dari fasilitas," kata Sandi.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, menyampaikan, saat ini progres pembangunan fisik IKN sudah mencapai sekitar 70 persen. Pada kegiatan ground breaking ketiga, nilai investasi yang ditanamkan pihak swasta dan beberapa BUMN mencapai Rp41,4 triliun.

Untuk memberikan informasi dan meningkatkan rasa optimistis pemindahan dan pembangunan IKN, Otorita IKN akan menyelenggarakan IKN Fair pada 26-28 Januari di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan.

"IKN Fair ingin menyampaikan bahwa IKN itu ada dan ingin berkolaborasi dengan pihak-pihak ketiga, termasuk swasta dan kementerian, untuk sama-sama mendorong seperti apa sih IKN pada saat ini dan di masa mendatang," terang Alimuddin.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, menambahkan pembangunan fisik IKN perlu didorong dengan proses komunikasi publik yang baik untuk memberikan informasi kepada Masyarakat, serta membangun optimistis keberadaan IKN sebagai kota masa depan Indonesia.

Oleh karena itu, Kementerian Kominfo akan membuat IKN Pedia yang dapat dijadikan rujukan oleh berbagai pihak untuk mendapatkan informasi resmi mengenai IKN.

"Kita akan membuat IKN Pedia yang berisi segala informasi tentang IKN. Mulai dari progres pembangunan, filosofi, histori, sampai peran kementerian, semua akan kita masukkan ke dalam IKN pedia," jelas Usman.

Usman mengatakan nantinya IKN pedia akan seperti Wikipedia dan berbentuk living document, sehingga bisa terus di-update dan berisi berbagai data, grafis, video, audio. Rencananya akan kita luncurkan bersamaan dengan pembukaan Nusantara Fair.

Peta Besa Indonesia Emas



Sandi mengatakan, pemindahan ibu kota ke IKN menjadi komponen dari peta besar menuju Indonesia Emas 2045.

"IKN ini kebanggaan kita dan ini adalah ibu kota masa depan yang diperhatikan oleh dunia. Pemindahan ibu kota ini komponen dari peta besar kita menuju Indonesia emas 2045. Letaknya di tengah-tengah Indonesia di kawasan Timur Kalimantan, dan komitmen terhadap green dan sustainability-nya ini jelas tegas dalam rencana ke depan. Dan IKN ingin mengembalikan kejayaan flora dan fauna Kalimantan," kata Sandi.

Pemindahan ibu kota sebagai bentuk pemerataan pembangunan di seluruh

pelosok Nusantara. Sehingga program pembangunan tidak hanya terjadi di wilayah Jawa, melainkan di Kalimantan dan wilayah timur.

"Ini bukan hanya sebagai langkah menuju Indonesia Emas 2045 tetapi menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia ini negara kepulauan terbesar di dunia, bukan hanya di Jawa, tetapi kita menyamaratakan peluang dan pemerataan pembangunan itu di seluruh pelosok Nusantara," kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di IKN, kata Sandi, sedang berjalan. Termasuk dalam sektor penunjang parekraf seperti pembangunan Hotel Nusantara dengan nilai investasi mencapai Rp20 triliun.

Dia juga terus mendorong desa

wisata di sekitar IKN untuk membangun homestay sebagai alternatif hunian bagi wisatawan. "Itu menjadi salah satu alternatif hunian, karena mengedepankan kelestarian lingkungan, adat istiadat, dan kearifan lokal," sambungnya.

Menparekraf menekankan pentingnya kolaborasi dalam pengembangan dan mewujudkan pembangunan dengan konsep sustainability forest city.

"Ini adalah mimpi besar, pasti banyak pertanyaan, kuncinya kita tetap optimis dan menyampaikan semuanya secara konstruktif, bahwa ini sudah diputuskan menjadi undang-undang mari kita wujudkan dengan kolaborasi bersama," kata dia. ●

GENCARKAN IMUNISASI POLIO

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan mendapatkan laporan ditemukannya tiga penyakit kasus lumpuh layu akut (Acute flaccid paralysis/AFP) yang disebabkan oleh Virus Polio Tipe Dua. Dua kasus ditemukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada Desember 2023, sedangkan satu kasus lainnya ditemukan di Jawa Timur pada 4 Januari 2024.

"Pada bulan Desember 2023 telah ditemukan dua kasus lumpuh layu akut yang disebabkan oleh virus polio dengan kronologis kasus yang berbeda. Satu kasus imunisasi polionya tidak lengkap, satu lagi status imunisasinya lengkap tapi mengalami malnutrisi," kata Direktur Jenderal P2P Kemenkes, Maxi Rein Rondonuwu.

Kasus lumpuh layu akut pertama dialami oleh anak perempuan berusia 6 tahun yang berdomisili di Jawa Tengah berinisial NH. Berdasarkan pengakuan orang tua, NH mengalami lumpuh layu akut pada 20 November 2023 dengan riwayat imunisasi polio tetes (OPV) hanya dua kali.

Kasus lumpuh layu akut kedua dialami oleh anak laki-laki berusia 1 tahun 11 bulan yang berdomisili di Jawa Timur berinisial MAF. MAF mengalami lumpuh pada 22 November 2023

dengan riwayat imunisasi lengkap tapi hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ia mengalami malnutrisi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Rujukan Polio Nasional BBLK Surabaya dan hasil sekuensing dari Laboratorium Bio Farma Bandung pada 20-22 Desember 2023, NH dan MAF menunjukkan positif Virus Polio Tipe 2.

Sementara itu, kasus lumpuh layu akut ketiga dialami oleh anak laki-laki berusia 3 tahun 1 bulan yang berdomisili di Jawa Timur berinisial MAM. MAM mengalami lumpuh pada 6 Desember 2023 dengan riwayat imunisasi polio tetes 4 kali dan polio suntik (IPV) 1 kali berdasarkan pengakuan orang tua. Selanjutnya, hasil pemeriksaan Laboratorium Rujukan Polio Nasional BBLK Surabaya dan hasil sekuensing dari Laboratorium Bio Farma Bandung pada 4 Januari 2024 menunjukkan positif Virus Polio Tipe 2.

Maxi menjelaskan, polio merupakan salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Virus Polio dapat menular

melalui air yang terkontaminasi dengan tinja yang mengandung Virus Polio.

"Beberapa faktor risiko terjadinya penularan Virus Polio adalah rendahnya cakupan Imunisasi Polio, kondisi kebersihan lingkungan dan perilaku hidup bersih yang kurang baik seperti Buang Air Besar (BAB) sembarangan, baik itu di sungai ataupun pada sumber air yang juga digunakan pada kehidupan sehari-hari," kata Maxi.

Maxi menjelaskan, jika Virus Polio tersebut masuk ke dalam tubuh anak yang belum mendapatkan imunisasi polio atau imunisasi polionya tidak lengkap, virus akan sangat mudah berkembang biak di dalam saluran pencernaan dan menyerang sistem saraf anak, sehingga menyebabkan kelumpuhan.

Untuk menanggulangi dan memutus transmisi penularan virus polio, Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk berperan aktif. Pertama, masyarakat harus memastikan anak-anak mereka memperoleh imunisasi rutin polio lengkap sesuai usia, yaitu 4 kali polio tetes dan 2 kali polio suntik, sebelum usia 1 tahun.

Kedua, memastikan seluruh anak usia 0-7 tahun di seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Kabupaten Sleman, DIY, memperoleh 2 dosis imunisasi polio tetes tambahan pada kegiatan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub PIN) yang akan dilaksanakan mu-



lai 15 Januari 2024. Ketiga, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk BAB di jamban dengan septic tank dan cuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah buang air.

Keempat, masyarakat diimbau segera melapor kepada petugas kesehatan atau puskesmas terdekat bila menemukan anak usia di bawah 15 tahun dengan gejala lumpuh layu mendadak.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan akan menggenapkan vaksinasi polio di daerah-daerah kasus dan daerah dengan risiko penurunan tinggi lumpuh layu tahun ini.

Budi menyampaikan, sub pekan imunisasi nasional polio di Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga DIY ini dilakukan setelah Kemenkes menggenapkan imunisasi di berbagai daerah. Demikian juga di Aceh pada 2022 ketika kasus polio ditemukan di wilayah tersebut.

“Sudah kami lakukan sama yang di Aceh, sama yang di Sumatera, kita akan kejar. Jadi kita akan tambah vaksinasi polio di daerah-daerah itu,” kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Januari 2024.

Budi tidak memungkiri, keberadaan virus polio di Indonesia terjadi karena kurangnya vaksinasi di masa pandemi Covid-19. Saat itu, seluruh negara berfokus pada penanganan pandemi dan pengadaan vaksin Covid-19.

Pada hal, Indonesia telah mendapatkan sertifikat eradikasi atau bebas polio sejak 2014. Eradikasi ini ditetapkan mengingat dunia akan mendeklarasikan bebas polio pada 2026.

“Makanya polio ini kita lihat beberapa tumbuh akibat karena vaksinasinya pada saat Covid-19 itu kurang, jadi terlihat dampaknya,” ucap Budi.

Pekan Imunisasi Nasional Polio

Kementerian Kesehatan bakal menggelar Sub Pekan Imunisasi Nasional Polio atau Sub PIN Polio secara

serentak mulai 15 Januari 2024.

“Pemerintah bersama Komite Imunisasi Nasional telah memberikan rekomendasi untuk segera merespons KLB dengan memberikan imunisasi tambahan atau yang dikenal dengan Sub Pekan Imunisasi Polio (Sub PIN Polio),” kata Direktur Jenderal P2P Kemenkes, Maxi Rein Rondonuwu, Jumat, 12 Januari 2024.

Maxi menjelaskan Sub PIN Polio akan dilaksanakan dalam 2 putaran. Putaran pertama dimulai pada 15 Januari 2024, sedangkan putaran kedua akan berlangsung mulai 19 Februari 2024.



Masing-masing putaran dilaksanakan dalam waktu satu minggu dengan jarak antarpasaran minimal satu bulan.

Wilayah pemberian imunisasi tambahan adalah seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merupakan lokasi terjadinya KLB polio. Pemberian imunisasi tambahan juga dilakukan di Kabupaten Sleman DIY, yakni daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Klaten, lokasi ditemukannya kasus polio beberapa waktu lalu.

“Sekalipun di DIY tidak ada kasus,

tapi yang kita takuti itu, sirkulasi virusnya ada di kabupaten tetangga, sama seperti di Aceh, imunisasi tambahan juga kita lakukan di Sumatera Utara,” terangnya.

Maxi membeberkan Sub PIN Polio ini menargetkan anak berusia 0-7 tahun, tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Artinya, meski status imunisasi sudah lengkap, anak tetap harus mengikuti program Sub PIN Polio.

“Target cakupan sekurang-kurangnya adalah 95 persen untuk masing-masing putaran dan merata di setiap

tingkatkan, mulai dari desa, kecamatan, sampai kabupaten,” ucapnya.

Soal vaksin, Maxi mengungkapkan, jenis vaksin yang akan digunakan pada Sub PIN Polio kali ini adalah vaksin generasi terbaru, yaitu Novel Oral Polio Vaksin tipe 2 atau nOPV2, yang diberikan sebanyak dua tetes dengan interval minimal satu bulan.

Imunisasi bisa didapatkan masyarakat secara gratis di fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, satuan pendidikan seperti PAUD, TK, SD/ sederajat serta pos imunisasi lainnya di bawah koordinasi puskesmas.

“Walaupun ada Sub PIN Polio, pelayanan Imunisasi rutin di fasyankes tetap berjalan seperti biasa,” pungkasnya. ●



PASTIKAN PEMILU 2024 BERJALAN LANCAR DI MUBA

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Provinsi Sumatera Selatan memastikan pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif pada Februari 2024 mendatang akan berjalan aman dan lancar.

Kepastian ini disampaikan langsung Pj Bupati Muba Drs H Apriyadi Mahmud dengan mengecek langsung kesiapan Pemilu 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Muba, Selasa (9/1/2024) sekaligus memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pilpres nanti.

Di sela-sela kunjungan tersebut Apriyadi mengatakan, bahwa kunjungannya ini guna memastikan proses penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan lancar, dimulai dengan pelipatan surat suara, penyimpanan dan distribusi surat suara ke tiap kecamatan.

"Saya mendapat laporan pelipatan surat suara presiden wakil presiden dan DPD sudah selesai, hari ini untuk yang DPR RI, ditargetkan besok selesai. Artinya tanggal 15 Januari pelipatan surat suara mulai presiden DPD, DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten selesai," ujarnya.

Apriyadi bersyukur gedung serbaguna yang dibangun Pemkab Muba di lingkungan Kantor KPU dapat menampung proses pelipatan surat suara sehingga tidak ada yang dilakukan diluar KPU.

"Alhamdulillah ini bentuk dukungan dan fasilitas pemerintah daerah untuk KPU

dalam rangka melaksanakan Pesta demokrasi," imbuhnya.

Disinggung soal pemungutan suara penyandang disabilitas ia pastikan Pemkab Muba dan KPU mempersiapkan sarana dan prasarananya.

"Kita siapkan seperti kursi roda, tongkat dan kebutuhan lainnya," tanda Apriyadi.

Sementara Kasubag Umum Keuangan dan Logistik KPU Muba Irwansyah SE MM mengatakan untuk pencoblosan penyandang disabilitas juga akan dilakukan secara jemput bola.

"Kita juga akan adakan bimtek untuk pemungutan surat surat dari penyandang disabilitas, karena ada aturan khususnya, sehingga target semua suara disabilitas dalam pesta demokrasi ini bisa tersalurkan," pungkasnya.

Setelah mel-

akukan pengecekan proses sortir dan pelipatan surat suara, Pj Bupati Muba juga mengecek gudang tempat penyimpanan kotak suara Pemilu 2024.

Melihat semua kesiapan menyambut pelaksanaan Pilpres 2024 tersebut, Apriyadi Mahmud merasa yakin pesta demokrasi di Kabupaten Muba akan berjalan lancar, aman dan damai.

Jamin Netralitas ASN

Pj Bupati Muba, Apriyadi Mahmud juga meminta dan menekankan agar ASN di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin untuk menjaga sikap profesionalnya sebagai abdi negara dengan tidak melibatkan diri terjun ke ajang politik praktis hingga mencederai netralitas pegawai pemerintah itu sendiri.

Netralitas ASN yang selama ini banyak menjadi sorotan menjadi perhatian penting Apriyadi Mahmud agar pelaksanaan Pemilu 2024 ini Kabupaten Muba ber-



jalan sesuai aturan.

Untuk memastikan sikap netral itu, ribuan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muba, berkumpul di Opproom Pemkab Muba.

Dalam kesempatan itu, ASN di lingkungan Pemkab Muba menyatakan siap satu komando dengan Pj Bupati Apriyadi Mahmud untuk mewujudkan netralitas saat Pemilu dan Pemilihan pada 2024 mendatang.

Hal tersebut juga ditandai dengan Deklarasi Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 secara serentak di Sumatera Selatan.

Deklarasi ini menjadi sikap politik para ASN di Kabupaten Musi Banyuasin, mulai dari pegawai pemerintahan hingga guru-guru yang ada di sekolah.

"Prinsipnya sesuai aturan pegawai ASN harus netral saat Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 mendatang. Dan Pegawai Muba akan satu komando dengan Pj Bupati Apriyadi menjunjung tinggi netralitas pegawai," ungkap Plh Sekda Muba, Andi Wijaya Busro SH MHum di sela Deklarasi Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 Secara Serentak Se-Sumatera Selatan.

Lanjutnya, pegawai ASN di lingkungan Pemkab Muba harus menghindari konflik dan tidak melakukan intimidasi atau memaksakan kehendak untuk memilih calon yang mereka inginkan.

"Mari kita patuhi bersama aturan aturan yang sudah sesuai ketentuan," ucapnya.

Sementara itu, Pj Bupati Apriyadi Mahmud menegaskan, agar jelang dan saat Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 nanti para pegawai ASN Muba bijak dalam menggunakan media sosial (medsos).

"Jangan menyebarkan atau memposting informasi hoaks, harus bijak memanfaatkan medsos," tegasnya.

Kandidat Doktor dari Universitas Sriwijaya itu menambahkan, sebagai pegawai ASN harus mengedepankan netralitas dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

"Jaga kondusifitas Muba, dengan bersikap netral serta tidak menyalahi aturan tentu sudah menjadi contoh yang baik sebagai ASN," ucapnya. •



TOLERANSI POLITIK CEGAH KONFLIK PEMILU 2024

Menjelang Pemilu 2024, Penjabat (Pj) Wali Kota H Ratu Dewa mengeluarkan imbauan kepada penduduk Palembang untuk menjaga kondusivitas agar tercipta rasa aman, nyaman dan saling menghargai.

Bagi Ratu Dewa, Pemilu merupakan pilar demokrasi yang sangat penting dalam struktur negara. Dia menekankan peran masyarakat dalam menjaga suasana yang kondusif dan aman menjelang Pemilu 2024.

"Melalui sikap saling menghormati, toleransi, dan partisipasi aktif, kita dapat membentuk lingkungan yang kondusif untuk proses demokrasi. Kondusivitas ini menjadi kunci dalam menciptakan rasa aman, kenyamanan, dan saling menghargai," ungkapnya.

Ratu Dewa juga berharap agar masyarakat Palembang dapat memahami perbedaan pendapat sebagai bagian dari keanekaragaman dalam sistem demokrasi.

"Tingginya toleransi politik dapat mencegah konflik dan memungkinkan adanya diskusi yang konstruktif. Setiap warga negara memiliki hak untuk memiliki pandangan politiknya sendiri, dan menghormati perbedaan tersebut menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang kondusif," tegasnya.

Meski demikian, Ratu Dewa mengajak seluruh masyarakat Palembang untuk menggunakan hak suara mereka dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat Pemilu 2024 sesuai jadwal yang ditetapkan.

"Mari seluruh warga Palembang

yang memiliki hak suara, datang ke TPS masing-masing untuk menentukan pilihannya. Bersama-sama kita berdemokrasi dengan damai dan kondusif," ujarnya.

Selain itu, Ratu Dewa juga berterima kasih kepada pihak TNI dan Polri atas dukungannya dalam menjaga kenyamanan dan keamanan masyarakat Palembang selama Pemilu 2024.

"Selamat bertugas, dan terima kasih kepada

seluruh petugas TNI dan Polri yang turut serta dalam menjaga keamanan Pemilu 2024," pungkasnya.

Sebelumnya, Ratu Dewa meminta Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk tetap netral dan tidak memberikan panduan khusus kepada warganya dalam memilih calon legislatif dan presiden pada Pemilu 2024.

Dia menilai peran aktif RT/RW sangat dekat dengan masyarakat dan diharapkan dapat memastikan kesuksesan Pemilu 2024 dengan suasana damai dan tentram.

Ratu Dewa juga telah membentuk tim khusus (timsus) untuk memantau netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama masa kampanye. Tim ini akan mulai beroperasi pada tanggal 28 November, bersamaan dengan dimulainya masa kampanye dan Pemilu 2024.

"Tujuan pembentukan timsus ini adalah untuk menjaga netralitas ASN selama periode kampanye dan Pemilu

2024," sambungnya.

Ratu Dewa menjelaskan bahwa timsus ini berasal dari Inspektorat Kota Palembang.

Ratu Dewa juga memberikan imbauan kepada ASN di Pemerintah Kota Palembang agar bijak dalam menggunakan media sosial dan meng-



hindari memperagakan pose foto dengan menggunakan jari.

"Saya mengingatkan ASN agar bermedia sosial dengan baik dan tidak mengupload foto sembarangan di media sosial, apalagi foto gaya yang menggunakan jari," tegas Ratu Dewa.

Bagi ASN yang melanggar aturan selama masa Pemilu 2024, Ratu Dewa menyatakan bahwa sanksi yang berlaku sudah diatur dalam peraturan Presiden dan Mendagri. Dia menekankan bahwa ASN harus mematuhi aturan dan tidak boleh bermain-main selama Pemilu 2024.

Ratu Dewa, memberikan himbauan kepada seluruh ASN dan non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota Palembang agar tetap menjaga netralitas saat menghadapi pemilihan umum serentak tahun 2024.

Dewa menegaskan bahwa tahapan pemilu, baik Pilpres maupun Pileg 2024, telah resmi dimulai. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya ASN dan non-ASN untuk tetap netral dalam konteks politik.

Ratu Dewa mendorong peran aktif pemantau pemilu dalam tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) di Palembang. Mereka diharapkan untuk membantu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam memantau jalannya tahapan Pemilu 2024.

"Pemantau pemilu yang baru-baru ini diresmikan harus lebih aktif dalam mendukung Bawaslu dalam memantau tahapan pemilu 2024. Di lapangan, hubungan antara pemantau pemilu dan Bawaslu harus memiliki batasan yang jelas," ungkapnya.

Ratu Dewa menyoroti peran pemantau pemilu sebagai salah satu pihak yang dapat melaporkan pelanggaran pemilu, selain masyarakat yang memiliki hak pilih.

"Pemantau pemilu juga memiliki kewenangan untuk melaporkan pelanggaran pemilu. Mereka juga diharapkan terus berkoordinasi dengan Forkopimda setempat," tambahnya.

Dia berharap Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan lancar dan aman, dengan keyakinan bahwa sinergi dari seluruh pihak akan menjadikan Pemilu 2024 di Palembang sukses dan bebas konflik.

"Saya berharap seluruh pihak dapat bekerja sama dengan baik untuk menciptakan pemilu yang berjalan lancar, aman, dan bebas konflik di Palembang," ujarnya.

Ratu Dewa beserta rombongan juga sudah melakukan kunjungan dengan Kapolda Sumsel Irjen Pol A.Rachmad Wibowo S.I.K.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Sumsel beserta jajaran pejabat PJU Polda Sumsel menyambut kedatangan Plt Wali Kota Palembang beserta rombongan, termasuk Direktur Intelijen dan Keamanan yang diwakili oleh Wadir Intel AKBP Dwi Mulyanto S.I.K dan Wadirres krimsus AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K., M.H. Hadir pula Direktur Humas Polda Sumsel Kombes Pol.

la menekankan pentingnya upaya terkoordinasi antara Polda Sumsel dan Polrestabes Palembang terkait pemilu.

Kapolda Sumsel, Irjen Pol A.Rachmad Wibowo SIK menyatakan, Polda Sumsel akan selalu mendukung dan berkolaborasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Palembang.

la mencontohkan tantangan yang dihadapi Palembang, serupa dengan Jambi, dan menekankan upaya penegakan hukum yang diprioritaskan oleh Polda Sumsel.

Kapolda menyebutkan, Palembang merupakan kota terbesar keenam di Indonesia. Namun, dengan kerja sama dan dukungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Re-



Drs. Supriadi M.M.

Audiensi diawali dengan pengenalan struktur organisasi dan pejabat yang hadir. Dewa mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat Kapolda Irjen Pol A.Rachmad Wibowo SIK.

"Audiensi ini dapat mempererat tali silaturahmi antara Pemkot Palembang dan Polda Sumsel, dengan harapan sinergitas keduanya tetap terjaga untuk menjamin keamanan Kota Palembang," ulasnya.

Ratu Dewa menyoroti persiapan pemilu mendatang dan menyebutkan kunjungan mereka ke Polda Sumsel merupakan tindak lanjut rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Palembang sebelumnya.

publik Indonesia (Polri), Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), dan masyarakat, situasi keamanan yang aman dan kondusif dapat tercapai.

Disampaikannya, Polda Sumsel telah melaksanakan Operasi Lintas Fungsi Kepolisian (Operasi KRYD) untuk mewujudkan Kota Palembang yang aman dan kondusif dengan mengedepankan peran masyarakat dalam mencapai tujuan tersebut.

Sebagai langkah konkrit, Kapolda Sumsel membahas upaya pemetaan dan mobilisasi untuk mengantisipasi potensi risiko. Menghadapi Pemilu 2024, mencapai "Sumsel Zero Conflict" menjadi tujuan yang dianut Polda Sumsel dan seluruh pihak terkait. ● IRY

FOKUS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN STUNTING

Luas wilayah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri daratan dan perairan membuat pemerataan pembangunan sedikit mengalami hambatan terutama dalam pelayanan kesejahteraan. Untuk mengatasi hal tersebut Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin H. Hani Syopiar Rustam memfokuskan pada penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka stunting.

Salah satu usaha yang dilakukan dengan menggelar pertemuan antara koordinator dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Kabupaten Banyuasin guna menerima masukan dan informasi terkait pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penanggulangan stunting.

Dalam arahannya Pj Bupati Hani Syopiar Rustam mengatakan data kemiskinan di Kabupaten Banyuasin terus mengalami penurunan

"Berdasarkan Data BPS Kabupaten Banyuasin untuk tiga tahun terakhir, 2021 sebesar 10,17 persen. Tahun 2022 sebesar 10 persen (88.550 jiwa). Alhamdulillah Tahun 2023 turun lagi sebesar 9,58 persen (85.880 jiwa)," urai Hani Syopiar didampingi Asisten 1 Izro Maita, Dan-dim 0430/Banyuasin Let-

kol Inf Roni Sugiarto.

Hani mengungkapkan suksesnya penurunan angka kemiskinan di suatu daerah tidak terlepas dari peran pendamping PKH dalam mengumpulkan, memproses, menginput data dan memublikasikannya.

Diakui Pj Bupati Banyuasin, Hani Syopiar, PKH menjadi mitra strategis bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Dimana jumlahnya yang mencapai 99 orang terdiri dari koordinator kabupaten 2 Orang, koordinator kecamatan 21 orang, pendamping sosial 76 orang, semuanya memikul peran di lapangan sebagai pendamping.

"Per-

an PKH juga dapat menghasilkan data yang akurat sehingga bisa menjadi dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan," jelasnya.

Pj Bupati Hani juga menyampaikan PKH adalah pegawai dari pemerintah pusat yang bekerja di daerah Banyuasin digaji melalui dana APBN bukan APBD. Namun beban berat pendamping PKH selain memberikan bantuan, pendampingan, juga memberikan pelatihan kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

"Dengan beratnya beban tersebut belum lagi membawahi banyak wilayah yang ada 1 kecamatan 1 orang membawahi 7 wilayah. InshaAllah tahun 2024 Pemkab Banyuasin akan menggantikan serta menaikkan bantuan operasional PKH yang cukup signifikan," tegasnya.

Suami dari Hj. Marry Hani ini juga berpesan kepada pen-



damping PKH untuk tetap selalu memperhatikan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan serta menjaga Kode Etik SDM PKH serta menghindari perbuatan tercela.

“Meningat tahun ini adalah tahun politik dan saat ini kita berada pada masa kampanye pemilu maka saya berpesan kepada seluruh teman teman pendamping PKH agar bersikap netral. Selanjutnya perlu di pahami dan diberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa bantuan sosial PKH yang dilaksanakan pemerintah tidak terkait sama sekali dengan politik. Kegiatan ini akan terus berlangsung selama masih diperlukan yang merupakan amanat konstitusi,” tuturnya.

Turunkan Angka Stunting

Penurunan stunting merupakan salah satu dari 10 poin penting kinerja Penjabat Bupati Banyuasin, H. Hani Syopiar Rustam selama menjabat Penjabat Bupati Banyuasin.

Sosialisasi baik berupa himbauan atau berdialog langsung dengan masyarakat tentang stunting terus dilakukan. Penurunan stunting ini juga menjadi agenda kerja dari Penjabat Ketua TP PKK Kabupaten Banyuasin, Hj. Merry Hani Rustam bersama pengurus TP PKK kabupaten dan kecamatan bahkan hingga ke desa.

Pengurus PKK Banyuasin terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk bersama-sama menurunkan penderita stunting di Banyuasin. Hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan, salah satunya di Kecamatan Talang Kelapa yang dipimpin langsung Camat Talang Kelapa, Salinan.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak lebih pendek untuk usianya dan baru nampak setelah anak berusia 2 tahun.

Pencegahan stunting dapat dimulai usia remaja, dengan mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) secara rutin.

Sebagai orang tua, bisa melakukan pencegahan stunting dari masa kehamilan, masa menyusui, sampai anak usia 0-59 bulan. Pencegahan ini bisa

dilakukan dengan memperhatikan asupan gizi ibu dan anak.

Rapat yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergitas Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan menyampaikan data Stunting dan risiko stunting by

dalam melaksanakan kegiatan intervensi dan membantu keluarga stunting dan risiko stunting serta adanya data yang valid dan akurat, sehingga program tepat sasaran dan dapat berpartisipasi dalam penurunan stunting di Kabupaten Banyuasin,



name by address kepada Kades dan Lurah guna merencanakan strategi intervensi kepada keluarga Stunting maupun risiko stunting agar anaknya cepat tumbuh kembang secara normal.

Camat Salinan menyampaikan agar para pengurus TPPS dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), Kader Pembangunan Manusia, Kader Posyandu dan penggiat lainnya senantiasa meningkatkan koordinasi dan bersinergi

Sebagai informasi sampai akhir bulan november 2023 angka stunting di Kabupaten Banyuasin sekitar 24, 4 persen.

Pj Bupati Banyuasin, Hani S. Rustam untuk tahun 2024 menargetkan penderita stunting akan turun lagi. Untuk itu semua pihak harus terus bahu membahu bersama Pemkab Banyuasin dan Tim Pengurus PKK Kabupaten Banyuasin terus bersinergi demi Banyuasin Maju. ●

PEMKAB OGAN ILIR TEGAS JAGA NETRALITAS PEMILU 2024

Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar menegaskan komitmen Pemkab Ogan Ilir untuk menjaga netralitas. Termasuk menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan arahan kepada jajaran agar tidak memihak kepada calon atau peserta Pemilu.



Bahkan, di Kabupaten Ogan Ilir juga telah mengikuti Deklarasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi pemilu yang diselenggarakan melalui zoom meeting yang dipimpin oleh Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni.

Panca mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga agar pemilu serentak tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Ia berharap agar Kabupaten Ogan Ilir dapat terhindar dari pemberitaan yang menciptakan isu netralitas pemilu. Oleh karena itu, Bupati meminta awak media agar dalam menyusun berita tetap berpegang pada prinsip kebenaran dan tidak memperkeruh suasana dengan berita yang dapat merugikan pihak tertentu.

"Diharapkan Kabupaten Ogan Ilir terhindar dari pemberitaan isu netralitas pemilu, untuk itu kepada wartawan

dalam membuat berita harus benar dan jangan karena berita justru memperkeruh suasana dan ada pihak yang dirugikan," ujar Bupati Panca.

Panca Wijaya Akbar menyampaikan pentingnya tahapan pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Tujuannya adalah untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu di tahun 2024.

Lebih lanjut, Bupati Panca Wijaya Akbar menambahkan, bahwa tahapan Pemilu 2024 diharapkan akan berjalan dengan baik secara langsung dan harmonis.

"Kita berharap agar selama berlangsungnya pemilu, masyarakat dapat menggunakan hak suaranya dengan tenang. Mari bersama-sama menjaga kondusifitas di wilayah masing-masing. Kita tidak ingin adanya perpecahan di tengah masyarakat. Sebagai contoh, kita harus memperlihatkan bagaima-

na pemilu dapat berjalan dengan baik secara langsung. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, mari kita jaga keharmonisan," bebarnya.

Panca Wijaya Akbar melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Ogan Ilir, H. Muhsin Abdullah melakukan tindakan nyata dalam menandatangani deklarasi netralitas yang disaksikan oleh ASN Pemkab Ogan Ilir, Camat, serta anggota TNI dan Polri.

H. Muhsin, menegaskan bahwa ASN harus tetap netral dalam menghadapi pemilu 2024 yang akan segera dilaksanakan pada bulan Februari mendatang.

"Kita melihat Pemkab Ogan Ilir bersama seluruh ASNnya melakukan deklarasi netralitas dalam pemilu, yang dipimpin langsung oleh Pj Gubernur A. Fatoni," ungkapnya.

Lebih lanjut, Sekda Ogan Ilir menekankan kepada seluruh ASN di kabupaten tersebut untuk menghindari terli-

bat dalam masalah-masalah yang tidak diinginkan selama pelaksanaan pemilu pada Februari 2024, meskipun mereka memiliki hak suara.

“ASN di seluruh kabupaten Ogan Ilir diminta untuk tidak terlibat dalam masalah-masalah yang tidak diinginkan selama pelaksanaan pemilu pada Februari 2024 mendatang, meskipun mereka memiliki hak suara,” tegasnya.

Dia juga mengingatkan seluruh ASN Pemkab Ogan Ilir terkait larangan terhadap tindakan dukungan seperti berfoto atau melakukan gerakan tertentu, yang jelas-jelas tidak diperbolehkan. Apalagi, dilarang mengarahkan masyarakat untuk memilih calon tertentu dalam pemilu.

“Dilarang melakukan tindakan dukungan seperti berfoto dengan gaya tertentu atau gerakan tangan tertentu. Lebih dari itu, dilarang mengarahkan masyarakat untuk memilih calon tertentu dalam pemilu,” tambahnya.

Tidak hanya itu saja, sejumlah langkah telah diambil oleh unsur Forkopimda, termasuk Polres Ogan Ilir, untuk menjaga kondusivitas menjelang Pemilu 2024. Inisiatif ini berasal dari Kapolres Ogan Ilir, AKBP H. Andi Baso Rahman, yang menggelar sebuah forum dengan tema “Sinergitas Menyongsong Pemilu Serentak 2024” di Gedung Pendopoan Tanjung Senai.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh, antara lain Bupati Panca Wijaya Akbar, Pabung Kodim 0402/OKI-OI Mayor Inf Jauhari, Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Tira Tirtona, dan Kasi Intelijen Kejari Ogan Ilir Gita Santika Ramadhani.

Para anggota media dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Wartawan Online (IWO), Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO I), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) juga turut hadir.

Kapolres Ogan Ilir, AKBP H. Andi Baso Rahman, menekankan komitmen Polri untuk menjaga netralitas pada Pemilu 2024, sesuai dengan instruksi pimpinan dari Kapolri dan Kapolda Sumatera Selatan.

Dalam keterangan kepada awak media, Kapolres menegaskan bahwa Polres Ogan Ilir siap untuk melaksanakan perintah dan tidak memihak kepada peserta, calon, atau partai tertentu.

Netralitas Polri, merupakan langkah yang penting untuk mencegah kecurangan dan meminimalisir konflik di masyarakat. Hal ini juga ditegaskan oleh Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Albertus Racmad Wibowo saat berkunjung ke Polres Ogan Ilir pada hari yang sama.

“Sudah jelas instruksi pimpinan dari Bapak Kapolri melalui Bapak Kapolda Sumatera Selatan bahwa Polri harus menjaga netralitas pada Pemilu. Polres Ogan Ilir siap untuk melakukan dan melaksanakan perintah pimpinan,” jelasnya.

Kapolres Ogan Ilir menyoroti pentingnya sinergi dengan media dalam menyongsong Pemilu 2024. Dengan menyediakan informasi yang faktual, akurat, dan berimbang, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat dan mencegah penyebaran

sinergitas untuk mempersiapkan pemilu serentak 2024. Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua DPRD, Ketua Pengadilan, Kodim 0402 OKI/OI, Kajari, Kapolres, Sekda, Asisten I, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kepala Dinas Kominfo dan Persandian, Kepala Badan Kesbangpol, wartawan anggota dan pengurus PWI, IWO (Ikatan Wartawan Online), IWO Indonesia, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

Sementara itu, Ketua Pengadilan OKI/OI, Tira Tirtona, SH, M.Hum, menjelaskan peran pengadilan dalam proses pemilu yang terkait dengan tindak pidana pemilu.

Ia menyatakan bahwa pengadilan menerima berkas dari Bawaslu dan akan menyidangkan berdasarkan hukum acara khusus yang berkaitan dengan tin-



informasi yang salah.

“Media merupakan mitra strategis Polri termasuk dalam menyongsong Pemilu. Sinergitas ini harus terus dipelihara,” ucap Andi.

Pabung Kodim 0402/OKI-OI Mayor Inf Jauhari turut mengajak awak media untuk membantu suksesnya Pemilu dengan menyajikan berita yang akurat dan berimbang. Semua informasi terkait Pemilu sebaiknya dikonfirmasi kepada pihak berwenang untuk memastikan kebenaran dan mencegah penyebaran berita hoaks.

Partisipasi media diharapkan dapat membantu pemerintah dan institusi TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan kondusivitas Pemilu.

Sebelumnya Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar mengadakan pertemuan

dak pidana pemilu.

Meskipun pengadilan pada prinsipnya tidak boleh menolak berkas, Tira Tirtona menekankan bahwa penanganan kasus pidana pemilu dapat berdampak baru, terutama dalam konteks massa dan antar golongan.

Ia juga menyarankan untuk mencegah terjadinya kasus seperti merekam percakapan ASN atau Bupati dalam obrolan santai yang kemudian menjadi viral, karena hal tersebut dapat dilaporkan dengan dugaan menghasut.

Tira Tirtona menambahkan komentar bupati mengenai adanya wartawan yang merekam secara diam-diam atas percakapan ASN, atau Bupati dalam suasana obrolan santai lalu viral. Itu dapat dilaporkan dengan dugaan menghasut. ●IRY

KEAMANAN KPU PALI DIPERKETAT UNTUK PEMILU 2024

Serangkaian seleksi calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia telah memasuki babak akhir, termasuk pada KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan.

Ada dua nama lama yang tertulis pada pengumuman calon komisioner KPU kabupaten PALI yang dinyatakan lolos seleksi oleh KPU Pusat. Sedangkan sisanya diisi wajah baru.

Dua nama komisioner KPU yang tetap melanjutkan jabatannya adalah Sunario SE dan Abdul Rahman.

Sunario saat ini menjabat Ketua KPU PALI sedangkan Abdul Rahman menjabat sebagai Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM.

Sedangkan tiga nama baru mengisi komisioner KPU PALI lainnya adalah Dodi Saputra, Ipantri dan Sulaiman.

"Alhamdulillah kami dinyatakan lulus seleksi calon Komisioner KPU dan masih dipercaya untuk menjalankan tugas mensukseskan jalannya Pemilu tahun 2024 ini," ungkap Sunario.

Dikatakan Sunario bahwa terpilihnya kembali dirinya sebagai anggota penyelenggara Pemilu di Kabupaten PALI merupakan amanah yang harus diemban.

"Tugas kami sangat berat, karena kami harus menyelenggarakan jalannya pesta demokrasi di negeri ini khususnya di kabupaten PALI dalam menentukan nasib bangsa lima tahun kedepan," imbuhnya.

Sama halnya disampaikan Abdul Rahman bahwa dirinya

bertekad mensukseskan jalannya Pemilu dari Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif hingga Pemilihan Kepala Daerah.

"Kita akan bersama-sama dengan komisioner lainnya mensukseskan pesta rakyat ini. Dan kami tidak akan mampu mensukseskan Pemilu tanpa adanya dukungan dari masyarakat," ucap Abdul Rahman.

Meski ada peralihan anggota komisioner KPU disaat tahapan Pemilu berjalan, namun disebutkan Abdul Rahman bahwa dirinya dan komisioner baru lainnya akan berupaya tetap meneruskan proses jalannya Pemilu sesuai tahapan yang ditetapkan.

"InsyaAllah tidak akan terganggu tahapan yang tengah berjalan. Dan kami akan jalankan amanah ini sesuai tugas dan fungsi sebagai anggota KPU," tandasnya.

Sebelumnya, Polres PALI melalui Polsek Penukal Abab mengikuti kegiatan

Sosialisasi Persiapan Pengamanan Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten PALI dalam rangka Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Kegiatan dihadiri oleh sejumlah pejabat, antara lain Kasat Pol PP Syahrul Darman, ST, Msi, Camat Penukal Kusteti, SE, Kabid Perlindungan Masyarakat Linmas Pol PP Aska Wendratama S.E., M.M, Kasi Linmas Pol PP Supandi A.MA, Kapolsek Penukal Abab yang diwakili oleh Kani Intel Polsek Penukal Abab Aipda Rudi Hartono, SH, serta Danramil 404-03 yang diwakili oleh Babinsa Serma Yovi.

Turut serta juga Kepala Desa Kecamatan Penukal, Bhabinkamtibmas Polsek Penukal Abab, dan seluruh Sat Linmas Kecamatan Penukal.

Kapolres PALI, AKBP Khairu Nasrudin SIK MH, melalui Kapolsek Penukal Abab IPTU Arzuan SH yang diwakili oleh Kani Intel Polsek Penukal Abab Aipda Rudi Hartono, SH, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memberikan sosialisasi mengenai persiapan pengamanan Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten PALI dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Aipda Rudi Hartono juga menjelaskan maksud dan tujuan dari kegiatan sosialisasi ini sebagai bentuk

kesiapsiagaan menghadapi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, serta memberikan pemahaman mengenai tugas dan larangan yang harus diikuti oleh petugas pengamanan di setiap Tempat



Pemungutan Suara (TPS).

“Kegiatan sosialisasi ini bertujuan agar Sat Linmas di desa-desa dapat berperan aktif, mendukung ketertiban dan ketenteraman menjelang Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, sehingga proses tersebut dapat berlangsung dengan aman dan lancar,” ucapnya.

Aipda Rudi Hartono melanjutkan, kegiatan sosialisasi juga bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai tugas serta larangan bagi petugas pengamanan di setiap TPS.

“Diharapkan, dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini, sinergitas antara TNI, Polri, Sat Pol PP, Linmas, dan instansi terkait dapat terus meningkat, sehingga kesiapsiagaan menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dapat terjaga, demi melindungi hak pilih masyarakat dalam pesta demokrasi di Kabupaten PALI,” harapnya.

Sementara, Satuan Samapta Polres PALI melaksanakan patroli perintis presisi dengan tujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dalam rangka persiapan Pemilu Tahun 2024.

Kegiatan patroli yang dipimpin oleh Ipdan Hengki, didampingi oleh tiga personel lainnya, mengarahkan rutennya ke lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas, seperti kantor KPU Kabupaten PALI dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Tais.

Di Kantor KPU Kabupaten PALI, anggota patroli mendekati petugas keamanan untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas. Mereka juga memastikan bahwa situasi di sekitar kantor KPU tetap kondusif menjelang pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

Sementara itu, di SPBU Tais, anggota patroli memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak berkumpul secara berlebihan dan tetap menjaga ketertiban. Mereka juga berkoordinasi dengan petugas SPBU untuk mengantisipasi potensi terjadinya keributan di tempat umum.

“Kegiatan patroli ini merupakan kegiatan rutin yang kami lakukan guna menjaga kamtibmas di wilayah hukum Polres PALI. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kamtib-

mas dengan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum,” jelasnya.

Dengan melibatkan berbagai lokasi strategis, patroli perintis presisi tersebut menjadi upaya preventif dari pihak kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di wilayah hukum Polres PALI.

Polres PALI telah mengambil langkah proaktif dengan meningkatkan pengamanan di sekitar Kantor KPU Kabupaten

“Ikhtiar ini kami lakukan untuk mencegah potensi gangguan keamanan di Kantor KPU,” ujar IPTU Thomson Angka Wibawa, S.H.

Dalam kesempatan tersebut, IPTU Thomson Angka Wibawa, S.H. juga mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar lingkungan mereka.

“Kami berharap agar masyarakat dapat bekerja sama dengan kami guna menciptakan situasi kamtibmas yang



PALI sebagai bagian dari implementasi Operasi Mantap Brata 2024 yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Dalam operasi tersebut, personel Polres PALI terlibat aktif dalam tugas pengamanan dan pemantauan, termasuk penjagaan bergantian di sekitar kantor KPU. Patroli rutin dilakukan, termasuk pemeriksaan dokumen kendaraan yang masuk dan keluar dari area tersebut.

Pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban diungkapkan oleh IPTU Thomson Angka Wibawa, S.H., yang bertanggung jawab sebagai PAM Kantor KPU.

Ia menyatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa lingkungan Kantor KPU tetap aman dan terkendali.

kondusif menjelang Pemilu 2024,” tambahnya.

Langkah-langkah preventif yang diambil oleh Polres PALI merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan suksesnya Pemilu 2024 dengan situasi yang aman dan terkendali.

Kapolres PALI, AKBP Khairu Nasrudin S.I.K., M.H., beserta rombongan yang terdiri dari Kabag Ops, Kapolsek TL.Ubi, Kapolsek Tanah Abang, dan Kapolsek Penukal Abab yang diwakili oleh Kanit Intelkam Polsek Penukal Abab, menghadiri simulasi pemungutan dan penghitungan suara, serta penggunaan Sistem Rekapitulasi (Sirekap) dalam persiapan Pemilu tahun 2024. Acara ini berlangsung di kantor KPU Kabupaten PALI. •IRY

OPTIMISTIS KINERJA UMKM MENINGKAT

Hingga saat ini, Jawa Timur menjadi provinsi dengan desa devisa terbanyak se-Indonesia. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim, per 31 Desember 2023, tercatat sebanyak 149 desa devisa.

Jumlah tersebut merupakan 25 persen dari total seluruh desa devisa se-Indonesia yakni 613 desa. Sementara untuk Desa Pendulum Devisa di Jatim sebanyak 8 desa.

Atas keberadaan desa devisa ini, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengaku optimis kinerja ekspor UMKM Jatim akan terus meningkat pada 2024. Untuk itu, pihaknya terus mengembangkan Program Desa Devisa bekerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Desa Pendulum Devisa yang bekerja sama dengan Bank Jatim.

"Alhamdulillah desa devisa kita terbanyak nasional. Program desa devisa menjadi salah satu upaya untuk memaksimalkan ekspor komoditas unggulan Jatim," kata Khofifah, Senin, 8 Januari 2024.

Beragam komoditi Desa Devisa antara lain meliputi Tenun Gedog Tuban, Jahe serta Gula Aren Pacitan, Batik Aromateraphy Bangkalan, Kopi Bondowoso, Daun Kelor Sumenep, Kendang Jimbe Blitar hingga Udang Vaname Situbondo dan Rumput Laut Sidoarjo.

Khofifah menjelaskan, pelaku usaha yang tergabung dalam Program Desa Devisa maupun Desa Pendulum Devisa akan mendapatkan pembinaan intensif. Utamanya, untuk peningkatan kualitas produk, manajemen

keuangan dan pemasaran serta fasilitasi pembiayaan ekspor.

"Semua ini terbentuk atas sinergitas dan kolaborasi yang baik antara Pemprov Jatim, Pemkab/Pemkot, LPEI, Bank Jatim serta pelaku usaha. Dengan jumlah desa devisa yang dimiliki Jatim ini, saya optimistis akan menjadi pendongkrak kinerja ekspor kita," tegas Khofifah.

Sebagai informasi, Jawa Timur mencatat nilai ekspor nonmigas sebesar USD2,02 miliar pada periode November 2023, meningkat sebesar 1,36 persen (m-to-m) dibandingkan Oktober 2023.

"Bahkan, Jatim merupakan penyumbang nilai ekspor sebesar 8,6 persen dari total nilai ekspor nasional," tegasnya.

Selain itu, Khofifah juga menjelaskan, pada 2023 telah melakukan pelepasan ekspor beberapa komoditi Desa Devisa, yaitu daun kelor senilai

USD40 ribu ke Jerman, kendang jimbe senilai USD17 ribu ke China dan rumput laut Gracillaria senilai USD10 ribu ke Australia.

Komoditi lain seperti gula aren juga telah diekspor ke Kanada sebanyak 1,3 ton. Sedangkan udang vaname, jahe dan kopi hingga saat ini rutin menyuplai oftaker serta eksportir besar.

"Diharapkan pada 2024 ini makin banyak komoditi desa devisa yang dapat merambah pasar ekspor secara mandiri," jelas Khofifah.

Oleh karenanya, dengan potensi besar tersebut, Khofifah mengajak para pemangku kepentingan terkait untuk menemu kenali produk unggulan berorientasi ekspor mana yang diproduksi secara massal oleh suatu desa.

"Ketika kita temukan dan sudah dilihat berdasarkan indikator untuk mengembangkan sebuah desa menjadi Desa Devisa, dengan mempertimbangkan sejumlah aspek yaitu produk, konsistensi dan keberlanjutan produksi, pemberdayaan masyarakat dan koordinasi antar pemangku kepentingan, produsen dan manajerial, infrastruktur dan sarana penunjang lain sesuai standar Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)," jelasnya detail.

Saat ini, Jatim memiliki negara tujuan ekspor utama khususnya sektor nonmigas. Sejak Januari-November

2023 tercatat beberapa wilayah

negara sebagai tujuan ekspor produk asal

Jatim. Negara tujuan tersebut

antara lain

ASEAN,
Amerika,
Eropa,
Afrika,



Australia dan New Zealand serta benua Asia lainnya.

"Kami optimis bukan hanya kinerja ekspor yang berdampak, melainkan pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional pun akan berdampak. Inilah mengapa saya tegaskan untuk pengembangan desa devisa ini harus masif," tuturnya.

Lebih jauh, Khofifah mengatakan desa devisa juga bisa difungsikan sebagai objek wisata. Harapannya, keberadaan produk lokal unggulan bisa jadi perekat kebhinekaan melalui ke-cintaan pada produk lokal.

"Kalau kekayaan ini kita rawat, maka ini bisa jadi perekat bangsa. Kearifan yang dimiliki bangsa dan membangun kebersamaan adalah sesuatu yang dibutuhkan hari ini dan di kemudian hari," ujarnya.

KUR Meningkat

Penyaluran Kredit Bank Jatim kepada pelaku UMKM terus menunjukkan performa yang positif dari tahun ke tahun. Hal itu disampaikan oleh Direktur Mikro, Ritel, dan Menengah Bank Jatim, R Arief Wicaksono, dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyaluran KUR Tahun 2024 dan Evaluasi Penyaluran KUR Tahun 2023.

"Kami bersyukur dalam perkembangannya, KUR Bank Jatim mendapatkan antusias luar biasa di kalangan masyarakat Jawa Timur, khususnya pelaku UMKM. Hal tersebut dibuktikan dengan terus meningkatnya kuota dan angka penyaluran KUR Bank Jatim terhadap pelaku usaha sejak 2021," ujar Arief dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 9 Januari 2024.

Arief mengungkapkan, pada 2021, Bank Jatim mendapat kuota KUR sebesar Rp700 miliar. Dari angka tersebut, yang berhasil disalurkan sebesar 88,7 persen. "Untuk jumlah debitur KUR 2021 sendiri sebanyak 4.928," tutur Arief.

Selanjutnya, pada 2022, Bank Jatim berhasil memperoleh kuota KUR senilai Rp2,5 triliun. Persentase penyalurannya sekitar 95,19 persen dengan jumlah debitur 19.159 orang. "Angkanya meningkat signifikan. Maka dari itu pada tahun tersebut, Bank Jatim berhasil mendapat penghargaan sebagai bank

penyalur kredit KUR terbaik se-Jawa Timur," tegas Arief.

Selanjutnya pada 2023, kuota KUR Bank Jatim juga meningkat lagi yaitu di angka Rp2,89 triliun. Yang sukses disalurkan sekitar 96 persennya dengan jumlah debitur 22.253. Dengan data itu, lanjutnya, Bank Jatim semakin dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi mitra KUR. Terlebih lagi, tahun ini, Bank Jatim juga telah dipercaya untuk menyalurkan KUR Syariah. Sejak diluncurkan November 2023, antusiasme masyarakat terhadap KUR Syariah Bank Jatim cukup tinggi.

"Dalam dua bulan pertama ini, KUR Syariah Bank Jatim sudah bisa realisasi Rp11,959 miliar. Kami optimis KUR

keberadaannya," jelasnya.

Oleh karena itu, support program pembiayaan dinilai sangat penting karena dapat menumbuhkan pelaku usaha baru serta bisa meningkatkan daya saing UMKM agar mampu meningkat ke skala usaha yang lebih besar lagi.

"Kami tentu berharap dengan adanya program KUR ini dapat membuat UMKM bertransformasi dan naik kelas menjadi usaha menengah sampai usaha besar," kata Arief.

Sementara itu, Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gede Edy Prasetya, menjelaskan, penyaluran KUR di Jawa Timur sejak Januari hingga 31 Desember



Syariah akan tumbuh pesat mengingat di Jawa Timur banyak sekali pondok pesantren," ungkapnya.

Pihaknya berharap, kegiatan sosialisasi seperti ini dapat dilakukan secara berkelanjutan sebagai wujud Bank Jatim hadir dalam memenuhi kebutuhan finansial masyarakat Jawa Timur, khususnya bagi pelaku UMKM.

"UMKM punya peran penting dan strategis dalam perekonomian Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Sebab, pelaku UMKM merupakan bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat dan sekaligus penopang perekonomian Indonesia yang memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja cukup besar. Jadi harus didukung

2023 telah mencapai Rp39,9 triliun dan telah disalurkan kepada 777.659 debitur.

"Angka ini terbesar kedua secara nasional," ucapnya.

Adapun porsi terbesar penyaluran KUR di Jawa Timur selama 2023 berada di sektor perdagangan (42,09 persen), pertanian (34,47 persen), dan jasa-jasa (13,86 persen).

"Bank Jatim menjadi penyalur KUR terbesar keempat di Jawa Timur dengan total penyaluran sebesar Rp2,76 triliun kepada 21.842 debitur. Untuk 2024, total plafon penyaluran KUR Bank Jatim berada di angka Rp3,75 triliun. Rinciannya, KUR konvensional Rp3,4 triliun dan KUR Syariah Rp306 miliar," ungkapnya. ●

TARGETKAN PARTISIPASI PEMILIH 80 PERSEN

Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menargetkan partisipasi Pemilu di Jawa Tengah bisa mencapai 80 persen. Karenanya, Nana melakukan konsolidasi dan silaturahmi bersama 18 partai politik.

“**J**adi hari ini memang sengaja mengundang Forkopimda, DPRD, Ketua KPU, Bawaslu, ada 18 parpol yang ada di Jateng. Kegiatan mengarah pada silaturahmi dan konsolidasi dengan tema Menciptakan Pemilu Damai di Jateng,” kata Nana di Hotel Grasia Semarang, Jumat, 12 Januari 2024.

Nana menuturkan, piaknya mengajak 18 partai politik peserta pemilu untuk bersatu, berkolaborasi, dan bekerja sama menciptakan Pemilu damai. Menurutnya, ada empat indikator agar pemilu berjalan sukses, yang pertama partisipasi masyarakat.

“Untuk partisipasi masyarakat, ini kita harapkan, target kami ada 80 persen, syukur naik,” sambungnya.

Oleh karena itu, perlu ada kerja sama agar masyarakat mau mendatangi tempat pemilihan suara (TPS). Selain peran pemerintah, Forkopimda, KPU, Bawaslu, yang paling penting adalah peran partai politik, supaya mereka menyuarakan dan mendukung masyarakat agar mau ke TPS.

Indikator kedua adalah tahapan pemilu yang harus berjalan baik. Sampai saat ini tahapan pemilu telah berjalan baik. Hingga memasuki masa kampanye pun, secara keseluruhan situasi kondusif dan berjalan baik.

Selanjutnya, indikator ketiga adalah bagaimana menciptakan iklim kondusif. Pihaknya bekerja

sama dengan TNI, Polri, partai politik, KPU, dan Bawaslu, terus melakukan persiapan hingga cukup matang. Termasuk mengantisipasi permasalahan yang berpotensi terjadinya kerawanan, sehingga pemilu dapat berjalan baik.

Adapun indikator keempat adalah roda pemerintahan dari pusat sampai daerah dapat berjalan dengan baik. Artinya, pelayanan pemerintah tidak mengalami gangguan. Karenanya, perlu diupayakan agar pelayanan masyarakat berjalan maksimal.

Nana juga menilai, kian dekatnya pelaksanaan pemungutan suara, tepatnya pada 14 Februari 2024, biasanya konstelasinya akan meningkat. Maka hal itu perlu diantisipasi, dengan memaksimalkan peran semua unsur yang terlibat.

“Misalnya, semua partai politik harus betul-betul (maksimal). Karena juga akan memasuki masa k a m p a n y e

umum, kampanye terbuka, harus mampu mengendalikan simpatisannya, harus siaga, dan terus melakukan imbauan untuk ikuti aturan yang ada. Untuk menciptakan pemilu damai, pemda, TNI-Polri juga harus betul-betul siaga mengamankan, dan siap di kegiatan-kegiatan yang dilakukan partai politik,” ujarnya.

Pindah Pemilih

Sementara itu, Ketua KPU Jateng, Handi Tri Ujiono, memuji langkah Nana yang mendukung penuh seluruh tahapan pemilu agar berjalan aman dan target partisipasi pemilu sebesar 80 persen. Supaya tingkat partisipasi pemilu naik, katanya, ada beberapa langkah yang dilakukan.

“Yang pertama adalah memastikan soal daftar pemilih itu bersih, artinya bersih itu pemilih kegandaan itu tidak ada. Kedua, bagaimana kita memfasilitasi dalam hal pemilih pada hari H berhalangan untuk nyoblos di TPS-nya, dengan fasilitas untuk bisa memilih. Jangan sampai persoalan mobilitas itu menjadi halangan,” kata Handi.

Dia juga menyampaikan, pada masyarakat yang tidak bisa menggunakan hak pilih pada hari H di tempat sesuai terdaftar, masih ada kesempatan untuk



mengajukan pindah memilih. Itu upaya KPU selain juga sosialisasi dan pendidikan politik pada para pemilih.

Memasuki H-32 hari menuju pemilu, Handi menuturkan, surat suara masih ada yang kurang lengkap di DPRD kabupaten/kota. Namun dipastikan sebelum 14 Februari 2024, sudah bisa sampai ke gudang di kabupaten/kota.

"Kami akan melakukan sortir lipat, kemudian pengepakan di dalam kotak suara. Lima kotak suara untuk masing-masing TPS, dan insyaallah di H-7 sudah sampai di kecamatan, H-3 sudah

Kota Lama Semarang, Senin, 8 Januari 2024.

Menurut Nana, ketika memasuki masa pemilu, segala cara dapat dilakukan dalam memenangkan kontestasi. Untuk itu, ia meminta agar kondusivitas yang sudah terbentuk selama ini dapat dijaga.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak seluruh jurnalis untuk bersinergi dalam menjaga kondusivitas di Jawa Tengah. Jurnalis diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam menangkalkan hoaks, ujaran kebencian, dan

Nana berharap, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan media massa atau wartawan, dapat terus terjalin, khususnya dalam menangkalkan hoaks.

"Kominfo saya minta untuk terus patroli di dunia maya. Rekan media juga saya minta bisa menangkalkan berita yang tidak benar yang beredar di media sosial, sebab masyarakat masih percaya dengan media mainstream," jelasnya.

Dia menambahkan, baik pemerintah maupun media massa memiliki tujuan yang sama, yaitu mencerdaskan dan menyejahterakan masyarakat. Un-



sampai di desa/kelurahan, H-1 sudah diterima oleh KPPS," terangnya.

Jaga Kondusivitas

Nana Sudjana juga meminta masyarakat untuk mempertahankan kondusivitas politik di wilayahnya. Apalagi, tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024, semakin dekat.

"Kami terus koordinasi dengan beberapa partai untuk saling menjaga kondusivitas," kata Nana saat acara ramah tamah dengan Forum Wartawan Provinsi Jawa Tengah (FWPJT), di

narasi provokatif, yang berpotensi terjadi di media sosial.

"Kami juga berharap kepada rekan-rekan media, khususnya jurnalis, ikut berperan dalam hal menyampaikan informasi secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Nana.

Menurutnya, saat masa Pemilu, potensi penyebaran informasi yang mengandung hoaks, hate speech, dan provokasi di kanal-kanal media meningkat. Karenanya, perlu ada upaya bersama baik dari pemerintah, aparat hukum, penyelenggara pemilu, maupun para jurnalis untuk menekan semua itu.

tuk itu, pemerintah dan media massa harus saling mendukung dan membantu dalam hal pemberian informasi.

"Kita sama-sama melayani masyarakat. Tujuannya sama, untuk mencerdaskan dan menyejahterakan masyarakat. Kalau perlu kita bentuk tim bersama," tegasnya.

Sementara itu, Ketua FWPJT, Damar Sinuko, menyatakan, berkomitmen untuk bersinergi dengan lembaga eksekutif dan legislatif di Jateng. Dia juga mengapresiasi fasilitasi dari pemprov untuk rekan media, salah satunya press room yang ada di Kantor Gubernur Jawa Tengah. ●



BERSOLEK MENUJU HARI KEMERDEKAAN PERTAMA DI IKN

Kementerian Sekretariat Negara mulai mempersiapkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia yang diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2024. Upacara dan rangkaian kegiatan itu merupakan yang perdana dihelat di IKN.

Sekretaris Kemensetneg, Setya Utama, menyampaikan, seluruh pihak berkomitmen untuk menyelenggarakan peringatan puncak bulan kemerdekaan Indonesia di ibu kota baru tersebut. Hal itu lantaran semua instansi juga dilibatkan dalam rapat persiapan tersebut.

"Kami dipimpin Pak Kasetpres tadi dengan semua kementerian, lembaga, kemudian dari TNI dan Polri, melakukan rapat pertama, rapat besar pertama untuk persiapan Hari Kemerdekaan ke-79 yang akan dilakukan di Ibu Kota

Negara Nusantara, itu yang pertama kalinya," ucap Setya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 9 Januari 2024.

Setya mengatakan, persiapan penyelenggaraan HUT ke-79 RI tersebut harus dibahas sesegera mungkin. "Kami punya waktu delapan bulan, dan biasanya memang di Jakarta pun, di Istana Negara Jakarta pun, kami laksanakan persiapan jauh-jauh hari. Nah, untuk IKN kami mulai dari Januari ini," ujarnya.

Kepala Sekretariat Presiden, Heru



Budi Hartono, menyampaikan, dalam pertemuan itu, pihaknya meminta agar segera dibahas persiapan masing-masing bidang sesuai kondisi IKN. Dia ingin agar semua pihak yang terlibat bisa mengikuti peringatan kemerdekaan di IKN.

“Saya minta per bidang, ada bidang komunikasi, bidang upacara, bidang sarana prasarana, infrastruktur untuk segera mereka bidang-bidang itu merapatkan, membahas sesuai dengan bidangnya, dan tentunya membahas terkini yang disesuaikan dengan kondisi IKN pada saat nanti bulan Agustus,” jelas Heru.

Selain itu, Heru juga meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar segera menyiapkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) lebih cepat dibanding dengan tahun sebelumnya. Dia pun meminta agar

proses latihan pasukan tersebut agar dapat segera dimulai.

“Paskibra yang biasanya itu baru terbentuk itu sekitar bulan Mei, saya minta



Alokasi dana dari APBN itu juga termasuk untuk pembangunan Pemerintah Daerah Khusus (Pemdusus) Kota Nusantara

lebih cepat lagi, termasuk pasukan inti sudah mulai dibentuk dari TNI kalau bisa mulai Maret sudah ada, sehingga latihannya sudah sedini mungkin. Yang pertama mungkin latihannya ada di Jakarta dibuat simulasi mirip seperti di IKN, dan lanjut nanti persiapan-persiapannya di bulan Juni, Juli, dan Agustus,” ucap Heru.

Pertemuan itu juga membahas

dasi, hotel dan lain-lain, termasuk rute siapa yang menginap di Balikpapan, siapa yang menginap di Samarinda, pick up-nya bagaimana lantas nanti menggunakan kendaraan listrik titiknya di mana, itu kita bahas dan pendetailan hari ini dan seterusnya masing-masing tadi,” ucap Heru.

Heru selaku panitia bersama pihak terkait juga akan melakukan peninjauan langsung ke IKN dalam waktu dekat untuk memastikan detail rute di IKN.

Menurut Istana, persiapan penyelenggaraan upacara kemerdekaan 17 Agustus 2024 di IKN akan mirip dengan persiapan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi yang sebelumnya sudah dilakukan.

Istana menyebut, meskipun upacara akan dilakukan secara hybrid yakni luring dan daring, namun tetap banyak akomodasi yang harus disiapkan karena upacara akan dihadiri masyarakat dari seluruh Indonesia serta para duta besar negara sahabat.

Mabes TNI juga menyampaikan dukungan penuh dalam menyelenggarakan acara sebagai momentum



dukungan sarana prasarana, termasuk akomodasi untuk kebutuhan menginap setiap pihak yang akan terlibat dalam perayaan HUT RI perdana di IKN. Heru menyebut nantinya akomodasi akan tersebar di sejumlah tempat.

“Yang ketiga adalah termasuk membahas terkait dengan kesiapan akomo-

bersejarah ini. “TNI siap mendukung, kita harus mempersiapkan secara maksimal termasuk tempat acara, jumlah pasukan, dan TNI akan menyeleksi prajurit terbaiknya yang akan dilibatkan dalam upacara tersebut,” jelas Kepala Staf Umum TNI, Letjen TNI Bambang Ismawan.

• INFO ISTANA

Sebagai bagian dari persiapan, Bambang menegaskan kesiapan TNI dalam mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan acara itu. Peringatan Hari Kemerdekaan RI diharapkan dapat menjadi momen yang menginspirasi dan memperkuat rasa cinta Tanah Air di kalangan masyarakat.

2022, belanja negara untuk IKN sebesar Rp5,5 triliun dan pada 2023 belanja mengalami peningkatan yaitu Rp26,7 triliun.

"Untuk 2024, belanja IKN akan lebih besar yaitu Rp40,6 triliun. Ini terutama untuk basic infra dan sampai kemudian IKN-nya bisa terbangun," ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN

menyangkut pemerintahan dan semua infrastruktur yang bersifat barang publik (public goods). Artinya, pembangunan tidak komersial harus dilakukan pemerintah pusat seperti infrastruktur jalan, penyediaan air bersih, sektor persampahan dan yang lain-lain.

"Alokasi dana dari APBN itu juga termasuk untuk pembangunan Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus) Kota Nusantara," ujarnya.

Tetapi rincian pembangunan lanjutan infrastruktur dasar ibu kota negara masa depan Indonesia dengan dana sekitar Rp40 triliun dari APBN 2024 itu, menurut dia, yang menentukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

OIKN menargetkan pembangunan IKN pada 2024 sudah menampilkan satu ekosistem sebagai kota yang cerdas untuk memudahkan dan membuat penghuni lebih nyaman hidup dan tinggal di kawasan itu.

Membangun satu ekosistem kota yang cerdas itu, kata dia, turut melibatkan investor domestik, asing maupun investor domestik-internasional (gabungan/kerja sama).

Pembangunan IKN di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur, salah satu proyek yang dibiayai APBN. Kemudian dana pembangunan IKN juga berasal dari kemitraan pemerintah dengan swasta



Anggaran Meningkat

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melaporkan, realisasi penyaluran anggaran untuk pembangunan IKN tercatat sebesar Rp26,7 triliun sepanjang 2023 atau 97,6 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 27,4 triliun.

Dana yang dikeluarkan APBN ini didominasi pembangunan infrastruktur sebesar Rp23,8 triliun, terutama untuk kompleks dari istana, kawasan inti pemerintah pusat, tower rumah susun untuk ASN dan pertahanan keamanan.

Pembangunan infrastruktur IKN juga mencakup untuk pembangunan jalan tol IKN, Jembatan Pulau Balang bentang pendek, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi untuk air bersih dan penanganan banjir.

Sementara untuk pembangunan non-infrastruktur meliputi pembangunan fungsi koordinasi perencanaan, pemindahan IKN, rekomendasi kebijakan, dukungan pengamanan terutama untuk Polri dan operasional dari Otoritas IKN. Sebelumnya pada

Kita di Gedung Djuanda 1, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 2 Januari 2024.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono, juga menyebutkan APBN 2024 mengalokasikan dana lebih kurang Rp40 triliun untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan IKN.

Menurutnya, alokasi dana dari APBN penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar IKN karena



(public private partnership) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta dari investasi sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bambang menambahkan, target investasi dana pembangunan Kota Nusantara, ibu kota masa depan Indonesia, bukan berasal dari non-APBN pada 2024 lebih kurang Rp100 triliun.

"Kami optimistis akan lebih banyak lagi investor yang menanamkan modal jangka panjang di Kota Nusantara pada 2024," kata Bambang.

Ia mengatakan, dana pembangunan ibu kota negara masa depan Indonesia di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur



Peletakan batu pertama tanda dimulainya sejumlah pembangunan fisik baru di kawasan IKN tahap empat oleh Presiden Jokowi dalam bulan ini

itu disebutkan Presiden Jokowi lebih kurang Rp466 triliun dengan hitungan sekitar 19-20 persen berasal dari APBN.

Sepanjang 2023, menurut dia, 23 investor dari dalam negeri yang telah melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda mulai melakukan pembangunan di ibu kota negara baru Indonesia dengan nilai investasi non-APBN lebih kurang Rp41 triliun.

Menurut dia, investasi yang sudah masuk dan yang bakal masuk di ibu kota negara baru itu, berasal dari berbagai sektor dengan skala investasi yang berbeda-beda.

Bambang juga mengatakan Presiden Jokowi dijadwalkan pada Januari 2024 akan kembali melakukan peletakan batu pertama tanda dimulainya sejumlah pembangunan fisik baru tahap



empat di kawasan IKN.

"Peletakan batu pertama tanda dimulainya sejumlah pembangunan fisik baru di kawasan IKN tahap empat oleh Presiden Jokowi dalam bulan ini," kata Bambang.

Peletakan batu pertama yang akan dilakukan Presiden Jokowi di kawasan Kota Nusantara itu, lanjut dia, di antaranya proyek pembangunan kantor instansi pemerintahan, taman botani, hotel bintang tiga dan pembangunan pendukung lainnya.

Namun, OIKN belum dapat memastikan tanggal pelaksanaan peletakan batu pertama tahap keempat tersebut, karena masih menunggu penyesuaian agenda kegiatan Presiden Jokowi.

Menurut dia, sejumlah pembangunan di kawasan ibu kota negara baru Indonesia bukan hanya menggunakan dana yang bersumber dari APBN, tetapi juga melibatkan dana investasi dari in-

vestor. Investasi yang masuk ke Kota Nusantara hingga awal 2024, menurut dia, sebagian besar tercatat berasal dari investor domestik.

OIKN mengutamakan membangun ekosistem di ibu kota negara masa depan Indonesia sebagai kota yang cerdas untuk memudahkan dan membuat penghuni lebih nyaman hidup dan tinggal di kawasan itu.

"Kendati investor lokal, tapi sebagian besar telah bekerja sama dengan investor internasional. Keterlibatan investor domestik maupun asing sama penting untuk mewujudkan ekosistem sebagai kota yang cerdas," tambahnya.

OIKN meraih total realisasi komitmen permintaan investasi mencapai lebih kurang Rp41,4 triliun selama tiga rangkaian peletakan batu pertama dimulainya pembangunan fisik baru di Kota Nusantara tahap satu hingga tahap tiga pada 2023. ●



CALEG MUDA GIAT BERTARUNG TARIK PERHATIAN MILENIAL

Politisi muda sedang giat bertarung dalam Pemilihan Legislatif 2024, termasuk di wilayah Sulawesi Utara (Sulut). Mereka didorong oleh partai untuk menarik perhatian pemilih milenial dan generasi Z.

Salah satu dari mereka adalah Risal Faisal Pou, calon legislatif (caleg) muda yang berambisi berkontribusi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara. Ia mencalonkan diri dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) di Dae-

rah Pemilihan (Dapil) IV Sulawesi Utara, khususnya Bolaang Mongondow Raya (BMR).

Risal Pou, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum BSG City Official, menyatakan bahwa keputusannya untuk mencalonkan diri di Dapil IV Sulawesi Utara adalah upaya untuk memperkuat posisi NasDem di Bolaang Mongondow Raya.

Ia berharap dapat membawa NasDem menjadi kekuatan yang lebih besar di wilayah tersebut. Selain itu, Risal Pou ingin berkontribusi dalam memajukan daerahnya dengan memanfaatkan pengalaman yang telah ia kumpulkan selama ini.

"Saya ingin berkontribusi dalam memajukan daerah dengan memanfaatkan pengalaman yang saya kumpulkan selama ini," ungkapnya, belum lama ini.

Pemilihan Risal Pou di Dapil IV Sulawe-

si Utara juga didorong oleh kedekatannya dengan masyarakat Bolaang Mongondow Raya.

Ia memilih untuk fokus di Tanah Totabuan, menunjukkan komitmen untuk melayani dan membangun daerah tersebut.

"Permintaan untuk berkiprah di BMR tidak hanya datang dari teman-teman dan masyarakat setempat, tetapi juga dari tokoh-tokoh masyarakat di daerah tersebut maupun di luar daerah," ungkapnya.

Risal Pou menyadari tanggung jawab besar yang diembannya dan menganggapi dukungan yang diterimanya sebagai amanah untuk memajukan daerahnya.

Meskipun ini kali pertamanya mencalonkan diri di DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Risal Pou bukanlah sosok baru

dalam dunia politik. Ia telah aktif selama 5 tahun, terutama dalam mendukung pertumbuhan partainya.

Meskipun usianya relatif muda untuk dunia legislatif di tingkat provinsi, Risal Pou meyakinkan bahwa relasinya yang luas dan perannya sebagai Ketua Umum komunitas anak muda memberikan kontribusi nyata dalam membangun Sulawesi Utara.

Ia merasakan dukungan yang besar dari masyarakat setiap kali mengunjungi berbagai daerah, dan melihat antusiasme mereka sebagai harapan besar terhadap pemimpin yang benar-benar memperjuangkan aspirasi mereka.

"Saya juga merasakan dukungan yang besar dari masyarakat setiap kali mengunjungi berbagai daerah dan melihat antusiasme mereka sebagai harapan besar," tambahnya.

Risal Pou juga menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia dan potensi pariwisata dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian daerah.

Ia percaya bahwa penanganan serius terhadap sumber daya manusia dapat membawa dampak positif terhadap kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Selain itu, pengelolaan potensi pariwisata dengan baik dapat menjadi

sumber pendapatan signifikan dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat.

Dengan dukungan kuat dari keluarga, partai, kerabat, rekan bisnis, dan masyarakat, Risal Pou berharap dapat menjadi salah satu pemenang dalam Pemilu Legislatif 2024. Ia berkomitmen untuk mewujudkan harapan dan aspirasi bersama demi kemajuan daerahnya, termasuk dalam hal pengembangan sumber daya manusia dan potensi pariwisata.

Risal Faisal Pou merupakan anak muda yang lahir di Gorontalo, 11 April 1997 dengan organisasi, KNPI Kabupaten Gorontalo 2017-2018, LSM Gorontalo 2017-2019, Kadin Gorontalo 2017-2018 dan Ketua Komunitas BSG City 2022-Sekarang

Dalam proses konsolidasi caleg di Sulawesi Utara, Partai NasDem telah mematangkan kesiapan para caleg dengan mengadopsi metode kolaborasi yang sesuai dengan pembagian wilayah kerja

prioritas (WKP) dan Wilayah Kerja Independen (WKI).

Wakil Ketua Dewan Pakar DPW Partai NasDem Sulawesi Utara, Tatong Bara mengungkapkan, bahwa para caleg NasDem tidak hanya terpaku pada wilayah kerja prioritas, tetapi juga diberikan keleluasaan untuk mencapai kesuksesan bersama.

"Istilahnya WKI, jika kita memiliki kawan atau keluarga, kita dapat bergerak bebas di seluruh Sulut. Kita juga diberi tugas untuk mensosialisasikan diri sesuai dengan nomor urut di tingkatan masyarakat. Selanjutnya, kita mencoba berkolaborasi dalam tugas-tugas untuk mendapatkan dukungan sebanyak mungkin," jelas Tatong Bara.

Tatong Bara melanjutkan bahwa seluruh caleg di Sulawesi Utara mendapatkan panduan terkait sosialisasi dan aktivitas caleg, serta bagaimana kolaborasi antara caleg DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

"Sebagai contoh, saya sebagai nomor urut 1 di Bolmong Raya, Mitra, Manado, dan Minut. Beberapa di antaranya melakukan kolaborasi dengan caleg DPRD Provinsi di bawah DPR-RI. Dengan begitu, wilayah kerja prioritas caleg DPR-RI nomor urut 1 akan terlihat," ungkapnya, menjelaskan bahwa hal ini juga berlaku untuk seluruh tingkatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Lebih lanjut, Tatong Bara memberikan contoh konkret, yaitu Wakil Ketua DPRD Kota Manado, Kakak Adrey Laikun, yang merupakan caleg DPRD Kota Manado dan menjadi mitra kolaborasi di wilayah kerja prioritas, khususnya di dapil Tuminting, Bunaken, dan Bunaken Kepulauan.

"Saya dapat bekerja sama dengan baik, baik dalam hal logistik maupun sosialisasi di masyarakat. Inshaallah, kerjasama ini akan berlanjut hingga Kakak Adrey meraih suara besar, dan DPR-RI juga meraih dukungan yang signifikan," tambahnya.

Selain sebagai incumbent, Kakak Adrey Laikun juga merupakan pendulang suara terbanyak dan menjadi aset berharga bagi Partai NasDem.

• IRY

SERING BACA KORAN, WILLIAM ADITYA SARANA TERPAPAR POLITIK

William Aditya Sarana, seorang tokoh Generasi Z, tengah berjuang sebagai calon anggota legislatif (Caleg) DPRD DKI Jakarta dalam Pemilu 2024. Ia berbagi pengalaman mendaftar sebagai caleg ketika masih menjalani kuliah pada 2019.

William, yang kini merupakan calon petahana di DPRD DKI, telah menjadi anggota legislatif termuda di DPRD DKI pada usia 23 tahun pada tahun 2019.

Pengenalan William terhadap dunia politik bermula saat ia masih bersekolah di SMA dan melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dengan konsentrasi Hukum Tata Negara.

"Pertama kali tertarik pada dunia politik ketika masih SMA dan membaca koran secara rutin. Saya selalu membaca koran selama jam istirahat. Itu merupakan paparan awal saya terhadap politik sebelum melanjutkan ke Kampus," ujar William.

Meskipun menjadi caleg dari PSI di Dapil 9 (Tambora, Kalideres, Cengkareng), William tidak setuju dengan pandangan bahwa terlibat dalam politik memerlukan usia yang 'tua.'

Baginya, Generasi Z atau kaum muda tidak boleh diabaikan dalam dunia politik, terutama dalam konteks Pemilu.

"Pandangan bahwa politik hanya untuk mereka yang 'berumur' memang ada, tetapi tidaklah signifikan. Itu adalah pandangan lama. Pemilu 2019 atau 2024 akan ditentukan oleh partisipasi pemilih muda. Tidak ada yang bisa

meremehkan peran anak muda dalam politik. Mereka merupakan 60 persen dari populasi Indonesia, dan 41 tahun ke bawah," tandasnya.

William mencatatkan dirinya sebagai anggota legislatif termuda di DPRD DKI.

Pada bulan Oktober 2019, ketika baru menjabat sebagai

Anggota DPRD

DKI, William

mencip-

takan

kehebo-

han di

kalan-

gan

publik

dengan

men-

gungkap

rencana

anggaran

Pemerintah

Provinsi DKI

Jakarta yang

dianggap

tidak wajar.

William membe-

berikan rincian

anggaran

untuk

'lem Aibon' senilai Rp 82,8 miliar.

William membagikan tangkapan layar situs apbd.jakarta.go.id di media sosial. Dalam anggaran tersebut, Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat dideskripsikan menganggarkan dana sebesar Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem Aibon, yang disebut sebagai bagian dari Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri.

Sementara William Aditya Sarana, memberikan saran kepada generasi Z atau anak muda yang berkeinginan untuk sukses dalam pemilihan legislatif (Pileg). Ia menyarankan agar generasi Z memulai karir politik mereka di lingkup DPRD sebagai langkah awal.

William berharap agar semakin banyak anak muda yang terlibat dalam kegiatan legislatif.

"Tips dari saya untuk anak muda, mulailah dari bawah, dari DPRD.

Karena



DPRD ini memiliki cakupan yang tidak terlalu besar," ujarnya.

Dengan fokus yang tidak terlalu besar di DPRD, anak muda dapat mengurangi biaya politik mereka, dan peluang untuk meraih kemenangan pun menjadi lebih besar.

"Jika mereka memiliki banyak teman di daerah pemilihan (Dapil), mereka dapat mengurangi biaya politiknya. Karena kelemahan anak muda biasanya terletak pada keterbatasan dana dan pengalaman. Untuk mengurangi biaya politik,

kampanye di media sosial. Meskipun media konvensional masih menjadi pilihan utama masyarakat, ia menekankan bahwa media sosial terus berkembang pesat.

"Data menunjukkan bahwa di Indonesia, televisi masih menjadi nomor satu, diikuti oleh spanduk dan baliho. Media sosial menempati urutan ketiga. Meskipun masih konvensional, media sosial terus berkembang," katanya.

Secara pribadi, William lebih memilih fokus pada kampanye di media sosial. Dia menekankan perlunya pendekatan

Suriadi menambahkan fenomena kader atau bakal calon legislatif (bacaleg) muda sebenarnya telah menjadi sorotan sejak Pemilu 2019.

Meski demikian, perjalanan mereka dalam dunia politik masih jauh tertinggal dibandingkan dengan para senior mereka.

"Pada dasarnya, secara politik dan pengetahuan, mereka belum sepenuhnya teruji. Pemilih muda saat ini dapat menjadi acuan bagi bacaleg muda, mengingat tren segmen pasar politik pe-



mereka sebaiknya mencalonkan diri di Dapil yang tidak terlalu besar dan memiliki banyak teman di sana, sehingga peluang terpilih lebih besar," ungkapnya.

William juga menggambarkan politik sebagai lari maraton, sebuah kegiatan yang membutuhkan ketahanan dan tenaga.

"Dalam politik, ini seperti lari maraton, bukan sprint singkat. Perubahan dalam politik memerlukan waktu yang panjang. Jadi, bagi anak muda yang terlibat dalam politik, penting untuk mempersiapkan stamina agar dapat bertahan dalam perjalanan panjang ini," tambahnya.

Selain itu, William menyoroti pentingnya

yang berbeda untuk setiap platform media sosial, seperti Instagram, TikTok, dan Facebook, karena pengguna di setiap platform tersebut memiliki karakteristik yang berbeda.

William juga mencatat keberhasilan kampanye di TikTok, seperti terpilihnya Bongbong Marcos sebagai Presiden Filipina pada tahun 2022.

"TikTok merupakan hal baru dalam politik. Ini perlu diperhatikan karena ada contoh presiden terpilih di Filipina yang berhasil meraih dukungan generasi Z melalui TikTok," jelasnya.

Sementara pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Agus

milih pemula merupakan keuntungan tersendiri bagi mereka," ujarnya.

Menurut Agus, meskipun pengalaman dan perjalanan mereka sejak tahun 2019 dianggap masih kurang matang, potensi munculnya pemilih pemula dapat menjadi keuntungan bagi bacaleg milenial, termasuk para bacaleg baru yang akan menantang dalam Pemilihan Legislatif 2024 mendatang.

"Oleh karena itu, dibutuhkan usaha ekstra dari bacaleg baru tersebut untuk meyakinkan calon pemilih pemula dan pemilih nonpemula yang ingin mereka tarik sebagai pemilih konkret dalam kontestasi mendatang," jelasnya. •IRY

BANGGA JADI PETUGAS PARTAI

Menjadi petugas partai sering kali disalahartikan oleh masyarakat dan selalu melekat hanya pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Padahal, hakekatnya semua anggota partai adalah petugas partai.

Hal ini yang selalu ditegaskan oleh Kader PDIP Sumatera Selatan (Sumsel), Yudha Rinaldi untuk meluruskan stigma negatif yang terus berkembang di masyarakat. Bahwa menjadi petugas partai adalah hal yang membanggakan. Tidak hanya itu, kata petugas partai sering kali menjadi

salah persepsi oleh masyarakat, yang mana petugas partai hanya menjadi pesuruh dalam satu partai politik (Parpol).

"Jadi harus kita luruskan, bahwa setiap anggota partai itu adalah petugas partai. Dalam artian petugas partai bukan seseorang yang hanya bisa disuruh-suruh untuk menjalankan perintah," katanya.

Hanya saja petugas partai ini ditugaskan di eksekutif, legislatif, untuk menjalankan intruksi, menjaga amanah, menjaga konstitusi sesuai undang-undang.

Dia mencontohkan, posisi Ganjar Pranowo yang juga merupakan petugas partai sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) dua periode, rekam jeaknya sangat bagus, artinya berhasil menjadi petugas partai.

"Ganjar Pranowo itu juga petugas partai dengan rekam jejak sukses memimpin Jateng selama dua periode," sambungnya.

Yudha Rinaldi sendiri mencalonkan diri di Dapil Sumsel 1 yang meliputi wilayah IB 1, IB 2, Gandus, Bukit Kecil, Jakabaring, SU 1, Plaju, SU 2 dan Ker-

tapati, Jakabaring.

Dikatakan Yudha, menjadi anggota legislatif pada hakekatnya adalah mengemban amanah. Banyak harapan dan aspirasi yang dititipkan, terutama dari masyarakat Kota Palembang dan Sumatera Selatan.

"Amanah diberikan kepada orang-orang yang terpilih, semoga dalam mengemban amanah selalu diberikan petunjuk dan ridho dari Allah SWT," katanya.

Meskipun terdengar sangat klise tapi nyatanya mengemban amanah untuk memperjuangkan aspirasi dari masyarakat benar-benar harus dengan tanggung jawab.

"Saya mengambil contoh saat periode 2009-2014, saat itu komisi pembangunan penganggaran, pengawasan, "bertempur" sesama anggota DPR untuk mengarahkan anggaran untuk dapil untuk kesejahteraan masyarakat," ulasnya.

Berat menjadi anggota dewan, apalagi untuk sumsel, di wilayah Sumsel 1 ada mata pilih 576 ribu dengan alokasi kursi ada 6 orang. Itu artinya ada 576 ribu orang yang menitipkan aspirasinya kepada 6 orang.

"Bisa membayangkan aspirasi 576 r i b u



orang ini dibebankan kepada 6 orang, jadi amanah ini bukan sekedar main-main, bukan hanya mencari jabatan, menjalankan amanah dengan maksimal dan penuh tanggung jawab,” katanya.

Bahkan, kata Yudha, tidak ada yang bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dan yang mengiringi. Sehingga banyaknya amanah yang diberikan wajib untuk ditunaikan dengan sebaik mungkin.

“Harapan banyak digantungkan kepada kita dan kita yang diberi amanah wajib menunaikan,” sambungnya.

Yudha sendiri tidak memperlmasalahakan akan duduk di komisi mana yang ditentukan fraksinya. Ia siap beradaptasi mengingat pengalamannya sebelumnya sebagai anggota DPRD Sumsel.

Saat ini menjabat sebagai Bendahara Pengurus Daerah PDIP Sumsel, Yudha yang sebelumnya pernah menjabat satu periode di DPRD Sumsel pada tahun 2009 hingga 2014, akrab dengan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

“Saya kira tidak akan ada masalah, padahal dapilnya berbeda. Dulu saya mewakili Dapil OKU-OKUS, dan sekarang saya menyerap aspirasi Dapil Palembang yang tentu menghadirkan persoalan berbeda,” ujar Yudha.

Lebih lanjut pemilik Kopi Darat ini menyebutkan, selain menghimpun dan mengadvokasi aspirasi masyarakat di lembaga legislatif, ia juga akan kerap berinteraksi dengan masyarakat jelang pemilu 2024.

“Jadi, kita juga konsentrasi pada pilkada dan pilpres. Apapun arahan yang diberikan partai akan kita laksanakan. Yang pasti, kita siap memperjuangkan suara rakyat demi kesejahteraan masyarakat, khususnya di Sumsel,” jelas dia.

Sementara dijelaskan Yudha, saat bicara terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengusung Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud Md telah melalui pertimbangan yang panjang. Pasalnya, Pilpres ini untuk jadi pemimpin Indonesia bukan hanya pemimpin Partai Politik (Parpol).

Bicara Pilpres 2024 bukan lagi bicara masalah sosok antara Ganjar Pranowo ataupun Mahfud Md, tapi sudah bicara masalah Indonesia untuk masa depan.

Yudha Rinaldi mengungkapkan, pemilihan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md sebagai pasangan Capres dan Cawapres telah melewati masa pertimbangan yang sangat matang, terlebih rekam jejak keduanya yang tidak bisa diragukan.

“Seperti yang diketahui kedua orang ini (Ganjar-Mahfud Md) memiliki rekam jejak yang tidak diragukan lagi, sehingga untuk menjadi kepala negara rasanya sudah sangat pantas,”ungkapnya, saat

adalah pasangan yang tegas, merakyat dan memiliki program-program yang berhasil dan akan dilanjutkan untuk Indonesia bukan hanya di Jateng

“Selain supermasi hukum, banyak faktor-faktor lain seperti kedaulatan pangan harus disampaikan kepada masyarakat, program yang jelas, kesehatan, ada dalam program Ganjar-Mahfud Md, ini yang harus dilihat oleh masyarakat bukan hanya sekedar retorika dan ada sesuatu yg rasional yang harus dijalan-



menjadi bintang tamu podcast infoindonesia, belum lama ini.

Yudha menjelaskan bahwa tidak ada rivalitas antara Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri, mengingat kini bukan lagi untuk kepentingan pribadi tapi negara Indonesia.

“Tidak ada rivalitas antara Jokowi dan Megawati, apalagi karir politik Jokowi dimulai dari PDIP hingga menjadi Presiden RI dan sudah diberikan segalanya,” jelasnya.

Kemudian, keputusan dan pilihan diserahkan kepada masyarakat.

Saat ini tim pemenangan Ganjar-Mahfud gencar melakukan sosialisasi untuk program-program yang akan diwujudkan jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI bukan hanya sekedar gendur atau janji.

Dengan artian diusungnya Ganjar-Mahfud Md ini merupakan pilihan yang tepat untuk Indonesi. Terlebih keduanya

kan bukan sekedar janji,” bebarnya.

“Program yang harus terlihat dan diwujudkan, mau dibawa kemana, jadi bahan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi bukan hanya gestur dan janji,” tegasnya.

Tentunya dalam menentukan pilihan untuk kepala negara lima tahun kedepan bukan hanya berdasarkan karena menyukai sosok, tapi memahami apa saja yang ditawarkan untuk Indonesia.

Sementara pergerakan sosialisasi Capres dan Cawapres di Sumsel mempunyai infrastruktur, dari PDP, PDC, anak ranting yang sudah terbentuk, diberi bekal untuk sosialisasi kemenangan pasangan nomor urut 3 tersebut.

“Kegiatan koalisi sudah mulai TPD Provinsi Kab/Kota di Sumsel sudah terbentuk, unsur partai, pimpinan partai, juga tokoh masyarakat untuk mendukung Capres dan Cawapres Ganjar-Mahfud Md,” pungkasnya. • IRY

INFLASI

Gunawan Effendi

Kabar baiknya, tingkat inflasi pada 2023 mencapai 2,61 persen, terendah dalam kurun waktu dua dekade terakhir. Jadi, tak perlu dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Masih kabar baik pula bahwa Indonesia lebih mengkhawatirkan inflasi tinggi, menggunakan standard 10 persen. Di masa lalu, inflasi yang mendekati atau melebihi 10 persen dalam setahun biasanya melekat dengan sebutan overhoted (terlalu panas).

Salah satu pengertian inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Jadi, jika kenaikan harga barang dan jasa secara umum selama 2023 berkisar 2,63 persen, tentu saja boleh dibilang rendah.

Tak mengherankan jika Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) bersyukur dengan angka inflasi yang rendah sepanjang 2023. Terlebih ia menyaksikan sendiri kondisi harga bahan pokok di berbagai pasar baik di Jawa maupun luar Jawa sepanjang 2023 dan awal 2024.

Mengawali Tahun Baru, Mendag Zulhas berkunjung ke Pasar Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis, 4 Januari 2024. Mendag yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) melihat harga berbagai bahan pokok di Jakarta stabil setelah Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). "Sungguh kita bersyukur dalam meng-handle Nataru tahun ini, pemerintah berhasil menekan inflasi Desember. Inflasi hanya 0,41 (persen) di Desember," ungkap Zulhas.

Khusus harga beras, misalnya, Zulhas menyebut harga masih stabil dan tidak ada kenaikan. Ia menegaskan pemerintah juga terus memperhatikan para petani. "Pemerintah menunjukkan perhatian khusus terhadap kondisi petani, terutama di daerah-daerah penghasil yang mengalami kendala. Dengan demikian, awal tahun 2024 ditandai oleh keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi," ujarnya

Sebelumnya, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyananti mengemukakan angka inflasi pada 2023 menjadi terendah

lantaran komponen inti memiliki tren inflasi yang menurun sepanjang tahun. "Kenapa (terendah)? Karena komponen inti memiliki tren inflasi yang cenderung turun landai selama 2023, di sisi lain administered price (harga yang diatur pemerintah) juga menurun, sejak terakhir naik cukup drastis pada November 2022," kata Amalia, Selasa, 2 Januari 2024.

Ia mengemukakan harga bahan pokok juga tercatat fluktuatif akibat fenomena El Nino. Namun, harga pangan mulai dari Januari sampai Desember 2023 tercatat menurun. "Peran seluruh pemangku kepentingan tentunya berbagai stakeholder serta tim pengendali inflasi baik tingkat pusat maupun daerah sangat signifikan dalam upaya pengendalian inflasi sehingga inflasi di Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan negara lain," ujarnya.

Toh inflasi rendah atau tinggi sebenarnya memiliki tantangan masing-masing.

Inflasi yang terlalu rendah umumnya beriringan dengan daya beli yang menurun. Sebaliknya inflasi yang terlalu tinggi menunjukkan harga-harga yang melambung hingga tak terjangkau oleh warga kebanyakan.

Maka relevan pula untuk mengupayakan angka inflasi terendah dalam 20 tahun terakhir ini agar memicu

pertumbuhan ekonomi pada 2024 dan tahun-tahun selanjutnya melalui peningkatan angka investasi, pendapatan nasional, lapangan kerja, dan jumlah tabungan. Jangan lupa pula perlunya peningkatan nilai dan volume ekspor saat tingkat inflasi rendah. Itulah beberapa tantangan ekonomi pada 2024 yang baru hitungan hari kita jejak.

Tak kurang pula tantangan kondisi politik regional dan global dan dampaknya yang menyertai perjalanan pada 2024. Pada sisi ini, kita harus menunggu pula hasil Pemilu 2024 dan implikasinya terhadap inflasi maupun ekonomi secara keseluruhan. Maka, kita pun perlu mempertimbangkan ekspektasi inflasi: perkiraan konsumen, dunia usaha, juga investor —dalam memperhitungkan kondisi perekonomian Indonesia dalam kaitannya dengan rangkaian transisi politik 2024.

Sungguh angka inflasi hanya satu faktor. Namun, implikasinya terkait bahkan merembet ke mana-mana. ●





INDIKASI SKANDAL JELANG PEMILU 2024

Meski berlangsung serentak, kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) tampak lebih meriah dibandingkan dengan kampanye Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg). Di balik itu, potensi skandal keuangan yang melibatkan partai-partai politik dan fungsionarisnya mungkin mengarah ke disrupsi (gangguan) kemeriahan kampanye anggota legislatif menjelang Pemilu 2024.



• INFO KHUSUS

S etidaknya, sudah dua kali Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengisyaratkan kemungkinan terjadinya skandal keuangan menjelang Pileg dan Pilpres 2024: Pada akhir 2023 dan awal 2024

Skandal disini bermakna penyebaran

katan yang masif dari transaksi mencurigakan. Kenaikan lebih dari 100 persen,” ujar Ivan di sela-sela acara Diseminasi PPATK, Jakarta, Kamis, 14 Desember 2023. Menurut dia, transaksi mencurigakan itu diduga terkait rekening khusus dana kampanye (RKDK).

Berdasarkan pengalaman PPATK,

di KPK sejak 2023 itu.

Ivan juga menyebutkan, pihaknya melakukan penelusuran terkait dana kampanye. Besaran transaksi yang ditelusuri PPATK mencapai triliunan rupiah.

“Kita dapat DCT (daftar calon tetap) kan. Nah, dari DCT kita ikuti, kita melihat memang transaksi terkait dengan



informasi publik tentang pelanggaran atau perbuatan tercela yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Ringkasnya, melanggar hukum.

Pada akhir 2023, PPATK mengungkapkan, telah menemukan data peningkatan transaksi mencurigakan terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebutkan, peningkatan transaksi mencurigakan itu mencapai lebih dari 100 persen.

“Kita menemukan memang pening-

sambungannya, RKDK biasanya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan kampanye sehingga seharusnya tidak flat atau diam. Seharusnya, kata Ivan, aliran dana RKDK bergerak karena dipakai untuk pembiayaan kegiatan kampanye.

Namun, PPATK kini justru menemukan RKDK untuk membiayai kegiatan kampanye politik cenderung flat alias tidak bergerak transaksinya. “Yang bergerak ini justru di pihak-pihak lainnya,” sambung Ivan yang mulai bertugas

Pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK,” ujar Ivan yang meraih gelar LL M di Washington College Of Law, Washington DC, Amerika Serikat.

Lebih lanjut, doktor bidang hukum yang lulus dengan predikat cum laude dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini mengemukakan, setiap analisis yang dilakukan PPATK terkait Pemilu 2024 sudah dikirimkan ke KPU dan Bawaslu.

“Semua sudah kita lihat. Semua sudah diinformasikan ke KPU dan Bawa-

slu. Kita masih menunggu, ini kan kita bicara triliunan,” ujar Ivan.

Di awal 2024, PPATK mengungkapkan pula temuan aliran dana Rp195 miliar dari luar negeri ke 21 rekening bendahara parpol. Dana Rp195 miliar itu hanya mencakup transaksi sepanjang 2023, yang jumlah transaksinya



berlipat ganda dibandingkan dengan angka sepanjang 2022.

Dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2023 dan Proyeksi Kerja Tahun 2024 di Gedung PPATK, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Januari 2024, Ivan mengemukakan bendahara parpol yang dimaksud bukan hanya bendahara umum di tingkat pusat, melainkan juga bendahara parpol level daerah.

Toh Ivan belum merinci lebih jauh bendahara partai mana saja yang menerima duit dari luar negeri tersebut.

Yang jelas, menurut dia, transaksi dari luarnegeri itu meningkat dari 2022 sebanyak 8.270 transaksi menjadi 9.164 transaksi di 2023. “Pada 2022 penerimaan dananya hanya Rp 83 miliar kemudian meningkat pada 2023 menjadi Rp 195 miliar,” ungkap Ivan.

Kepala PPATK yang meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember, Jawa Timur itu juga mengungkapkan kenaikan transaksi pada rekening sejumlah parpol selama 2022-2023. Indikasi kenaikan itu merupakan hasil proses memasukkan enam juta nama pengurus dan anggota parpol ke sistem analisis PPATK.

Alhasil, PPATK menemukan 449.607

uang secara langsung lewat rekening pribadinya, selain yang menerima lewat rekening keluarga atau orang lain. Yang menggunakan rekening orang lain ini malah lebih banyak, mencapai 761.226 nama.

PPATK kemudian merekam aktivitas perputaran uang dalam rekeningnya. Hasilnya ditemukan ada uang yang masuk dari luar negeri senilai Rp 7,74 triliun. “Orang ini menerima uang dari luar negeri sebesar itu. Ada juga yang mengirimkan ke luar,” jelas Ivan.

Seluruh temuan ini, kata Ivan, selanjutnya diserahkan PPATK kepada KPU dan Bawaslu lewat tim Collaborative Analysis Team (CAT). Bila dipandang



laporan terkait nama pengurus dan anggota dari 24 parpol dengan jumlah transaksi mencapai Rp 80,67 triliun. Ivan mengungkapkan, dari setiap rekening ditemukan kenaikan jumlah transaksi rata-rata mencapai 400 persen hingga 2.400 persen tiap parpol.

Namun, ia tidak bisa menyampaikan nama parpolnya karena laporan ini sifatnya intelijen. “Dari partai A sampai partai X, 24 parpol. Jumlah nominal itu Rp80.670.723.238.434, nominal transaksi pengurus dan anggota Parpol yang dilaporkan kepada PPATK,” kata Ivan.

Ia pun mengemukakan, sepanjang 2023, PPATK telah menerima data transaksi keuangan dari 1.040.060 nama Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari seluruh nama itu, ada 256.576 calon legislatif yang menerima

perlu, temuan ini pun bakal disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi, apakah transaksinya berkaitan dengan tindak pidana korupsi atau pencucian uang.

Namun, Ivan menegaskan, PPATK tidak masuk dalam ranah politik dan temuannya bersifat objektif tanpa ada maksud menyerang pihak tertentu. “Kitatetap fokus bagaimana menjaga agar Pemilu ini tidak dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku tindak pidana,” tandasnya.

Bagaimana tanggapan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)? Lembaga pengawas ini mengakui sudah menerima informasi terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang transaksi mencurigakan dalam jumlah besar, yang diduga digunakan untuk keperluan kampanye pada pemilihan umum

• INFO KHUSUS

(Pemilu) 2024.

"Betul, Ketua (Bawaslu) sudah menginformasikan hal termaksud, masih kami dalam," kata Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenti kepada wartawan, Kamis, 14 Desember 2023. Lolly mengatakan, Bawaslu masih menelaah temuan PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan yang mengalir buat kegiatan kampanye Pemilu 2024.

Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menegaskan bahwa pihaknya sejak awal telah menandatangani nota kesepahaman dengan pusat

baru kelihatan karena kan nanti ada siapa menyumbang berapa dan bagaimana, itu ada di laporan awal dana kampanye," tutur Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Desember 2023.

Toh Bagja menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan di luar informasi mengenai rekening dana kampanye atau rekening dana pemilu. Untuk itu, Bawaslu akan melanjutkan kajiannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian dan kejaksaan.

Sedangkan Lolly Suhenty menyam-

saksi tersebut beserta besaran nominalnya. "Bahwa berkenaan informasi yang disampaikan PPATK Bawaslu menerima surat dari PPATK tersebut, namun kami perlu sampaikan ke publik bahwa surat tersebut adalah surat yang bersifat rahasia," ungkapnyanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan jika ada indikasi pelanggaran tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan hal tersebut maka pihaknya akan meneruskan hasil kajian ke aparat penegak hukum.

Pada sisi lain, di akhir 2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan



pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) terkait dana kampanye peserta pemilu.

Terkait temuan PPATK yang menyebut adanya transaksi janggal dana kampanye peserta pemilu, Bawaslu tidak dapat menindaklanjuti lebih jauh. Sebab, pihaknya perlu menunggu laporan peserta pemilu soal Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), sebagai bahan acuan dan pertimbangan.

"Nanti setelah laporan awal dana kampanye tanggal 7 Januari ke atas, itu

paikan bahwa Bawaslu mempunyai kewajiban untuk memastikan data temuan PPATK tak tersebar. "Karena kepentingannya akan banyak. Karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu. Sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye," terang Lolly.

Rahmat Bagja mengemukakan pula, lembaganya tidak dapat memberikan informasi siapa yang terlibat dalam tran-

masih mendalami laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan transaksi janggal terkait dana kampanye Pemilu 2024. Anggota KPU RI August Mellaz mengungkapkan, lembaganya sudah menerima data dari PPATK dan menindaklanjuti dengan kajian dan pendalaman.

"Surat akan kami cek. Nanti akan didalami dan setelahnya kami akan memberikan respons menyeluruh," kata Mellaz, Jumat, 15 Desember 2023.

Selanjutnya, dalam keterangan resminya KPU menyatakan, informasi tentang dugaan sumber dana ilegal buat kegiatan kampanye Pemilu 2024 yang disampaikan PPATK kurang rinci. "Terkait transaksi ratusan miliar tersebut, PPATK tidak merinci sumber dan penerima transaksi keuangan tersebut. Data hanya diberikan dalam bentuk data global, tidak terperinci, hanya berupa jumlah total data transaksi keuangan perbankan," kata Komisioner KPU Idham Holik dalam keterangan tertulis, Sabtu, 16 Desember 2023.



Terkait temuan PPATK yang menyebutkan adanya transaksi janggal dana kampanye peserta pemilu, Bawaslu tidak dapat menindaklanjuti lebih jauh. Sebab, pihaknya perlu menunggu laporan peserta pemilu soal Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), sebagai bahan acuan dan pertimbangan.

Idham mengatakan laporan dari PPATK berisi tentang transaksi mencurigakan yang ada hubungannya dengan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Dalam surat tersebut, PPATK menjelaskan bahwa transaksi uang masuk dan keluar berjumlah ratusan miliar rupiah dari rekening bendahara partai politik (parpol) pada periode April sampai Oktober 2023.

"PPATK menjelaskan transaksi keuangan tersebut berpotensi akan digunakan untuk penggalangan suara yang akan merusak demokrasi Indonesia," ujar Idham.

Ilham menambahkan, PPATK juga memantau ratusan ribu SDB (Safe De-

posit Box) di Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) ataupun bank BUMN pada periode Januari 2022-30 September 2023.

Mengutip hasil pantauan PPATK, Idham menyatakan penggunaan uang tunai yang diambil dari SDB tentunya akan menjadi sumber dana kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan apabila KPU tidak melarang lewat peraturan. "Terkait data SDB tersebut, sama

takan perlu rincian data PPATK untuk menindaklanjutinya.

Sedangkan Bawaslu menegaskan ranah pengawasan dana kampanye di lembaganya akan berdasarkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang dapat diketahui setelah 7 Januari 2024.

Boleh jadi, partai-partai politik peserta Pileg sedang sibuk menyiapkan LADK menyusul indikasi skandal yang dikemukakan oleh Ketua PPATK. Ini juga



dengan data transaksi keuangan parpol yang bersifat global, di mana tidak ada rincian sama sekali dari data SDB tersebut," ucap Idham. Implikasinya, KPU tidak dapat menanggapi lebih lanjut

Nah, dapat disimpulkan dari tanggapan Bawaslu dan KPU, setidaknya, lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilu ini, bukan lembaga yang dapat menindaklanjuti secara langsung laporan PPATK. Indikasinya, KPU meny-

dapat menjadi salah satu jawaban atas pertanyaan, mengapa kampanye Pileg menjelang Pemilu 2024 kurang meriah dibandingkan dengan kampanye Pilpres.

Jelas soal akuntabilitas atau pertanggungjawaban dana kampanye dapat menyandera langkah politik sekaligus berakibat sanksi hukum bagi para pengurus partai-partai politik. Jika melanggar hukum tentunya. •



SETELAH 7 JANUARI

Partai-partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2024 mulai menyampaikan informasi dana kampanyenya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai belum ada Parpol yang beres soal laporan ini.

Tanpa kecuali, KPU menyatakan laporan awal dana kampanye (LADK) semua partai politik tingkat nasional peserta Pemilu 2024 belum lengkap dan belum sesuai.

“Apabila hasil pencermatan terdapat dokumen yang dinyatakan tidak lengkap dan cakupan informasinya tidak sesuai maka LADK partai politik peserta pemilu akan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan selama lima hari sejak menerima pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU RI, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat,” kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI Idham Kholik, Selasa, 9 Januari 2023.

Idham menegaskan, kegiatan kampanye Pemilu didanai dan menjadi tanggung jawab peserta pemilu. Hal itu diatur dalam Pasal 325 hingga Pasal 339 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilu. Jadi, sambungnnya, peserta pemilu wajib mencatat pendanaan kampanye dimaksud dalam Laporan Dana Kampanye yang terdiri atas tiga jenis laporan, yaitu laporan awal dana kampanye (LADK), laporan pemberi sumbangan dana kampanye (LPSDK), dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).

LADK adalah pelaporan yang memuat informasi rekening khusus dana kampanye (RKDK); saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.

Kemudian catatan penerimaan dan pengeluaran partai politik peserta pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta

Pemilu; dan Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Idham menyebut LADK partai politik peserta Pemilu 2024 dan calon anggota legislatif wajib disampaikan oleh partai politik kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 7 Januari 2024 pukul 23.59 waktu setempat.

"Partai politik peserta Pemilu 2024 menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka)," ujar Idham.

Selanjutnya KPU mengeluarkan rincian waktu penyampaian LADK partai politik 2024 tingkat pusat:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), waktu penyampaian 7 Januari 2024 pukul 15.50 WIB, status penerimaan LADK belum lengkap dan belum sesuai.

2. Partai Gerindra Indonesia Raya (Gerindra), waktu penyampaian: 7 Januari 2024 pukul 01.45 WIB, status penerimaan LADK belum lengkap dan belum sesuai.

3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), waktu penyampaian: 7 Januari 2024 pukul 16.22 WIB, status penerimaan LADK belum lengkap dan belum sesuai.

4. Partai Golongan Karya (Golkar), waktu penyampaian: 7 Januari 2024 pukul 16.40 WIB, status penerimaan LADK: belum lengkap dan belum sesuai.

5. Partai NasDem, waktu penyampaian: 7 Januari 2024 pukul 22.10 WIB, status penerimaan LADK: belum lengkap dan belum sesuai.

6. Partai Buruh, waktu penyampaian: 7 Januari 2024 pukul 12.48 WIB, status penerimaan LADK: belum lengkap dan belum sesuai.

7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), waktu penyampaian: 7 Januari 2024 pukul 01.46 WIB, status penerimaan LADK: belum lengkap dan belum sesuai.

8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), waktu penyampaian: 6 Januari 2024 pukul 21.55 WIB, status penerimaan LADK: belum lengkap dan belum sesuai.

9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), waktu penyampaian: 7 Januari 2024 pukul 14.57 WIB, status penerimaan LADK: belum lengkap dan belum sesuai.

10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), waktu penyampaian: 7 Januari 2024 pukul 20.02 WIB, status penerimaan LADK: belum lengkap dan belum sesuai.

11. Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), waktu penyampaian: 7 Januari 2024 pukul 19.27 WIB, status penerimaan LADK: belum lengkap dan belum sesuai.

12. Partai Amanat Nasional (PAN), waktu penyampaian: 7 Januari 2024

ian: 7 Januari 2024 pukul 15.49 WIB, status penerimaan LADK: belum lengkap dan belum sesuai.

17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), waktu penyampaian: 7 Januari 2024 pukul 21.26 WIB, status penerimaan LADK: belum lengkap dan belum sesuai.

18. Partai Ummat, waktu penyampaian: 7 Januari 2024 pukul 18.59 WIB, status penerimaan LADK: belum lengkap dan belum sesuai.

Idham mengatakan KPU melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK setelah menerima LADK partai politik peserta Pemilu 2024. "Kami tegaskan,



pukul 12.08 WIB, status penerimaan LADK: belum lengkap dan belum sesuai.

13. Partai Bulan Bintang (PBB), waktu penyampaian: 7 Januari 2024 pukul 13.20 WIB, status penerimaan LADK: belum lengkap dan belum sesuai.

14. Partai Demokrat, waktu penyampaian: 7 Januari 2024 pukul 20.00 WIB, status penerimaan LADK: belum lengkap dan belum sesuai.

15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI), waktu penyampaian: 7 Januari 2024 pukul 05.44 WIB, status penerimaan LADK: belum lengkap dan belum sesuai.

16. Partai Perindo, waktu penyampaian:

sebaiknya seluruh aktivitas pembiayaan kampanye itu dimasukkan ke dalam RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye)," ujarnya.

Dengan demikian, sambungnya, proses audit akan lebih mudah dilaksanakan. Idham menyatakan, KPU menyimpulkan, tidak seluruh transaksi dilakukan lewat RKDK. Sehingga transaksi itu sulit terpantau. Terhadap hal itu, Idham meminta partai agar mengefektifkan penggunaan RADK. Pada titik inilah data PPAK tentang aliran dana di luar RADK menjadi relevan.

Sebelum batas LADK berakhir pada 7 Januari 2023, PPAK sudah mengungkapkan temuan aliran dana

Rp195 miliar dari luar negeri ke 21 rekening bendahara parpol di berbagai tingkatan daerah. Dana Rp195 miliar itu hanya mencakup transaksi sepanjang 2023, yang jumlah transaksinya berlipat ganda dibandingkan dengan angka sepanjang 2022.

Dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2023 dan Proyeksi Kerja Tahun 2024 di Gedung PPATK, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Januari 2024, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengemukakan ben-

di Kabupaten Demak, Jawa Tengah dan Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Terkait hal itu, Idham menegaskan partai yang tidak melaporkan akan didiskualifikasi. "Itu akan dibatalkan kepesertaannya atau akan didiskualifikasi dari peserta pemilu," jelasnya.

Namun, diskualifikasi tersebut bersifat teritorial. Sebab, laporan bersifat berjenjang. Jika kepengurusan kabupaten/kota tidak melaporkan misalnya, maka diskualifikasi partai berlaku untuk



dahara parpol yang dimaksud bukan hanya bendahara umum di tingkat pusat, melainkan juga bendahara parpol level daerah.

Toh Ivan belum merinci lebih jauh bendahara partai mana saja yang menerima duit dari luar negeri tersebut. Yang jelas, menurut dia, transaksi dari luarnegeri itu meningkat dari 2022 sebanyak 8.270 transaksi menjadi 9.164 transaksi di 2023. "Pada 2022 penerimaan dananya hanya Rp 83 miliar kemudian meningkat pada 2023 menjadi Rp 195 miliar," ungkap Ivan.

Meski begitu, soal penggunaan penggunaan rekening lain, Idham mengaku bukan ranah KPU penanganannya. "Kalau ada rekening-rekening lainnya itu digunakan untuk transaksi keuangan tentunya itu di luar kewenangan KPU," tegasnya.

Tambahan pula, KPU menemukan ada cabang partai di daerah tidak melakukan pelaporan LADK hingga 7 Januari 2024 lalu. Antara lain Partai Garuda

pemilihan DPRD di wilayah itu. "Enggak nasional, sesuai tingkatan," kata Idham.

Toh bukan berarti di tingkat nasional tak ada masalah. Ini terungkap dari rincian LADK yang diumumkan oleh KPU.

Dari rincian itu PDIP tercatat sebagai partai politik dengan total penerimaan paling tinggi. Angka total penerimaannya adalah Rp183.861.799.000 (Rp183 miliar) dan total pengeluaran tertinggi pada Rp115.046.105.000 (Rp115 miliar). Di sisi lain, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tercatat memiliki total penerimaan senilai Rp2.002.000.000 (Rp2 miliar) dan total pengeluaran Rp180.000 (Rp180 ribu).

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja memandang perlu pengecekan pengeluaran LADK PSI hanya Rp180.000,00. "Ya, itu harus dicek kenapa yang bersangkutan demikian," kata Bagja, Rabu, 10 Januari 2023.

Menurut Bagja, terkadang partai

politik menyerahkan laporan seadanya dan baru melakukan perbaikan belakangan. Hal itu menjadi persoalan proforma di kalangan partai politik. "Kadang-kadang orang untuk mematuhi proforma itu dimasukkan dahulu, perbaikannya belakangan. Itu juga jadi persoalan," ujar Bagja.

Bagja mengatakan bahwa LADK partai politik, baik penerimaan maupun pengeluaran, harus terus diperbarui, terlebih akan ada laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LP-PDK).

Sedangkan Wakil Ketua Dewan Pembina DPP PSI Grace Natalie mengatakan bahwa laporan pengeluaran dana kampanye PSI yang dilansir KPU prosesnya belum final. "Pelaporan ini masih berjalan, ada transaksi berjalan yang belum pelunasan. Ini akan kami input ketika sudah pelunasan. Kami input bila sudah melakukan pembayaran dan kami terima bukti kuitansinya," kata Grace, Rabu, 10 Januari 2024.

Grace menyebutkan total pengeluaran kampanye partai akan bisa dilihat nanti di LPPDK pada akhir masa kampanye. Alasannya, partai masih perlu melakukan pendataan.

Berikut rincian data total penerimaan dan pengeluaran masing-masing parpol yang tercatat di KPU:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jumlah calon anggota legislatif: 580, menyampaikan LADK: 579, tidak menyampaikan LADK: 1. Total penerimaan: Rp1.005.330.806 (Rp1 miliar) dan total pengeluaran: Rp800.446.161 (Rp800 juta).

2. Partai Gerindra Indonesia Raya (Gerindra) Jumlah calon anggota legislatif: 580, menyampaikan LADK: 580, tidak menyampaikan LADK: 0. Total penerimaan: Rp2.841.667.200 (Rp2,8 miliar) dan total pengeluaran: Rp1.179.460.714 (Rp1 miliar).

3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jumlah calon anggota legislatif: 580, menyampaikan LADK: 575, tidak menyampaikan LADK: 5. Total penerimaan: Rp183.861.799.000 (Rp183 miliar) dan total pengeluaran: Rp115.046.105.000 (Rp115 miliar).

4. Partai Golongan Karya (Golkar) Jumlah calon anggota legislatif: 580, menyampaikan LADK: 580, tidak men-

yampaikan LADK: 0.Total penerimaan: Rp20.591.513.702 (Rp20,5 miliar) dan total pengeluaran: Rp8.801.317.049 (Rp8,8 miliar).

5. Partai NasDemJumlah calon anggota legislatif: 580, menyampaikan LADK: 580, tidak menyampaikan LADK: 0.Total penerimaan: Rp7.781.026.469 (Rp7,7 miliar) dan total pengeluaran: Rp7.631.655.294 (Rp7,6 miliar).

6. Partai BuruhJumlah calon anggota legislatif: 580, menyampaikan LADK: 578, tidak menyampaikan LADK: 2.Total penerimaan: Rp4.214.169.815 (Rp4,2 miliar) dan total pengeluaran: Rp3.758.092.806 (Rp3,7 miliar).

7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)Jumlah calon anggota legislatif: 396, menyampaikan LADK: 286, tidak menyampaikan LADK: 100. Total penerimaan: Rp5.808.500.000 (Rp5,8 miliar) dan total pengeluaran: Rp4.686.000.000 (Rp4,6 miliar).

8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jumlah calon anggota legislatif: 580, menyampaikan LADK: 580, tidak menyampaikan LADK: 0.Total penerimaan: Rp12.711.929.760 (Rp12,7 miliar) dan total pengeluaran: Rp7.833.307.791 (Rp7,8 miliar).

9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)Jumlah calon anggota legislatif: 525, menyampaikan LADK: 525, tidak menyampaikan LADK: 0.Total penerimaan: Rp453.048.200 (Rp453 juta) dan total pengeluaran: Rp42.700.400 (Rp42 juta).

10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Jumlah calon anggota legislatif: 485, menyampaikan LADK: 485, tidak menyampaikan LADK: 0.Total penerimaan: Rp2.010.000.753 (Rp2 miliar) dan total pengeluaran: Rp234.035.150 (Rp234 juta).

11. Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)Jumlah calon anggota legislatif: 570, menyampaikan LADK: 570, tidak menyampaikan LADK: 0.Total penerimaan: Rp5.500.000.000 (Rp5,5 miliar) dan total pengeluaran: Rp2.118.305.000 (Rp2,1 miliar).

12. Partai Amanat Nasional (PAN) Jumlah calon anggota legislatif: 580, menyampaikan LADK: 580, tidak menyampaikan LADK: 0.Total penerimaan: Rp29.826.000.000 (Rp29,8 miliar) dan total pengeluaran: Rp22.419.055.000 (Rp22,4 miliar).

13. Partai Bulan Bintang (PBB)Jumlah calon anggota legislatif: 470, menyampaikan LADK: 470, tidak menyampaikan LADK: 0.Total penerimaan: Rp301.300.000 (Rp301 juta) dan total pengeluaran: Rp228.300.000 (Rp228 juta).

14. Partai DemokratJumlah calon anggota legislatif: 580, menyampaikan LADK: 580, tidak menyampaikan LADK: 0.Total penerimaan: Rp8.748.860.395 (Rp8,7 miliar) dan total pengeluaran: Rp3.914.375.079 (Rp3,9 miliar).



15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jumlah calon anggota legislatif: 580, menyampaikan LADK: 580, tidak menyampaikan LADK: 0.Total penerimaan: Rp2.002.000.000 (Rp2 miliar) dan total pengeluaran: Rp180.000 (Rp180 ribu).

16. Partai PerindoJumlah calon anggota legislatif: 579, menyampaikan LADK: 579, tidak menyampaikan LADK: 0.Total penerimaan: Rp10.148.994.025 (Rp10,1 miliar) dan total pengeluaran: Rp9.997.744.025 (Rp9,9 miliar).

17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)Jumlah calon anggota legislatif: 580, menyampaikan LADK: 580, tidak menyampaikan LADK: 0.Total penerimaan: Rp20.005.000.000 (Rp20 miliar) dan total pengeluaran: Rp13.155.500.000 (Rp13,1 miliar).

18. Partai UmmatJumlah calon anggota legislatif: 512, menyampaikan LADK: 511, tidak menyampaikan LADK: 1.Total penerimaan: Rp479.128.518 (Rp479 juta) dan total pengeluaran: Rp478.137.200 (Rp478 juta).

Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono mengatakan, pihaknya sudah jauh-jauh hari mengingatkan partai untuk tertib administrasi laporan awal dana kampanye. Termasuk kepatuhannya sesuai jadwal. "Jadi sanksinya diskualifikasi itu," ujarnya.

Meski demikian, dia menekankan partai yang didiskualifikasi dapat melakukan pembelaan jika terdapat kendala. Yakni dengan mengajukan sengketa ke Bawaslu. Nanti, Bawaslu yang

akan menilainya.

Disinggung soal temuan PPAK, Totok mengatakan sikap Bawaslu masih sama seperti sebelumnya. Pihaknya, tidak dapat menyelidiki lebih jauh karena data bersifat rahasia. Selain itu, transaksi terjadi di luar rekening terdaftar sehingga di luar kewenangannya.

Namun dia menegaskan, data PPAK tetap akan bermanfaat. Khususnya untuk data pembanding dalam menganalisis laporan akhir dana kampanye kelak. "Baru nanti kita akan menilai apakah penggunaan uang itu untuk kampanye atau tidak atau dari unsur yang lain. Jadi untuk sampai saat ini kami belum bisa," kata Totok.

Nah, soal akuntabilitas keuangan ini, partai-partai politik peserta Pemilu 2024 termasuk para politisinya harus mengantisipasi minimal dua hal. Sanksi pelanggaran terkait dana kampanye sesuai dengan UU Pemilu dan juga sanksi pidana temuan PPAK jika terbukti melanggar hukum. ●

LIRIKAN PENEGAK HUKUM

Akuntabilitas keuangan partai-partai politik memang perlu menjadi dering pengingat para peserta Pemilu 2024. Terlebih lagi, lembaga penegak hukum mulai melirik temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Daftar 100 calon anggota legislatif (Caleg) pada Pemilu 2024 dengan transaksi terbesar sudah terdata oleh PPATK. Aparat penegak hukum pun mulai melirik temuan itu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, berencana menelaah laporan PPATK terkait transaksi mencurigakan 100 caleg. Sebelumnya PPATK menemukan transaksi mencurigakan pihak yang dimaksud itu mencapai Rp51,4 triliun.

Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana mengemukakan lembaganya menemukan 100 laporan transaksi keuan-

gan mencurigakan (LKT) dari 100 caleg yang masuk daftar calon tetap (DCT). Seratus caleg ini dikelompokkan menurut jumlah transaksi yang paling besar dari total DCT pada 2022-2023.

"Laporan transaksi keuangan mencurigakan sendiri terhadap 100 DCT, ini kita ambil 100 terbesar ya, itu nilainya Rp51.475.886.106.483 (Rp51,4 triliun)," kata Ivan saat konferensi pers Refleksi Kerja PPATK 2023, Rabu, 10 Januari 2024 di kantornya, kawasan Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat.

Berdasarkan nilai transaksinya, dana

diduga hasil korupsi menjadi yang terbesar dengan total 14 kasus bernilai Rp 3,51 triliun atau Rp 3.518.370.150.789.

Menyusul kemudian, empat kasus perjudian senilai Rp 3,1 triliun, satu kasus terkait dengan lingkungan hidup (illegal mining) senilai Rp 1,2 triliun, satu kasus terkait lingkungan hidup (TSL) senilai Rp 264 miliar.

"Lalu yang terkait dengan penggelapan ada dua kasus yaitu Rp238 miliar, terkait dengan narkoba ada 14 kasus itu Rp136 miliar, dan di bidang Pemilu ada 12 kasus angkanya Rp21 miliar," sambungnya.

Ivan menyatakan, PPATK telah me-



nyerahkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum (APH) untuk ditindaklanjuti. Hingga 10 Februari 2024, pihaknya menyerahkan lima kasus kepada Polri, sembilan kasus kepada KPK, satu kasus kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan lainnya.

Tanggapan datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, lembaganya bisa menindaklanjuti temuan yang dimaksud jika terdapat unsur penyelenggara negara.

"Caleg itu masih masuk penyelenggara negara atau masih baru caleg yang orang swasta," kata Alex saat ditemui wartawan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kamis, 11 Januari 2024.

Menurut Alex, rujukannya adalah Undang-Undang KPK yang membatasi ranah kewenangannya sebatas penyelenggara negara. "Iya kan begitu undang-undangnya, KPK seperti itu. Kewenangan KPK sebatas terkait penyelenggara negara," ujarnya.

Lembaga penegak hukum yang tidak dibatasi oleh kriteria penyelenggara negara adalah institusi Kepolisian. Juga Kejaksaan.

Nah, dari institusi Kepolisian, torat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal transaksi keuangan mencurigakan calon legislatif (caleg) yang masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024.

"Nanti saya koordinasi dengan PPATK," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan saat dikonfirmasi, Kamis, 11 Januari 2024.

Whisnu mengaku pihaknya juga masih belum mendapat laporan soal temuan PPATK itu. Oleh karenanya, ia akan berkoordinasi ke pihak PPATK. "Tapi sampai sekarang saya belum dapat," ujar Whisnu.

Dari pihak Parpol, Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni merespons temuan PPATK itu. Dia kemudian menantang PPATK untuk membuka nama-nama bendahara parpol itu.

"Langsung buka aja semua nama-namanya. Jangan cuma jumlah uangnya yang disebut," ujarnya.

Sahroni menilai hal ini diperlukan agar tidak menimbulkan tuduhan liar. "Daripada menimbulkan fitnah," kata Sahroni.

Sedangkan Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid mengemukakan, soal transaksi dari luar negeri yang mengalir ke rekening 21 bendahara partai politik menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Kalau keuangan parpol (partai politik) makin transparan, kami semakin senang," kata Nusron saat konferensi pers di Media Center TKN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Janu-



• INFO KHUSUS

ari 2024.

Toh Nusron menyatakan PPAK hanya bisa melacak tapi tidak bisa melakukan penindakan. "Tidak bisa melakukan penindakan. Penindakannya tetap dilakukan oleh aparat penegak hukum," ujar Nusron.

Menurut dia, temuan PPAK itu perlu telaah lebih jauh. "Kita jangan menganggap bahwa segala sesuatu yang diumumkan oleh PPAK itu pasti ada tindak pidana, belum tentu," ungkapnya.

Menko Polhukam yang juga cawapres nomor urut 3 Mahfud MD

berharap KPK, kejaksaan, dan kepolisian itu tidak terpengaruh oleh politik. Kalau memang ada, sikat saja," ujarnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengemukakan TKN terbuka terkait hal itu, seperti yang sudah disampaikan Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid.

"Saya kira kami terbuka, silakan periksa saja, tidak ada masalah," ujar Budiman saat ditemui di Kantor Relawan Prabu, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 18 Desember 2023.

jika parpolnya diusut soal aliran dana. "(PKB) siap," ujarnya.

Jadi, menanggapi lirikan penegak hukum, semangat transparansi dan akuntabilitas di kalangan Parpol peserta Pemilu 2024 maupun tim pemenang para Capres sudah terlihat. Banyak yang menunggu perkembangan konkretnya tentu.

Terlebih lagi, sejak awal PPAK mengumumkan temuannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mendukung tindak lanjut proses hukum atas laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi



meminta KPK, kejaksaan dan kepolisian untuk menindaklanjuti temuan tersebut. "Kan sudah ditindaklanjuti. Oleh PPAK dilaporkan ke KPK, ke kejaksaan, ke kepolisian. Kita tunggu," kata Mahfud usai mengunjungi Pondok Pesantren Nahdlatut Thullab, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Kamis, 11 Januari 2024.

Mahfud menegaskan bahwa temuan itu sudah ditindaklanjuti oleh PPAK dan dilaporkan ke penegak hukum. "Sudah ditindaklanjuti oleh PPAK, dilaporkan ke KPK, kejaksaan, dan ke kepolisian," kata Mahfud.

Menurut dia, aparat penegak hukum diharapkan bebas bias politik "Dan kita

Budiman mengatakan bahwa TKN Prabowo-Gibran transparan dalam hal itu. "Kami terbuka, monggo, transparan," kata Budiman.

Di sisi lain, Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengemukakan, temuan PPAK soal aliran dana Rp 195 miliar ke rekening bendahara 21 partai politik (parpol) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 memang perlu tindak lanjut aparat penegak hukum. "Usut. PPAK membuktikan, polisi jangan diam," ujar Cak Imin di Blitar, Jawa Timur, Kamis, 11 Januari 2023

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun menyatakan siap

janggal pada Pemilu 2024.

Jokowi mengatakan aturan hukum sudah jelas. Dia yakin proses hukum akan berjalan bila kejanggalan ditemukan.

"Ya semua yang ilegal dilihat saja. Sesuai dengan aturan, ya pasti ada proses hukum," kata Jokowi di sela peresmian Jembatan Otista, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa, 19 Desember 2023.

Jokowi mengimbau semua pihak untuk mengikuti Pemilu 2024 sesuai aturan. Ia mendukung semua pihak mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. "Ya semua harus mengikuti aturan yang ada," tandasnya. ●



info indonesia

www.infoindonesia.id

INOVASI UNTUK NEGERI

Network



INFO PASANG
ZULFAHMI
+62 813 8019 6507
IKLAN



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **INFO** kepada masyarakat Sumsel



Koran Cetak Info Indonesia



JAKARTA
JL. Raya Kalibata No. 8
Jakarta Selatan (12750)

www.infoindonesia.id
facebook @infoindonesia.id twitter @_infoindonesia
Instagram @info_indonesia.id YouTube : infoindonesiatv

Telp : 021-79196781
Email : redaksi@infoindonesia.id



iNOVASI UNTUK NEGERI
info indonesia

<https://infoindonesia.id>

EDISI #39 JANUARI 2024



**ANIES-CAK IMIN
PASTI KALAH**